

Profil Interaksi Verbal Pasien Penyakit Jantung Koroner dalam Berkomunikasi

Amanah Rakhim Syahida

Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang,
Jl. Telaga Warna, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, Telp (0341)
565500

email : amanah.unitri@gmail.com

Abstract

Coronary heart patients are very strong subjects in the research of verbal interaction profiles. Because a lot of verbal interactions must be understood by patients as communicators. Simple communication theory to find this interaction has several elements, namely Communicator, Message (Message), Channel, Communicative, and Feed back. This type of research uses qualitative descriptive methods including observations in the location of the safira panjen Malang Main clinic, in-depth interviews with coronary heart patients who were included in the informant's criteria as a sample, namely Mr. Suryadi who had long been treated as a coronary heart disease patient, as the primary informant, and supporting informants namely the closest person and specialist doctor and then data analysis. The results of this study can be concluded 1.) the profile of verbal interaction of coronary heart patients in communicating has Determinism the use of verbalization generally has conditions directed to meet the desired goals of coronary heart patients (communicators) in expressing messages in the form of language, symbols, channel in the form of senses and HP in communicating, Feed Back with communicants, this leads to healing, and verbal interactions of a coronary heart patient (communicator) experience repeated conditions with the assumption that using Indonesian or Javanese language kromo inggil, Channel, Feed back given by communicant in this is like; family environment, workplace and physician at the same time) in Communicating Coronary Jantung Patients who finally get the full understanding and comfort and discomfort to influence their health condition, 2.) Obstacles are also experienced in interacting which lead to Polarization, Evaluation of Stasis in Coronary Heart Patients, Stereotypes Between Patients with Coronary Hearts (Communicators) with their communicants.

Keyword: *Verbal Interaction, Coronary Heart Patients, Communicate.*

Abstrak

Pasien jantung koroner merupakan subyek yang sangat kuat dalam riset profil interaksi verbal. Karena banyak sekali interaksi verbal yang harus dipahami oleh pasien sebagai pelaku komunikator. Teori komunikasi sederhana untuk menemukan interaksi ini memiliki beberapa elemen yaitu Komunikator, Message (Pesan), Channel, Komunikan, dan *Feed back*. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif meliputi observasi yang lokasi penelitian di klinik Utama safira panjen Malang, wawancara mendalam kepada pasien jantung koroner yang sudah masuk dalam kriteria informan sebagai sampelnya yaitu bapak suryadi yang sudah

lama terapi pengobatan sebagai pasien penyakit jantung koroner, sebagai informan utamanaya, dan informan penunjang yakni orang terdekatnya dan dokter spesialis dan kemudian analisis data. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan 1.) profil interaksi verbal pasien jantung Koroner dalam berkomunikasi memiliki Determinisme penggunaan verbalisasi umumnya mempunyai syarat yang diarahkan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan pasien jantung koroner (komunikator) dalam mengungkapkan pesan berupa bahasa, simbol, channel berupa panca indra dan HP dalam berkomunikasi, Feed Back dengan komunikan, hal ini mengarah pada penyembuhannya, dan interaksi verbal seorang pasien jantung koroner (komunikator) mengalami keadaan yang berulang-ulang dengan asumsi bahwa menggunakan bahasa indonesia atau bahasa jawa kromo inggil, Channel, Feed back yang diberikan komunikan dalam hal ini seperti; lingkungan keluarga, tempat kerja dan sekaligus dokter spesialisnya) dalam Berkomunikasi Pasien Jantung Koroner yang akhirnya mendapatkan pemahaman secara utuh dan rasa nyaman dan tidak nyaman untuk memengaruhi kondisi kesehatannya, 2.) Hambatan pun juga dialami dalam berinteraksi yang menimbulkan Polarisasi, Evaluasi Stasis Pasien Jantung Koroner, Stereotipe Antar Pasien Jantung Koroner (Komunikator) dengan komunikannya.

Kata Kunci: *Interaksi Verbal, Pasien Jantung Koroner, Berkomunikasi.*

<i>Submite</i>	: 17 September 2018
<i>Review</i>	: 08 November 2018
<i>Accepted</i>	: 14 Januari 2019
<i>Surel Corespondensi</i>	: yuli@usm.ac.id

Pendahuluan

Kualitas pelayanan rumah sakit sangat erat kaitanya dengan komunikasi yang dilakukan oleh tenaga medis baik oleh dokter ataupun perawat yang melayani pasien, komunikasi medis yang dilakukan oleh paramedis atau perawat disebut dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang direncanakan secara sadar dan bertujuan dan kegiatannya difokuskan untuk kesembuhan pasien, dan merupakan komunikasi profesional yang mengarah pada tujuan penyembuhan pasien. (Purwanto, 1994).

Namun dalam hal ini peneliti tidak mengkaji tentang komunikasi terapeutik, akan tetapi sebagai pelengkap literasi untuk melihat bagaimana pentingnya kajian interaksi di bidang kesehatan. Komunikasi sangat luas kajiannya sehingga peneliti berusaha memaparkan fokus bahwa seorang penderita jantung koroner juga sangat menarik untuk diperhatikan dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-harinya mengingat agar publik juga mengevaluasi diri terhadap diri sendiri untuk menjaga kesehatan jantungnya.

Ilmu pengetahuan bidang kesehatan sangat penting bagi manusia. Dan seorang dokter diharapkan bisa memberikan solusi atas penyakit yang dialami pasiennya. Dengan solusi yang

diberikan kepada pasiennya, dokter akan menjadi rujukan masyarakat yang sedang menderita penyakit. Kemudian juga seorang dokter juga dituntut untuk bisa berkomunikasi interaktif active dengan pasien, dalam hal ini terutama pasien yang terkena penyakit kusus atau kronis tertentu.

Contoh dalam fenomena pasien jantung koroner di kota Malang khususnya, Kenapa demikian, apakah penting jika pasien jantung koroner harus dalam perawatan khusus? Jawabannya sangat penting, agar pasien segera pulih atau membaik. Dengan kemampuan dalam berkomunikasi bisa mempengaruhi kondisi penderita jantung koroner. Dalam rutinitas sehari-hari, aktivitas penderita jantung koroner perlu mendapat banyak dukungan dari dokter yang menanganinya atau keluarga yang dicintainya.

Pasien jantung koroner merupakan subyek yang sangat kuat dalam riset profil interaksi verbal pasien jantung koroner dalam berkomunikasi. Hal ini penting juga untuk diketahui oleh publik karena banyak sekali yang harus di eksplor terkait interaksi verbal dan harus dipahami oleh publik. Sebagai bentuk pengetahuan umum yang harus dipahami bersama, agar publik juga memperhatikan kesehatan masing-masing yang mana setiap manusia wajib menjaga kesehatan jantung demi menjaga kesehatan tubuh.

Riset ini juga akan berguna bagi pasien dan dokternya agar memahami lebih dalam makna-makna pesan verbal baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berkominikasi sehari-hari. Pasalnya, komunikasi yang terjadi di dalamnya telah melalui berbagai tahapan aktifitas interaksi pasien penyakit jantung koroner dalam berkomunikasi. Harapannya ke depan, berdasarkan penelitian ini akan muncul sebuah temuan baru guna dijadikan analisis terhadap permasalahan yang ada. Oleh karena itu perlu kita pahami bersama bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sekaligus bahasa daerah lokal malang khususnya yang menjadi alat komunikasi dalam berinteraksi. Hal ini merupakan suatu bagian yang sangat esensial dari manusia untuk menyatakan dirinya maupun tentang dunia yang nyata. Keyakinan yang naif kalau kita menyederhanakan fungsi bahasa yang seolah-olah hanya menjadi alat untuk menggambarkan pikiran dan perasaan saja. Yang lebih penting dari bahasa adalah bagaimana memaknakan simbol atau tanda yang telah diorganisasikan dalam sistem keabsahaan. Namun dalam pokok kajian ini diharapkan mampu menemukan adanya tujuan dalam penelitian ini yang memfokuskan pada bagaimana profil interaksi verbal pasien penyakit jantung koroner dalam berkomunikasi dan hambatan interaksi verbal yang dialami pasien penyakit jantung koroner dalam berkomunikasi.

Teori dan Metode

Definisi Komunikasi Secara etimologi, istilah komunikasi berasal dari bahasa latin “communication”. Istilah ini bersumber dari kata “communis” yang berarti sama, yaitu sama makna atau sama arti. Jadi, komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. (Sharen Gifary, 2015)

Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran informasi sekurang-kurangnya antara 2 pihak yang berperan sebagai pengirim (sender) dan penerima (receiver) dengan menggunakan berbagai media yang ada. Komunikasi memiliki beberapa elemen penting, yaitu :

1. Komunikasi melibatkan orang-orang, sehingga komunikasi yang efektif terkait dengan bagaimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan lebih efektif.
2. Dalam komunikasi terjadi penyampaian dan pertukaran informasi dan pengertian, sehingga agar proses ini dapat terjadi dan dapat dipahami, maka pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyadari dan mengerti berbagai istilah dalam berkomunikasi
3. Komunikasi dapat berupa bentuk-bentuk simbolis seperti suara, huruf, angka, bahasa tubuh, dan lainnya. (Daryanto, Abdullah MBA, 2013)

Komunikasi berasal dari akar kata yang maknanya selalu (1) melibatkan pertukaran simbol atau tanda baik verbal maupun nonverbal, (2) terbangunnya relasi kebersamaan antara komunikator dengan komunikan. Simbol atau tanda verbal seperti bahasa lisan dan bahasa tulisan. Sementara simbol atau tanda nonverbal seperti mimik, gerak-gerik serta suara. Terbangunnya relasi kebersamaan ini bukan selalu sebagai hubungan yang positif seperti keakraban atau keintiman melainkan terbentuknya kontak hubungan antara pengirim pesan dengan penerima pesan melalui simbol atau tanda-tanda tertentu yang bersifat verbal atau nonverbal. Aplikasi kontak simbol ini baik dilakukan dengan diri sendiri (intrapersonal) maupun dengan pihak lain (antarpersonal). (Purnomo, 2018)

Komunikasi Verbal, Bahasa dan Persepsi

Bahasa dalam komunikasi verbal dipandang sebagai suatu wahana penggunaan tanda-tanda atau simbol-simbol untuk menjelaskan suatu konsep tertentu. Bahasa memiliki kekayaan simbolis verbal dan dipandang sebagai upaya manusia: 1) mendayagunakan informasi yang

bersumber dari persepsi manusia, 2) medium untuk berkomunikasi secara santun dengan diri sendiri maupun dengan orang lain.

Setiap manusia melalui persepsinya memilih obyek yang paling menarik atau tidak menarik kembali melalui bahasa. Kemampuan berbahasa dapat mempengaruhi persepsinya. Jika kemampuan berbahasa kurang maka akan mengakibatkan klasifikasi yang ia lakukan tidak bermutu. Clyde Kluckhohn mengatakan, bahasa ibarat cermin manusia, karena melalui bahasa manusia melihat dunia dan menginterpretasikannya, (Alo Liliweri, 1994).

Prinsip Komunikasi Verbal

Leonard Bloomfield maupun Charles Hockett mengungkapkan bahwa pada hakikatnya manusia menggunakan bahasa sebagai suatu kerangka rujukan tetap untuk membuktikan kepada orang bahwa ia bisa melakukan percakapan timbal balik. Kerangka rujukan itu selalu menempatkan bahasa untuk menggagas tema pembicaraan yang abstrak maupun konkret, masalah lalu/kini yang akan datang. Keduanya mengemukakan bahwa manusia dapat berbicara tentang apa yang tidak ada disini namun ada disana. (De Vito, 1978)

a. Determinisme

Semua verbalisasi umumnya mempunyai syarat yang diarahkan untuk memenuhi tujuan tertentu. Pada waktu seorang mengucapkan suatu ‘kata’ maka terkandung pula apa yang dimaksudkannya. Demikian juga, kalau ia berdiam diri, maka ia pun mempunyai maksud tertentu. Kata menurut Watzlawick, Jackson, Beavin 1994, digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu. Jika orang yang diam pun mempunyai arti apalagi jika orang itu berbicara. Benar ungkapan ketiganya, “manusia tidak bisa menghindari komunikasi”. Verbalisasi, meskipun mempunyai keterbatasan-keterbatasan karena adanya keturunan (ini yang membedakannya dengan nonverbal) namun verbalisasi mempunyai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

b. Keadaan yang Berulang (*recurrence*)

Kitapun melihat dalam komunikasi antarpribadi ada suatu yang ditunjukkan orang itu pada kita. Orang lain dapat menunjukkan beberapa hal, misalnya tentang keadaannya sepanjang suatu waktu, serta reaksi pribadi apa yang ia sukai/tidak sukai, apa yang diinginkan dan dibutuhkan untuk dipenuhi. Semua hal itu dapat dilukiskan secara verbal dan berulang kali.

Perlbagai pernyataan dalam bentuk ‘kata-kata’ secara tepat dapat diucapkan dari waktu ke waktu dan berulang-ulang mengiringi perilaku non-verbal.

Desain Pesan

Desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan. Desain pesan merupakan bagian dari kawasan teknologi pendidikan 1994 yang masuk ke dalam kawasan desain. Kawasan desain mencakup : 1) desain sistem pembelajaran, 2) desain pesan, 3) startegi pembelajaran, dan 4) karakteristik pembelajaran. Desain Pesan terlebih pesan yang disampaikan adalah pesan pembelajran harus dikemas dengan cara menarik dan mudah dipahami. Cara mengemas pesan tertentu merujuk pada definisi desain pesan pembelajaran. Fleming & Levie mengatatakan bahwa desain pesan pembelajaran merupakan proses memanipulasi atau perencanaan memanipulasi susunan tanda dan simbol dalam rangka mempengaruhi kondisi-kondisi belajar. Pesan pembelajaran yang tidak didesain berdasarkan teori desain pesan cenderung akan sulit mempengaruhi proses belajar. (Grabowski dan Seel dan Richey, 1994).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan atau lisan yang diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah. *Key informan* : Pasien Jantung Koroner, Bapak Suryadi (nama samaran), jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan wiraswasta, memiliki 4 orang anak, dan beliau anak pertama dari 3 bersaudara, lahir di Malang. Yang memiliki kriteria khusus untuk dijadikan sumber informan utama. Kriteria yang ditetapkan tersebut yakni, pasien yang sudah menderita cukup lama kurang lebih 10 tahun lamanya dan sudah menjadi pasien tetap di klinik utama safira panjen Malang, dan berusia 50 tahun keatas. Mengapa lamanya berobat dan usia dijadikan ukuran yang sangat kuat dalam menentukan obyek karena dalam jangka waktu yang lebih dari 2 tahun manusia sosial memiliki kedekatan emosional dengan lingkungannya, sehingga lebih memahami satu sama lain dalam berinteraksi, dan usia pasien yang diatas 50 tahun, pada saat seseorang menginjak usia tersebut pada umumnya selalu ingin diperhatikan seperti pada saat fase remaja, sehingga secara psikologi seseorang yang berusia 50 tahun adalah fase dimana manusia menginjak usia senja, Yang memiliki tingkat sensifitas yang lumayan tinggi.

Informan penunjang dalam penelitian ini yakni seorang dokter spesialis dan sudah menangani pasien penyakit jantung koroner cukup lama yakni Bapak Doktor Soedirman (Nama samaran). Beliau sudah menangani pasien jantung koroner kurang lebih 35 tahun lamanya, usia beliau sudah 62 tahun dan menjadi dokter spesialis sudah lumayan lama. Beliau juga mengabdikan di salah satu rumah sakit ternama di kota Malang. Klinik yang ia miliki sudah cukup banyak pasien dan perawatnya pun 10 lebih untuk membantunya dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter spesialis jantung koroner.

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan di pilih orang yang memiliki power dan pengalaman pada situasi atau obyek yang diteliti, sehingga mampu “membukakan pintu” kemana saja penelitian akan melakukan pengumpulan data. Dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Dari sumber yang diterima dari klinik yang akan diteliti masih ada 1 -5 pasien yang sudah berlangganan berobat di klinik tersebut. Sehingga peneliti simpulkan untuk mengambil sampelnya 1 orang informan yang sudah merepresentasikan pasien yang lainnya, dan mengingat lamanya pasien tersebut berobat.

Teknik pengumpulan data yang utama merupakan observasi participant, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu dikemukakan kalau teknik pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang diobservasi. Dalam penelitian pasien jantung koroner untuk mengungkap profil verbalnya kita perlu memahami dari banyak segi bahasa yang biasa digunakan. Sehingga penting peneliti menggunakan teknik observasi participant yaitu salah satunya dokter sebagai partner berbicara ketika pasien sedang berobat. Kemudian pihak keluarga yang lebih mengetahui kondisi personal pasien jantung koroner dalam sehari-hari di rumah atau lingkungan keluarga. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif merupakan tahap memasuki lapangan yang didalamnya harus menentukan fokus subyeknya. Teknik pengumpulan data dengan miniatur question yang telah disiapkan. Analisis data dilakukan dengan verifikasi antara teori yang digunakan dengan temuan data lapangan untuk menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Profil Interaksi Verbal Pasien Jantung Koroner dalam Berkomunikasi

1. Pasien Jantung Koroner (Komunikator) dalam Berkomunikasi

Komunikator (pemberi pesan) dalam berkomunikasi sangat berdominan untuk menyampaikan pesannya, biasanya juga berarti tempat berasalnya sumber pesan beragam. Aktifitas proses interaksi verbal pasien jantung koroner di klinik Utama Safira sangatlah bermacam jenisnya, begitu banyaknya jenis pasien jantung koroner membuat dokter untuk mendiagnosa tidaklah mudah untuk memberikan proses penyembuhannya. Fakta lapangan banyak sekali yang harus dipahami agar dapat mengerti secara utuh terkait interaksi verbal pasien jantung koroner.

a) Determinisme Pasien Jantung Koroner

Semua dalam penggunaan verbalisasi umumnya mempunyai syarat yang diarahkan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti yang dialami Pak Suryadi pasien jantung koroner dengan usia 56 tahun, beliau sudah lama menjalani terapi penyembuhan di klinik Utama Safira kurang lebih sudah berjalan 10 tahun lebih sejak usia 40 tahun dalam menjalani terapi penyembuhannya. Komunikasi personal pasien sebagai komunikator melibatkan orang-orang disekitarnya, yakni istrinya (komunikasi) sebagai pendamping hidupnya yang dipercaya, dalam hal ini informan dapat terbantu untuk mencoba menceritakan kondisi sehari-harinya. Rasa nyeri di dada setiap malam pada setiap saat datang tiba-tiba juga sangat menghambat interaksi dengan orang terdekatnya, ia juga merasakan rasa tidak nyaman pada saat berkomunikasi dengan istrinya. Hal ini pun diceritakan informan pada saat malam hari santai bersama keluarga. Dan rasa sesak yang terkadang dirasakannya sangat menghambat konsentrasinya untuk berinteraksi secara verbal dengan isterinya, ia hanya bisa berinteraksi secara non verbal dengan kondisi sesak nafas yang dialaminya dan menggunakan media komunikasi agar dapat dipahami oleh istrinya.

Hal ini semisal ia meminta tolong untuk diambilkan makanan, biasanya juga ia terbantu dengan mengirim pesannya melalui HP (Handphone), dengan HP melalui chat (Watshap) ia merasa terbantu. Karena ketika rasa sesak itu menghampirinya rasa untuk mengutarakan pesan yang ingin disampaikan dengan verbal tidak menyeluruh dipahami oleh sang istri dengan tatanan bahasa yang tidak teratur. Dengan tujuan agar efektif terkait dengan bagaimana orang terdekatnya sekaligus yang dicintainya dapat berinteraksi dengan lebih

efektif. (Hasil data wawancara dengan Bapak Suryadi, pasien jantung koroner dan Istrinya, pada Juni 2018).

b) Keadaan yang Berulang (recurrence) Pasien Jantung Koroner

Dalam komunikasi antarpribadi ada suatu yang ditunjukkan seorang penyakit jantung koroner kepada lingkungan kerjanya, pada teman sejawat atau komunikannya semisal. Orang lain dapat menunjukkan beberapa hal, misalnya tentang keadaannya sepanjang suatu waktu, kewajiban tuntutan kerja setiap harinya juga serta menimbulkan reaksi pribadi apa yang ia sukai/tidak sukai, apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan untuk dipenuhi. Semua hal itu dapat dilukiskan secara verbal oleh seorang pasien penyakit jantung koroner yang sudah lama mengalami rasa nyeri di dadanya berulang kali. Perlbagai pernyataan dalam bentuk ‘kata-kata’ secara tepat dapat diucapkan dari waktu ke waktu dan berulang-ulang mengiringi perilaku non-verbal.

Dan setiap kali bapak Suryadi mengalami sesak didadanya, dengan selain dibantu ring jantung yang telah dipasang, ia juga membawa obat khusus jantung yang ia miliki sesuai dengan anjuran dokter. Keadaan yang berulang yang ia alami dalam rutinitasnya sudah menjadi budaya menjaga kesehatan jantungnya. Agar nafasnya tidak terhambat dan bisa berkomunikasi dengan rekan kerja dengan efektif.

2. Pasien Jantung Koroner dalam Menggunakan Channel.

Sarana yang digunakan pasien untuk berkomunikasi dengan dokter, biasanya menggunakan panca indra. Pasien Jantung Koroner dengan Komunikan dalam hal ini kepada dokter. Komunikan merupakan penerima pesan atau obyek sasaran dari kegiatan komunikasi. Dalam proses interaksi verbal pasien, dokter merupakan penerima pesan atau komunikan. Komunikasi pasien Interaksi dengan Dokter spesialisnya, informan memaparkan ketika berobat dengan jadwal yang sudah diatur sangatlah penting. Karena moment bertemu dengan dokter spesialis adalah waktu yang sangat berharga. Untuk itu penting sekali ketika disela kesibukan beliau masih banyak yang ingin disampaikan terkait dengan naik turunnya rasa sakit yang dideritanya.

Saat jantung yang mulai sesak dan berdegub kencang, dan kadang kala detak jantungnya menurun setiap waktu yang tidak menentu, dikarenakan psikologis yang dialami saat tekanan hidup yang ia alami di lingkungan kerja maupun lingkungan teman beliau. (Hasil wawancara

dengan Bapak Suryadi, pasien jantung koroner klini utama safira panjen Malang, pada juli 2018).

Mendayagunakan informasi yang bersumber dari persepsi manusia, Dan dengan keadaan waktu yang terbatas dengan dokter memiliki interaksi kepada dokter secara inten, dalam sehari ia harus control dan konsultasi kurang lebih 2 jam, hal ini harus ia lakukan kurang lebih seminggu tiga kali. Dan setiap harinya ia juga harus mengkonsumsi obat jantung dari resep dokter yang dianjurkan sesuai dengan takaran dosisnya.

Feed back dalam berkomunikasi dengan Dokter dari keluhan yang telah ia ceritakan kepada dokter begitu panjang dan mendalam baik secara verbal dan non verbal, hasil dari diagnosa dokter memaparkan kepada pasien yang menderita penyakit jantung koroner terjadi biasanya apabila arteri koronaria (arteri yang memasok darah ke otot jantung) menjadi mengeras dan menyempit. Hal tersebut disebabkan karena penumpukan kolesterol dan bahan lainnya, yang biasa disebut plak, pada dinding pembuluh darah ditubuh. Sehingga penumpukan ini disebut *aterosklerosis*. Plak akan semakin besar sehingga aliran darah ke otot jantung semakin sedikit dan menambah semakin sulit. Akibatnya, otot jantung tidak bisa mendapatkan darah atau oksigen yang dibutuhkan. Ketika jaringan kurang asupan, maka hal tersebut dapat direspons sel sebagai apa yang kita kenal dengan “nyeri dada khas” yang disebut dengan “angina”, atau jika arteri koronaria tersumbat total, maka pasien dapat jatuh ke dalam kondisi “serangan jantung”. Serangan jantung inilah yang merupakan kegawatan medis karena dapat menyebabkan kerusakan jantung permanen atau bahkan kematian.

Solusi yang dianjurkan oleh dokter yakni pasang ring jantung atau dalam bahasa medisnya disebut sebagai *stent* jantung adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk melebarkan pembuluh darah koroner yang menyempit atau tersumbat di bagian jantung. *Stent* terbuat dari logam ataupun plastik yang berbentuk tabung kecil yang tersusun dari kawat-kawat yang nampak seperti jala. Pemasangan *stent* ini menetap, sehingga akan melekat di jantung dan tidak bisa dikeluarkan lagi. Oleh karenanya, permukaan *stent* dilapisi dengan obat jantung koroner lainnya yang bisa membantu menjaga arteri yang tersumbat agar tidak tertutup. (Hasil wawancara dengan Bapak Soedirman, Dokter spesialis jantung koroner, pada juli 2018).

Pemasangan ring jantung merupakan prosedur non bedah di bawah anestesi lokal yang diberikan di daerah pergelangan tangan ataupun pangkal paha. Maka, selama tindakan berlangsung pasien akan dalam keadaan sadar. Selain itu, pemasangan *stent* umumnya tidak membutuhkan waktu yang lama, namun hal ini tergantung dari kesulitan dan jumlah ring yang akan dipasang. Prosedur pasang ring jantung yakni akan diawali dengan proses kateterisasi.

Kateterisasi ini dilakukan dokter dengan metode atau cara memasukkan selang kateter yang pada ujungnya dilengkapi dengan balon dan sudah dipasang ring jantung melalui pembuluh darah ke arteri koroner yang menyempit atau tersumbat.

Ketika kateter sudah berada di daerah yang dituju, dokter akan memasukan zat kontras ke dalam kateter untuk melihat kondisi jantung pasien yang terlihat dari perjalanan zat kontras di pembuluh darah, sehingga hal ini memudahkan dokter untuk melihat keadaan jantung pasien yang muncul di layar monitor. Saat kateter sudah dimasukkan ke dalam pembuluh darah, balon yang terdapat di ujung keteter dalam keadaan mengempis bersamaan dengan ring jantung. Namun ketika kateter telah sampai di area yang mengalami penyempitan dan penyumbatan, maka balon yang ada di bagian ujung keteter akan mengembang bersamaan dengan ring jantung. Balon ini berfungsi untuk meregangkan arteri yang tersumbat sehingga memungkinkan peningkatan aliran darah. Setelah itu balon kateter dikempeskan dan kemudian selang kateter ditarik keluar. Namun saat kateter ditarik keluar, ring jantung menetap di lokasi tersebut supaya pembuluh darah tetap terbuka.

3. Hambatan Interaksi Verbal Pasien Jantung Koroner dalam Berkomunikasi

Hambatan yang dialami dalam berkomunikasi seorang pasien penyakit jantung koroner (komunikator) biasa disebut polarisasi karena pasien ketika itu mengutarakannya sering adanya kecenderungan untuk melakukan interaksi verbal yang mengelompokkan individu juga. Maksudnya ialah ingin berinteraksi dengan orang yang ia kehendaki dengan nyaman dan bisa memahami kondisi kemauannya, hal itu juga menciptakan zona nyaman baginya. Seperti misalnya pasien jantung koroner dalam kondisi baik menjadi buruk, kondisi ini biasanya bisa nampak terlihat ketika pasien yang berusia 50 tahun keatas berkomunikasi dengan lawan bicaranya yang menurut ia menyenangkan, humoris, baik paras, nyambung ketika diajak berbicara baik verbal maupun non verbal dan lain sebagainya. (Hasil data wawancara dengan Bapak Suryadi, pasien jantung koroner dan Istrinya, pada Juli 2018).

Kemudian hal ini merupakan perubahan makna yang bergeser sangat drastis, Hal ini dapat berdampak pada proses komunikasi yang efektif. Dan dapat menimbulkan evaluasi Stasis Pasien Jantung Koroner, bisa digambarkan dengan kondisi dimana pada saat seorang komunikator memberikan pesan baik bersifat pribadi atau non pribadi dan dianggap tidak menarik oleh komunikan, maka terkadang pasien jantung koroner (komunikator) seterusnya terkadang komunikan tidak memberikan respon yang seperti diinginkannya, seperti memberikan perhatian lebih dalam interaksi tersebut. Semisal, lingkungan keluarga tidak

memberikan perhatian makna khusus untuk memberikan *feed back* baik verbal dan non verbal yang dialami saat berinteraksi, memberikan pengertian dan perhatian khusus saat pasien jantung koroner mengalami kondisi yang sangat kurang baik dimana kamunikan dalam hal ini adalah orang terdekatnya yaitu istri dan sanak saudara lainnya. Memberikan perhatian , pengertian dan dukungan penuh yang dilakukan komunikan merupakan wujud simpati dan empati yang bagi pasien jantung koroner (komunikator) ialah dimaknai memberikan bentuk support dan dukungan penuh kepadanya. Akan tetapi biasanya pasien jantung koroner (komunikator) yang sudah lama mengalami puluhan tahun proses penyembuhannya sering mengalami sensitifitas perasaannya untuk mudah merasa terintimidasi oleh keadaan yang menyimpannya, dan hal tersebut menyebabkan terkadang orang terdekatnya juga lalai memberikan support kepadanya karena selalu merasa bersalah ketika emosional yang tidak menentu dialami oleh pasien jantung koroner (komunikator). Hal tersebut juga menghambat proses interaksi dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga kondisi jenuh pasti sering dialami oleh seorang komunikan, baik lingkungan keluarga dan lingkungan tempat bekerjanya.

Selain itu, Hambatan interaksi verbal dalam berkomunikasi yang bisa kita perhatikan ketika pasien (Komunikator) merasa jenuh dengan komunikan yang terjadi. Stereotype Pasien Jantung Koroner dengan Komunikan, semisal ia merasa jenuh ketika setiap 3 minggu sekali berobat ke dokter untuk menjalankan proses penyembuhannya, atau bahkan saat kondisi kritis Bapak Suryadi harus menjalani masa inap secara inten dan dirawat oleh perawat. Hal ini terkadang juga mempengaruhi kondisi psikologi komunikasi dalam berinteraksi secara sehat. Karena tingkat emosionalnya tidak menentu yang disebabkan rasa nyeri didada menghambat pernafasannya yang harus dibantu dengan tabung oksigen. Hasilnya terkadang menyebabkan indiskriminasi dengan diri sendiri bahkan kepada orang lain, hal ini adalah stereotype terhadap diri sendiri dengan bentuk pesimis untuk supaya cepat sembuh. Sebenarnya stereotype mungkin menjadi penyebab terjadinya indiskriminasi. Namun kedua hal ini sebenarnya mirip-mirip, hanya ada perbedaan *timing* saja di antara keduanya.

Stereotype merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Namun, stereotype pasien (Komunikator) dapat berupa prasangka positif dan juga negative terhadap rasa sakit yang dideritanya agar harapan sembuh itu segera cepat, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif.

Stereotipe jarang sekali Nampak terjadi dalam interaksi interpersonal pasien jantung koroner (komunikator), biasanya hanya memiliki sedikit dasar yang benar, atau bahkan sepenuhnya dikarang-karang.

Kesimpulan

Interaksi pasien penyakit jantung koroner dalam berkomunikasi dapat disimpulkan bahwa dalam berkomunikasi memiliki beberapa hal penting untuk kita pahami diantaranya yakni :

1. Interaksi Verbal Pasien Jantung Koroner dalam Berkomunikasi

Message (pesan) merupakan rangkaian kata yang memiliki makna dan tujuan yang disampaikan oleh pasien jantung koroner (komunikator) melalui bahasa, gerakan sebagai simbol non verbal, pesan ini biasanya berupa keluhan pasien pada orang terdekatnya dan terkasihnya. Dalam komunikasi terjadi penyampaian dan pertukaran informasi dan pengertian untuk saling memberikan pemahaman , sehingga agar proses ini dapat terjadi dan dapat dipahami. Maka oleh sebab itu pihak-pihak yang berkomunikasi perlu menyadari dan mengerti berbagai istilah dalam berkomunikasi.

Komunikasi dapat berupa bentuk-bentuk simbolis seperti suara, huruf, angka, bahasa tubuh, dan lainnya. Media atau sarana yang digunakan pasien untuk berkomunikasi dengan dokter, biasanya menggunakan panca indra. Pasien Jantung Koroner dengan Komunikan dalam hal ini kepada dokter. Komunikan adalah penerima pesan atau obyek sasaran dari kegiatan komunikasi. Dalam proses interaksi verbal pasien, dokter merupakan penerima pesan atau komunikan yang sama sama memberikan keuntungan agar efektifitas dalam berkomunikasi berlangsung dengan hasil yang memiliki kesamaan makna.

Hasil dari interaksi verbal yang terwujud dalam konsultasi pada pasien jantung koroner berupa laporan keluhan untuk mengutarakan apa yang dirasakannya agar dapat tersampaikan dengan penuh harapan penyembuhan yang diinginkannya, dan sebagainya. Isi pesan ini juga yang menentukan untuk diagnosa dokter memberikan penafsiran atau pola persepsi dokter terhadap pasien jantung koroner untuk mempengaruhi tindakan masing-masing dan solusi yang didapatkan.

2. Hambatan yang dialami dalam Berkomunikasi Pasien Jantung Koroner (Komunikator)

Hambatan dalam hasil temuan fenomena penelitian interaksi verbal pasien penyakit jantung koroner dalam berkomunikasi ialah mengalami polarisasi, Seperti misalnya pasien jantung

koroner dalam kondisi baik menjadi buruk, sehat menjadi kambuh kembali sakitnya dan lain sebagainya. Perubahan makna yang disebabkan kondisi psikis yang bergeser sangat drastis ini dapat berdampak pada proses komunikasi yang efektif kepada komunikannya. Dan evaluasi Stasis Pasien Jantung Koroner, maka seterusnya komunikasi tidak akan memberikan perhatian lebih dalam interaksi tersebut. Hal ini merupakan hambatan interaksi verbal dalam berkomunikasi yang bisa kita perhatikan dan pahami ketika seorang komunikator dan komunikasi merasa jenuh dengan interaksi komunikasi yang terjadi. Terbentuknya stereotipe antar Pasien Jantung Koroner (komunikator) dengan Komunikasi, hal ini dikarenakan waktu dan kondisi lingkungan yang tidak menentu dirasakan dan dialami. Sehingga stereotipe mungkin menjadi penyebab terjadinya indiskriminasi. Hal ini jarang terjadi tetapi terkadang dialaminya saat masa penyembuhannya dirasa oleh pasien tidak kunjung usai atau bahkan seorang pasien merasa putus asa. Begitu juga lingkungan keluarganya yang terkadang merasa jenuh sudah banyak sekali support yang telah diberikan. Namun kedua hal ini sebenarnya mirip-mirip memiliki makna perseptif individu dengan kenampakan kondisi sosiologisnya, hanya ada perbedaan *timing* saja di antara keduanya.

Daftar Pustaka

- Alo Liliwei, (1994). Komunikasi verbal dan non verbal. Bandung : PT.CitraAditya Bakti.
- Armilatussshalilah. (2011). Pola Komunikasi Perawat dan Pasien Rawat Inap dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Universitas Islam Negeri.
- Burhan Bungin. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Putra Grafika.
- Chaer, Abdul. (2009). Psikolinguistik: Kajian Teoretik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Daryanto, Abdullah MBA. (2013). Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Dasrum Hidayati. (2013). Be A Good Communicator. Jakarta : PT. Gramedia.
- Desmita. (2009). Psikologi Perkembangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. (2007). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- <https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-kesehatan>, diakses pada 15 juli 2018
- <http://seputarkesehatandankeperawatan.blogspot.com/2014/08/komunikasi-perawat-dan-pasien.html>, diakses pada 15 juli 2018
- <http://www.depkes.go.id/article/view/17073100005/penyakit-jantung-penyebab-kematian-tertinggi-kemenkes-ingatkan-cerdik-.html>
- Imam Suprayogo. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Agama* Bandung: PT Remadja Rosdakarya.
- Komang udarma, Made Tegeh, Dewa Gede Agus Prabawa. (2015). Desain Pesan (Kajian Analisis desain Visual teks dan image). Yogyakarta:GRAHA ILMU
- Moleong, Lexy. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan, (2013). Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa, Jakarta, Kharisma Putra Utama.
- Naga, Sholeh S. (2013). Buku Panduan Lengkap Ilmu Penyakit Dalam. Jogjakarta: DIVA Press.
- Purnomo, A. (2018). Jurnal Noken 3 (2) 2018. *Noken*, 3(2), 11–26. Retrieved from <http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/111/65>
- Sharen Gifary, I. K. N. (2015). Intensitas Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Komunikasi. *Sosioteknologi*, 14(2), 170–178.
- Sugiyono.(2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Penerbit Alfabeta CV

To Be and How Not To Be: The Challenges Of Nation-Building in Nigeria

Adewunmi J. Falode

Senior Lecturer in International Relations & Strategic Studies, Department of History &
International Studies Lagos State University, Ojo Lagos State, Nigeria

P. M. B. 0001 LASU Post Office, Ojo Lagos State University Ojo, Lagos Nigeria.

Email : adewunmi.falode@lasu.edu.ng

Abstract

The work is the analysis of both the various nation-building challenges that have confronted Nigeria since independence and the possible ways the country can overcome them. The dream of Nigeria since independence in 1960 is to turn itself into a viable and cohesive nation. This has become an impossible dream however due to a myriad of challenges. Nigeria is a multi-ethnic society with over 250 ethnic groups. Each of these ethnic groups also have religious and economic issues that separates them from one another. Nigeria's diversity has been a major obstacle in its drive to become a global and responsible player in the international community. By using the qualitative research methodology, the work identified various challenges, such as corruption, autarky, governance and distribution that have been the major barriers to the creation of a viable polity. The style used in the study is also historical, descriptive and analytical. Crucially, the study also used the concept of nation-building as its Theoretical Framework. This has made it possible for the work to highlight and posit specific pragmatic and logical ways Nigeria can overcome its nation-building challenges and emerge a viable, cohesive and functional polity in the 21st century.

Keyword: *Nigeria, Nation-Building, Nation, Challenges, Independence*

<i>Submite</i>	: 12 Desember 2018
<i>Review</i>	: 18 Januari 2018
<i>Accepted</i>	: 13 Februari 2019
<i>Surel Correspondensi</i>	: ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Introduction

In 1914, Britain amalgamated the different and disparate people around the Rivers Niger and Benue confluence to form what was to become the nucleus of modern day Nigeria. In 1960, the entity called Nigeria became an independent state. At independence, Nigeria consisted of over 250 ethnic groups with a variety of languages and sub-dialects that runs into hundreds. Right from the period of the Amalgamation in 1914, Britain tried to forge the disparate ethnic groups into a unified force in order to make her job of exploiting the country's natural resources

easier. This is the rationale for the Amalgamation. When the country became independent in 1960, the founding fathers, just as the British tried to do with the Amalgamation, also tried to fuse the country together with the hope of turning Nigeria into a viable, cohesive and functional polity. This has become an impossible dream, however. Right from the first civilian administration of Sir Tafawa Balewa, the country's prime minister in the First Republic, the different Nigerian rulers have tried, unsuccessfully, to overcome the various nation-building challenges that has confronted the country. Such nation-building challenges that has stymied Nigeria since independence include: corruption, religion, ethnicity, democracy and of late, terrorism. Between 1960 and 1998, an admixture of civilian and military leaders ruled Nigeria. The First Republic was abruptly terminated by the Major Kaduna Ezeogwu-led coup d'état in 1967 (Falode, 2011).

This was to be the beginning of a long line of military rulers in the country's history that eventually came to an end in 1998. The inability of the Federal Government of Nigeria (FGN) to tackle the challenges of corruption and ethnicity destroyed the First Republic. Nigeria's Second Republic that started in 1979 did not fare any better under Shehu Shagari. The inability of Shagari to tackle challenges of corruption, governance and ethnicity were factors the military used for their incursion into the Nigerian political scene for a second time in 1983. The various military rulers in Nigeria from 1967 to 1979; and 1983 to 1999 also failed to resolve the nation-building challenges that has dogged the country since independence in 1960. With the dawn of the Fourth Republic in 1999, a new dangerous challenge, terrorism, was added to the mix of those problems Nigeria will have to tackle before it can emerge as a strong, cohesive and viable nation. This work analysis the various nation-building challenges that has made it impossible for Nigeria to emerge as a functional polity. The emphasis of the work will be to show the pragmatic steps that Nigeria can take to overcome these challenges.

How Not to Be: Motion Sans Movement

Nigeria has expended considerable energy into the project of turning itself into a viable and functional nation since independence in 1960, the different rulers have deployed various initiatives, programmes and measures to resolve what is now known as the Nigerian Question.' Largely based on the advise of politicians and scholars, the country has tinkered with its constitution and federalism; and introduced measures to promote religious and social harmony.

During the military era, the various rulers have used decrees and draconian laws to try to forge a nation out of the disparate groups living within the country. All these efforts failed because the government have approached the nation-building issue from the wrong theoretical and practical perspective. Scholars who have written the challenge of nation-building in Nigeria have also tackled the issue from a perspective that has not yielded any noticeable positive returns. John Campbell's (2011) *Nigeria: Dancing on the Brink* is an interesting work on contemporary Nigerian history. Although, essentially a work on political development in Nigeria since independence, the book analyzes some of the challenges that has made it impossible for the country to realize its full potential. The work uses Nigeria's Fourth Republic to highlights the problems of corruption, democracy and governance. Campbell concludes that the key to Nigeria's success as a nation is for it to strengthen its institutions and entrench democracy. Using the centenary celebration of Nigeria's amalgamation in 1914 as a backdrop, Chidume et al. carried out a historical analysis of the nationhood challenges that has confronted the country since 1960 (Chidume, Chukwu, Ukaegbu, & Agudiegwu, 2014). The authors identified electoral violence, ethnic nationalism, identity politics and political corruption as the greatest threats to Nigeria's emergence as a functional state. The paper argues that in order for the country to be able to move forward, its leaders must use constitutional means to correct the asymmetry in Nigeria's federalism.

Elaigwu in the *Challenges of Nation-Building in the Twenty-First Century: The Nigerian Experience* argues that the key to resolving the different nationhood challenges that Nigeria has faced since independence is the creation of a viable and equitable federal system (2004). Acutely aware of the deep-seated problems issues of religion, ethnicity and corruption have created for the country, the author proposes the use of federalism and the tools available therein to correct the country's many ills. Adetoro in his *Issues in Social Studies and Problems of Nation-building in Nigeria* takes a different approach in the analysis of nationhood in Nigeria (2000). The author identifies corruption, ethnicity and religion as major barriers to the aspiration of nationhood in Nigeria. Adetoro advocates for compulsory citizen enlightenment and participation in the political and social processes in the country.

From the foregoing, it can be seen that the reviewed works did not carry out any systemic analysis of the nation-building challenges in Nigeria. Although, one should acknowledge the fact that these is not a review of all the relevant literature of nation-building in Nigeria, the reviewed

works are broad representation of the breadth of research on the subject. None of the reviewed works made use of the theories and concepts of nation-building to interrogate and proffer possible solutions to Nigeria's nation-building challenges. It is this important lacunae that this work hopes to fill.

Theoretical

Theoretical Framework: Nation-Building

Nation-building refers to a process whereby people transfer their commitment and loyalty from smaller ethnic groups, villages or petty principalities to the larger central political system (Almond, Powell, Storm, & Dalton, 2014). The process of nation-building is the cultivation of a people of political attitudes, beliefs and values (Smith, 1971, pp.30-33). Its emphasis is on the congruity of cultural and political identities (Rokkan, 1973, p.26). Within the Nigerian context, it is the progressive acceptance by members of the polity of the legitimacy and the necessity for a central government, and the identification with the central government as the symbol of the nation (Elaigwu, 1985, p.462). This is the vertical dimension to nation-building. The horizontal dimension involves the acceptance of the other members of the civic body as equal members of a corporate nation. The term 'nation-building' came into vogue among historically oriented political scientist in the 1950s and 1960s. Its main proponents included such leaders of the American academic community such as Karl Deutsch, Charles Tilly and Richard Bendix (*Nation-building*, 2018).

Nation-building theory was primarily used to describe the processes of national integration and consolidation that led up to the establishment of the modern nation-state. This is distinct from the various form of traditional states such as feudal and dynastic states, church states and empires. The term covers conscious strategies initiated by state leaders, as well as, unplanned societal change (Friedrich, 2010, p.28). It has also been described as an indispensable tool for detecting, describing and analyzing the "macrohistorical and sociological dynamics" that have produced the modern states. Nation-building is, on the one hand, a process of socio-political development which allows loosely knitted communities to become a common society with a nation-state corresponding to it (Hippler, 2005, p.6). It also connotes the different dimensions through which diverse segment of the society is fused into a functional whole. It has

within it economic integration, cultural integration, political centralisation, bureaucratic control and democratisation, and establishment of common citizenship (Hippler, 2005, p.7).

Theories of Nation-building

Since the attainment of independence in 1960, the different Nigerian governments have tried to turn the heterogeneous and multiethnic Nigerian state into a functional and integrated polity. The process that is involved in becoming a nation is what is referred to as nation-building. The theory of nation-building will be the theoretical bedrock of this research work. Specially, Ernest Gellner's Modernisation theory and Benedict Anderson's Imagined Communities theory of nation-building are relevant to this thesis. The theories are especially suited to the processes of nation-building in a society that had experienced colonial rule like Nigeria. Besides, the theories also capture the essence of the nation-building process in Nigeria since 1960. At this point, it is important to define and explain the term 'nation'. This is because of its significance to the analysis of nation-building. Peter B. Harris asserts that a nation is usually a product of the emotions of tribal or family feeling, to which "we give our loyalty, while a state is a political and administrative body" (1986, p.277). James Danziger defines a nation as a set of people with a deeply shared fundamental identification (2015). Burgess defines a nation as a population with ethnic unity, inhabiting a territory with geographic unity (Appadorai, 2001, p.15). In a similar vein, Leacock says that a nation is a body of people united by common descent and common language. Bryce and Smith defines a nation from the political perspective. To Bryce, a nation is a nationality which has organized itself into a political body (Appadorai, 2001, p. 15). Moreover, Smith's nation is that of a single inclusive group whose members share common traditions, history, institutions and ethnic identity (Smith, 1971, pp.30-33). Gabriel Almond's definition of a nation is quite illuminating. The definition captures the essence of nation-building in a multi-ethnic and multi-cultural state like Nigeria trying to create ethno-cultural unity. According to Almond et al, a nation simply refers to "a group of people with a common identity" (2014, p.16). This common identity, according to him, could be a common language, history, race, culture or simply upon the fact that these groups had occupied the same territory.

In the course of this study, the researcher has been able to identify six theories of nation-building. They are Deutsch's Systems Theory (1966); Hechter's Internal Colonialism Theory (1985); Rokkan's Theory of Regionalism (1982); Gellner's Modernization Theory (2006);

Anderson's Imagined Communities Theory (2016); and Anthony Smith's Ethnie Theory (1991). Out of all these theories, Gellner's Modernization Theory and Anderson's Imagined Communities theory are of particular relevance to the nation-building process in Nigeria. The theories cogently capture and explain the processes of nation-building in not just a multi-cultural and multi-ethnic society but a colonized state like Nigeria.

Ernest Gellner's Modernization Theory

Gellner's modernization theory centres on the way in which the role of culture in society changed with modernization (Canovan, 1998, p.60). The theory stresses the primacy of material conditions in shaping political thought and social change (Kellas, 1998, p.41). It argues that economic reasons are responsible for the rise of nations in most industrial societies. One of these is the development of the industrial society that took place in certain parts of Europe at the end of the eighteenth century. It also occurred throughout most parts of the world during the nineteenth and twentieth centuries; and of course in Nigeria during the colonial period. The strength of Gellner's theory is in its analysis of the transition of traditional societies to industrial societies. The latter, described as 'agro-literate' societies, witnessed a strict division between the categories of those who were educated and governed, and who, by reason of their power and their literacy, had access to a great tradition; and the former, who were those who worked on the land and who bore a 'little tradition' (Gellner, 2006, pp.9-12).

In addition to the horizontal divide formed by this cultural dichotomy between the agro-literate culture and the mass culture, there were many vertical ones in rural society that were particularly strong on account of the independent way of life in peasant communities. Customs and dialects are two good examples of these. This cultural heterogeneity constituted the main obstacle to the formation of the nation, according to Ernest Gellner. The emergence of the industrial society goes on to promote cultural homogenization at the end of a long process inherent in the economic logic of this society: based on an evolutionary technology and idea of progress. It involves a permanent growth of productivity; this results for the working population the necessity for extreme professional mobility, and a versatility which implies a solid genetic training (Gellner, 2006). For this industrial society to sustain itself, it will necessarily require two basic innovations. The first is literacy on a large scale among its population. And, the second is a high level of technical competence. This can only be provided, it should be noted, by something

resembling a modern ‘national’ educational system; a pyramid at whose base there are primary schools, staffed by teachers, led by the product of advanced graduates schools (Gellner, 2006, p.35).

Such a pyramid provides the criterion for the minimum size for a viable political unit. The process of national construction thereafter progresses in accordance with the rate of the entry into the educational system of populations living more and more in outlying areas. It is then impressed on them that learning the dominant languages and possessing a basic education are the prerequisites to their social ascent and their ability to defend their rights vis-à-vis the administration of the nation-state in the making. Beyond this, education confers a moral equilibrium by putting the people in step with the values of the society of which they are de facto members as the limits of the culture within which they were educated are also those of the world within which they can morally and professionally breathe. The education that is necessary to produce modern employees must be conducted in one or another official language, according to Gellner. This, for example, was English Language for colonial and post colonial Nigeria (Canovan, 1998, p.60). Besides, the emergence of a nation involves the destruction of most of the myriad traditional folk cultures as they are absorbed into a new version suitable to be the official culture of a state (Gellner, 2006, p.49). This breakdown is important because it will allow for the emergence of a centralized authority which is necessary for the development of a nation. It will provide a strong state structure from which a viable and cohesive nation could be shaped. Control by a central political authority will sweep away many local cultures or ethnicities and replace them with one large nation. In this way nation-states will emerge (Kellas, 1998, p.43).

Gellner’s theory cogently captures and explains the nation-building process in Nigeria. Nigeria at one point or the other has gone through the phases of this theory in her nation-building process. The urge for nation-building came with the advent of colonial rule in the nineteenth century. This drive was given a fillip with the amalgamation of 1914 and received concrete expression with the active participation of the early Nigerian nationalists in the Lagos legislative election of 1923. Colonial rule turned the economy of the different ethnic units living in the River Niger and River Benue area from that of an agrarian and feudal state to a modern industrial economy. With the introduction of the legitimate commerce and commodities, such as cocoa and palm oil introduced by the British, the focus of the economy shifted from its intra-ethnic character, to inter-ethnic and finally to trading relationships that traverse regions. Moreover, it

was colonial rule, with the attendant integration of Nigeria's economy into the world economy, which engendered the feeling of nascent nationalism among Nigerians. It gave Nigeria a single official language, the English language. The same colonial rule introduced Nigerians to the benefit of formal and structured education. It also awoke within the Nigerian psyche that feeling of 'belonging' and tied to a particular geographical environment. The feeling that colonialism stirred later transformed itself into nationalism in 1953 with the subsequent motion by that foremost Nigerian nationalist, Chief Anthony Enahoro, for the independence of Nigeria in 1957. This feeling morphed from self-identification to self-determination and eventually culminated in independence.

By the time of independence in 1960, the Nigerian economy had already been integrated into the world economy. Her agrarian and labour-intensive economy was being gradually replaced by a modern industrial base. Political authority from the centre nominally controls the economy, education and there is a law code that governs the country. The powers of the regional 'sovereigns' have been subsumed within the larger Nigerian state. Nigeria introduced such 'unifying' programmes like Universal Basic Education (UBE), federal character principle and National Youth Service Corps (NYSC) to create a cohesive and functional polity. Hence, all these point to the fact that a critical understanding of the nation-building process in Nigeria between 1967 and 2007 will be incomplete without Gellner's Modernization Theory of nation-building.

Anderson's Imagined Communities Theory

In his theory, Anderson gave some set of conditions that are necessary to any nation-building process. The first is what he calls "print capitalism" (Kellas, 1998, p.43). This means commercial printing on a large scale. Print capitalism is the medium through which the idea of the nation and the ideology of nationalism are propagated. The assumption is that print capitalism will strengthen the publishing of dictionaries, vernacular languages and indigenous literature. Printing standardizes languages and aids the development of capitalism. A sense of nationality flows from the common language and education which printing facilitates (Kellas, 1998, p.45). This first condition was true for Nigeria. Colonial rule gave Nigeria her print capitalism in 1847 at Calabar (Nwagbara, 2010, p.13). From this period onward, indigenous efforts were then made to publish and translate books into the vernacular. Reverend Samuel Ajayi

Crowther translated the Holy Bible into Yoruba and revised his Yoruba Grammar and Vocabulary in 1852 (Akinwunmi, 2002). During the heyday of colonial rule, Nnamdi Azikiwe and Herbert Macauley, both frontline nationalists, established indigenous newspapers in the 1930s to trumpet Nigeria's nationalist aspirations (Nwagbara, 2010, p.13).

The second precondition for a successful nation-building endeavour is what Anderson has termed "modernisation". This point has been adequately covered under Gellner's Modernisation theory of nation-building. There is a convergence in both Gellner's and Anderson's theories on the role of modernisation in the nation-building process. And as such, this need not delay one here. The final condition necessary to the nation-building process is what Anderson has called the "notion of pilgrimages" (Kellas, 1998, p.45). Pilgrimages are essentially the pattern of social communication and "life chances" of different people. This may be a matter of sharing a common language, or of being the object of differential treatment by the state. It is this pilgrimages which define the boundaries of the nation, and lead people to identify with it and not with another social or political entity. Such pilgrimages may thus be taken to be the sufficient condition for particular nations to be "imagined" (*Nation-building*, 2018). This particular point was obtainable, it must be remarked, in the multinational empires of Europe, and in the European colonies in Asia, America And Africa. The imperial system, in these areas, confined the life chances or pilgrimages of natives to the colonies. Eventually, these natives saw themselves as members of a nation in rebellion against the imperial country. This phase of the nation-building process in Nigeria has been captured by James Coleman in his *Nigeria: Background to Nationalism* (1986). It should be pointed out here that Anderson's theory captures the beginning of the nation-building process in Nigeria. It vividly explains the significance of such things as print capitalism and indigenous newspapers to the nation-building process in colonial and post-colonial Nigeria.

Why it Could Not Be: Nigeria and its Challenges

Nigeria has found it difficult to become a viable and functional nation since independence in 1960. A lot of factors have been responsible for this. This section analyzes some of the major factors responsible for Nigeria's inability to create a cohesive state. These challenges are those of federalism, distribution, democracy, governance, aggressive ethno-regionalism, religion, corruption, ideology and distribution.

Challenge of Federalism

Nigeria is a country of extraordinary diversity and complexity. This complexity is as a result of its ethno-cultural heterogeneity. The amalgamation of 1914 and the Richards constitution of 1946 integrated these diverse political units into three regions. It was this complexity that informed the desire to look for a political system that can accommodate the divergences. This desire eventually found expression in the adoption of the federal system of government. This suggests that federalism was adopted in Nigeria because it was seen as a diversity management technique (Muhammad, 2007, p.188). Federalism in the classical sense, as represented by K.C. Wheare and A.V. Dicey is defined in terms of constitutional law as a system in which powers are divided between the central and regional authorities (Janda, Berry, Goldman, Schildkraut, Manna, 2018, p.113). Each authority govern directly and independently within its own defined sphere and cannot modify the division of power unilaterally. However, in its modern sense, federalism is seen as a mechanism for the identification of the social and economic forces and factors which contribute to integration in a variety of ways (Olling & Westmacott, 1988, p.3).

Nigeria's federalism has been a mixture of the two. And herein lies the crux of the matter. The challenge has been either for a 'military' or 'central' federalism with a strong and powerful centre, or for a loose federalism with a strong and powerful periphery. These two traits were noticeable throughout the period. Nigeria's adoption of the federal system dates back to the 1954 Lyttleton Constitution. Since, then, the federal system has been a leitmotiv in Nigeria's constitutional developments. Nigeria sees federalism as a form of governmental arrangement. The state's sees it as a mechanism to promote unity while at the same time preserving existing diversities within an overarching desire for national unity (Muhammad, 2007, p.190). To this extent, the relationship between federalism and political stability is axiomatic. The restiveness of the ethnic minorities in the Niger Delta during the Fourth Republic is another good example. State creation, which is an integral part of Nigeria's federalism, rather than being a tool that provides a sense of security for ethnic minorities, also became a debilitating factor in the country's federalism (Odojin, 2005, pp.14-15). For example, Gowon created twelve states in 1967, Murtala/Obasanjo increased the number to nineteen states in 1976, and Abacha created six in 1996 to make it thirty-six. In this process of state creation, the federation was 'skewed' into smaller units and thus, the autonomy of the constituent units was lost and power gravitated to the

center. The military virtually turned the federal state into unitary one as the other levels could no longer exercise or share power with the central government (Elaigwu, 2012, pp.257-258). This trend was carried over into the Fourth Republic and engendered calls from various groups for a Sovereign National Conference (SNC), a conference of ethnic nationalities; national conference, devolution of powers and restructuring of the Federation. Thus, the challenge is for Nigeria to evolve a 'true federalism' that will take into consideration the aspirations of the different ethnic groups and that will at the same time preserve, in a functional way, the country's federal structure.

The Challenge of Distribution

This challenge has to do with the issue of fiscal federalism. Fiscal federalism can be viewed as a set of fiscal activities, relations and interactions among the various governments in a federation (Olowonini, 1999, p.192). It is a general normative framework for assignment of functions to the different levels of government and appropriate fiscal instruments for carrying out these function (Oates, 1999, pp.120-149). Fiscal federalism essentially has to do with the equitable distribution of the resources in a federal polity to all the federating units. It covers two interconnected areas. The first is the division of competence in decision making about public expenditures and public revenue between the different levels of government. The second is the degree of freedom of decision-making enjoyed by regional and local authorities in the assessment of local taxes as well as in the determination of their expenditures (Kesner-Skreb, 2009, pp.235-237). Fiscal federalism is a dominant and contentious theme in the nation-building efforts of the state. It has crystallized and remained dynamic because of the country's multiplicity in terms of ethnic composition and pluralism (Arowolo, 2011, p.3). It dates back to 1946 when the Richards Constitution was introduced into Nigeria (Odoko & Nnanna, 2011).

Fiscal commissions were then set up by the state to work out fiscal and financial arrangements that were consistent with the assignment of powers and responsibilities to each level of government. The idea was that each level of government should have adequate funds to effectively and efficiently discharge its responsibilities. However, this is in theory. In Nigeria, this has not always been the case. The centralized hierarchical nature of the military regimes that ruled Nigeria between 1969-1979 and 1983-1999; and the overly centralized nature of the successive civilian administrations placed the state at an advantage when it comes to resources

distribution within the federation. Invariably, the financial hegemony enjoyed by the federal government over the thirty six states and seven hundred and seventy four local government created disaffection in Nigeria federalism (Arowolo, 2011, p.3). It reinforces the structural vulnerability of the components units while simultaneously intensifying the pressures for better federal economic patronage. Thus, for Nigeria, the challenge is how to evolve a fiscal formula that will ensure that the resources were discharged equitably. The failure of the state to get this right has been the factor responsible for changes in the fiscal regimes of the country between 1967 and 2017 that has negatively affected the nation-building process. The state evolved different innovations in trying to tackle this challenge. This, for example, was the rationale behind the formation of the Dina Committee by the Gowon's administration in 1968 (Oyovbaire, 1978, pp.238-239); Danjuma commission in 1987 by the General Babangida's regime (Arowolo, 2011, pp.9-10); and the Obasanjo's administration, 1999-2007, created the Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission (RMAFC) in 1999 to tackle the same challenge (Arowolo, 2011, p.11).

The inability of the state to resolve this challenge is the factor responsible for strident calls for 'derivation formula' and 'resource control' in the country.

Challenge of Democracy

In Nigeria, as well as in Africa, Larry Diamond has observed that democracy and governance are in a state of transition and suspension (2008, pp.138-149). Democracy is adjudged to be the most civilized form of governance. Minimal definition of democracy sees it as a system of government in which the leaders are elected in periodic, free and fair elections. Nigeria is best classified as a competitive authoritarian or a pseudo-democracy because there are some areas of contestation (The Economist, 2002). Areas of contestation are electoral, media, judicial and legislature. There are three major areas in democratization. These are democratic transition, democratic consolidation and democratic quality (Ajetumobi, 2010, p.3). Nigeria has not progressed beyond the democratic transition phase. The Second Republic, that was supposed to be Nigeria's second attempt at democratic rule, was cut short by the military in 1983. The third democratic experiment was short lived in 1993 due to the military coup d' etat of General Sani Abacha. In the same vein, the fourth democratic experiment is yet to deliver on the dividends of democracy. Widespread electoral fraud characterized the 2003, 2007 and 2015 elections in the

country; rule of law was flagrantly and blatantly abused; lives and property could not be guaranteed as evidenced by the growth of ethnic militias and terrorists such as the OPC in the southwest, MEND in the south-south and Boko Haram in the northeast. Added to this is the fact that there was no real democratic culture prior to the dawn of the Fourth Republic. The country's long exposure to military rule has created that situation in which "seventy percent of eligible voters in Nigeria are citizens born during the praetorian order" (Saliu & Lipede, 2008, p.134). This meant in essence that the condition for democratization had a short gestation period. And thus, the statement of Larry Diamond could be seen to have been validated. Hence, the challenge of for the country is how to inculcate a culture that values the precepts of democracy and its values.

Challenge of Governance

Governance has been conceptualized as the conscious management of regime structures with a view to enhancing the legitimacy of the public realm (Hyden & Brathon, 1991). It is the process of organizing and managing legitimate power structures entrusted by the people to the ruling elites (Galadima, 1998, pp.116-117). A good governance system is defined by its relationship to some key perquisites: accountability, transparency, participation and predictability. The military regimes that ruled Nigeria were highly unpredictable. The unpredictability not only stemmed from the constant threat of coup d'état, but also from the nature of the military itself. A good example was the coup of August 1985 that removed the Buhari/Idiagbon regime. This factor does not allow for continuity in governance. Citizen participation was a scarce commodity during the Sani Abacha's regime from 1993 to 1998. Indeed, of course, during the Obasanjo and Buhari administrations in the Fourth Republic, issues of accountability, transparency and the rule of law were constantly relegated to the background.

Challenge of Aggressive Ethno-Regionalism

Nigeria is an amalgam of rival ethnic groups pitted against each other in a contest for power and resources. This contest is reflected in the political process in the country (Meturama, 2010, p.92). The return of Nigeria to democracy in 1999 opened up a Pandora's box of suppressed ethnic demands bottled up by years of repressive military rule. These demands sometimes took violent forms as could be seen in the activities of MEND in the Niger Delta,

Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB) in the East and the OPC in the west and lately, Fulani cattle herders and the people in the Middle Belt. Nigeria has over 250 ethnic groups and they can be broadly divided into ethnic majorities and ethnic minorities. The ethnic majorities are the Hausa-Fulani of the north, the Yoruba of the southwest and the Igbo of the southeast. These major ethnic groups has within them substantial ‘minorities’ of different ethnicities. There are large minorities like the Ijaw, Kanuri, Edo, Ibibio and Nupe. The Nigerian state had struggled with the multiplicity of nations within it for the loyalty and allegiance of the citizens (Nkolika, 2007, p.1). At each point of this struggle, she has always lost to the primordial instincts of the groups that composed it. The country’s heterogeneity and the state’s inability to effectively manage the diverse interest of the different groups was a major barrier to nation-building since 1960.

Nigeria experienced both intra and inter-ethnic conflicts. Different factors were responsible for these ethnic tensions. Some of the major ones are: the land-space resources question; the disputed jurisdiction of traditional rulers and chiefs; the creation of local government councils and the locations of their headquarters; the imperatives of culture bound occupations; settlers-indigene syndrome and the micro and macro structures in Nigeria (Akpomuvie & Forae, 2005, pp.144-146). Each and every of these diverse factors had played out in the outbreak of ethnic conflicts in Nigeria between 1960 and 2017. For example, Ife-Modakeke crisis of 1981, 1983 and 1997 is a good example of a conflict whose source is rooted in settler-indigene syndrome and the creation of local government council and its headquarters. That of the Jos crisis that was particularly virulent during the Fourth Republic was as a result of the settlers-indigene syndrome, culture-bound occupations and land-space resources question. The same can be said for the violent frictions between the fulanis and the people living in the Middle Belt. Additionally, scholars have identified seven ethnic and political cleavages in Nigeria: between the north and the south; between the three majority ethnic groups; between the major ethnic groups and the minorities; inter-state rivalry between states, which sometimes cuts across ethnic groups; inter-ethnic rivalry in a mixed state; inter-clan and intra-clan rivalries; and intra-ethnic rivalry within each majority ethnic group. Thus, the challenge of ethnic-nationalism that faces Nigeria is how to accommodate the differing interests of the different groups and channel the energies of the various groups into creating a cohesive, functional and stable political entity.

Challenge of Religion

Ethno-religious conflict is a form of conflict that is generated on the basis of real or imagined difference rooted in ethnic and religious identities (Egwu, 2011, p.49). It derives from the congruence and the mutually reinforcing relationships between ethnic and religious identities in the social and political process. Religious identity sometimes becomes part of the ethnic groups' identity and presents a volatile social mixture (Salomone, 1991). This hybridization of the two identities has been the norm rather than the exception in Nigeria. And this is the crux of the religious challenge. Religious identities in Nigeria are usually classified into three: Christian, Muslim and Traditional (Osaghae & Suberu, 2005, p.11). Religion is meant to support the social norms; meant to reassure the people that their ways are right and their cause is just. In Nigeria, however, religion became an impediment to the attainment of a cohesive, functional and democratic polity. The Nigerian experience, as regards religious tensions and crisis since independence can be broadly divided into three: intra-religious disturbances between different denominations or sects; inter-religious conflicts between adherents of different religious beliefs capable of assuming socio-ethnic dimensions; and inter-religious conflicts which has socio-economic origin but ends up as religious conflicts (Ikengah-Metuh, 1994).

The Nigerian socio-political terrain is replete with these three types of religious conflicts. A good example is the Maitatsine uprising during the Second Republic that claimed hundreds of lives in Kano, in 1980; and in Borno state in 1982. Moreover, the issue of the adoption of the Sharia in some states in the north also generated serious socio-religious tensions across the federation. In 1999, the governor of Zamfara state proclaimed and launched Sharia in the state. This action generated serious controversy in the Fourth Republic. Not only did it brought to the fore the question of Nigeria's secularity, it also created a constitutional controversy. Thus, the challenge of religion has been the inability of the state to devise appropriate mechanisms that can turn religious zeal into an important tool of nation-building in Nigeria.

Challenge of Corruption

Corruption is a multi-dimensional phenomenon. It has been variously described to be: a behaviour that deviates from the formal duties of a public role for private gains (Nye, 1967); the abuse of public roles or resources for private benefit (Bello-Imam, 2005); the pervasion of integrity or state of affairs through bribery, favour or moral depravity (Otite, 1986); and

according to Transparency International (TI), a behaviour on the part of officials in the public sector through which they improperly or unlawfully enrich themselves (Igbuzor, 2008, p.6). Based on the above definitions corruption ranges from the acceptance of money or other rewards for awarding contracts, violations of procedures to advance personal interest, the diversion of public resources, overlooking illegal and unconstitutional activities, to intervening in the justice process, nepotism, influence peddling and misappropriation. All the listed formats or facets of corruption are manifestly present in Nigeria. The failure of Nigeria to effectively manage and tackle the different manifestations of corruption impeded the country's nation-building efforts. Between 1966 and 1975, during Gowon's military leadership, corruption was a serious issue (Audu, p.212). Indeed, part of the reason for the coup that ousted Gowon in 1975 was the endemic corruption in his administration. Alhaji Shehu Shagari's administration witnessed in 1980 an unprecedented level of corruption. There were about eighty-seven point five percent of undetected incidents of corruption in the administration (Ifamose, 2004).

Interestingly, in spite of the anti-corruption stance of the Obasanjo administration during the Fourth Republic, 1999-2007, and that administration's creation of the ICPC and EFCC to battle corruption, the corruption genie could not be contained. Political corruption festered during the Fourth Republic under successive administrations. It took on a life of its own during the Goodluck Jonathan administration between 2010 to 2015. For example, the former Inspector General of Police, Tafa Balogun was indicted for corrupt practices; and Adolphus Wabara, the fourth senate president in the Fourth Republic was also disgraced out of office because of official corruption. Thus, the state's inability to adequately tackle the challenge of corruption, in all its various affected negatively the nation-building efforts of the state.

Challenge of Ideology

David Apter defined ideology as a system of political and social belief that embodies values and ideals about man, society and the state (Michael, 2006, p.55). Anson Morse has argued that it is the durable convictions held in common by party members in respect to the most desirable form of action of the state towards every public question. It has also been taken to be the single issue statements that defines orientation of a political party (Strickler, 1996, p.1025). Looking at ideology from this non-doctrinaire perspective, it could then be seen that it is existentially lacking in Nigeria's socio-political milieu. For example, the state had no coherent

ideology in the Second Republic. When Buhari's regime took over from Shagari, the state had no coherent and systemic ideology. Actually, Buhari mistook its operational premise of wiping-out corruption for a state's ideology (Michael, 2006, p.63). Since WAI could not cope with the basic contradictions in the social order, it left the citizenry dislocated and marginalized from the state. The country is not faring any better in the Fourth Republic, as per ideology. Omoruyi has asserted that political parties in the Fourth Republic, especially Obasanjo's PDP, were all ideologically barren (Shola, 2009, pp.612-634). The state had no coherent policy towards governance. This paucity of ideology has translated to poverty of ideas on meaningful governance. Thus, the challenge of ideology is an important factor that has affected nation-building efforts in the country. Since the central government is bereft of coherent ideology, it could not evolve strategies that could have contributed to the building of a cohesive, viable and functional Nigeria. This created a communication disjoint between the rulers and the ruled.

Challenge of Autarky

Autarky here refers to economic self-sufficiency. It is the ability of a state to provide those resources necessary for the sustenance of both the economy of the state and the citizenry. Nigeria has not been able to adequately tackle this challenge. Some of the factors responsible for these are: mono-cultural nature of the Nigerian economy, discontinuity in economic policies, rentiersm, infrastructural decay, administrative bottlenecks, opaque tax regime, technological incapability, lack of innovation and market challenges (Dike, 2010, pp.96-104). Collectively these factors constitute the challenge of autarky. Mono-commoditism is a recurring theme on the Nigerian economic landscape. The Nigerian economy is highly dependent on oil earnings. There is no diversification of the economy. As a result of this, the economy is susceptible to the vagaries of the international economic system. This was brought home in stark detail to Nigeria during the oil glut of the 1980's (Oritsejafor, 2000). During the Fourth Republic, government's economic policies vacillated with the twin pull of the international economic system and the insurgency in the Niger Delta. Furthermore, economic policy discontinuity negatively affected the nation-building efforts of the state. When Abacha became the military ruler of Nigeria in 1993, he ended Babangida's SAP without putting any major economic policy in its place. During the Fourth Republic, Obasanjo made a clean break with the economic policies of his military predecessors and introduced such economic measures as

SEEDS, NEEDS and LEEDS. Thus, the state's inability to proactively tackle the challenge of self-sufficiency made it impossible for her to create a functional and viable Nigeria.

How to Be: Recommendation.

In order for Nigeria to become a functional, viable and cohesive policy, the following recommendations will have to be implemented:

1. The theories of Ernest Geller and Anthony Anderson must be integrated into the nation-building process. The two theories, Gellner's Modernization theory and Anderson's Imagined Community theory essentially stress the same important prerequisites for any state trying to carry out a successful nation-building process. The theories emphasize the significance of education, printing press and technological innovation to the nation-building process. The theories have shown that for any society to carry out a successful nation-building process, education is a key factor. Education serves a dual function. The first function is that it allows the society to 'reproduce' or re-engineer itself. This reproduction is done through the technological innovations and revolutions that education facilitates. The second function that education serves is that it makes it possible and easier for the state to inculcate the idea of 'oneness' and 'indivisibility' of the nation into the citizenry right from childhood. Education makes it easier for the citizenry to be susceptible to the ideology of the state and this makes the process of integration in a heterogeneous society a lot easier. One can even say that education is the important plank that the other nation-building requirements stand. Print capitalism requires a literate majority. Likewise, technological innovations. For both of these factors to be successful, education is a *sine-qua-non*. Thus, Nigeria must devote considerable resources to the mass education of the citizenry. The UPE and UBE educational initiatives are laudable programmes. However, the vacillation and discontinuity in the state's educational policy make it impossible for the initiatives to realize their potentials. Since nation-building is a continuous process, the education that is required to achieve this for Nigeria must also be made to be continuous.
2. Federalism as is it practiced in the country will have to be rejiggered to reflect Nigeria's particularity. Nigeria's federal structure is highly flawed. Federalism is meant, in principle, to adjudicate and regulate the interactions that take place in a multi-ethnic and multi-cultural

society. The basis of this is to ensure that conflict and hostility are relegated to the barest minimum in such heterogeneous society. In Nigeria, this is not the case. Nigeria's federalism has taken different dimensions. Under Shehu Shagari, 1979-1983, Nigeria's federal structure assumed the garb of con-federalism. This led to a conflictual relationship between the centre and the states in the federation. During the Obasanjo administration, 1999-2007, Nigeria's federalism became overtly centralized and is even more concentrated in Buhari's administration. The power of the federal government far outstripped those of all the states put together. This situation creates tension and lead to unhealthy competition for resources accruing to the centre. The structural imbalances that has been highlighted were the main features of Nigeria's federal structure between 1960 and 2017. Thus, for Nigeria to carry-out a successful nation-building process, the state must correct the anomaly in the country's federal structure. Based on Nigeria's historical antecedent and the country's multi-ethnic and multi-cultural structure, federalism is still the best political structure for the country. However, the federalism that is advocated here is not going to be based on the classic K.C. Wheare's federalism but a variant. This variant form connotes cooperation, collaboration, competition and interdependence by all the federating units. Karl Deutsch, William Livingstone and Carl Frederick are the major proponents of this alternative federal structure. This modern federalism will use socio-political dynamics of the Nigerian society to create a federal structure that will meet the aspirations of the different ethnic groups within the country. This is where the idea of a SNC will become relevant. The SNC will create an informal avenue for the ventilation and distillation of critical issues affecting the Nigerian state. Through the dialogue and discourse of its proceeding, it will then become easier for the state to have a clearer picture of the kind of federal structure that will be best suited to Nigeria.

3. The civil society groups (GSGs) must be recognized by the state as an important adjunct in the country's nation-building process. The CSGs played critical roles in Nigeria's democratic process between 1985 and 1999. Now that Nigeria is a democratic state, the CSGs must actively engage in strengthening the institutional democratic structures in the country. The CSGs must ensure that institutions are not 'personalized' and 'individualized'. The Chief Olusegun Obasanjo administration, for example, personalized or individualized some of the

important institutions it established to tackle the country's nation-building challenges. The corruption-fighting organization, EFCC is a good example. The Muhammadu Buhari administration has also personalized governance in the country. Moreover, CSGs must ensure that concepts such as democracy, transparency, accountability, due process and rule of law are key planks of its complementary efforts in the nation-building process. The CSGs must further act as the watchdog of the society and ensure that the state's nation-building programs are well articulated and implemented.

4. Finally, a solid, sound, ideological and philosophical bedrock must be established for Nigeria's nation-building process. The significance of ideology in the nation-building process cannot be overemphasized. Ideology is the important missing link in Nigeria's nation-building process. Indeed, in this researcher's analysis of the concept of nation-building, ideology is identified as one of the key elements of nation-building. The provision of ideology will serve two critical functions in Nigeria's nation-building process. The first one is that at the societal level, ideology will bring the people in steps with the country's ideals. If properly utilized, it will create feelings of patriotism, loyalty and nationalism in the people for the nation. This, for instance, is the function the Nigerian national anthem and pledge are meant to serve. At the political level, ideology will make it easier for the citizen to collaborate with the political elites in advancing the state's nation-building programs. This is why the provision of a sound ideology must be made an integral part of political parties' manifestoes in Nigeria. From the ideologies of the different political parties, the state can then distill a national ideology for Nigeria. This point is important. The national ideology must not be imposed from the top if it is to be generally acceptable. It must be culled from the shared consciousness and aspirations of the different Nigerian ethnic groups.

Conclusion

Nationhood is what every multi-ethnic and multi-cultural states aspire for in the 21st century and Nigeria is no exception. The concept of nationhood in the 21st century connotes integration, cohesion, viability and functionality. This is the concepts of nationhood that Nigeria has aspired for since independence. This is the 'to be.' This is what Nigeria has been trying and failed to achieve since 1960. Nigeria failed, not for the lack of trying, but for going about it the

wrong way. This is the ‘how not to be.’ Multi-ethnic and multi-cultural states like Russia, China and France have successfully navigated the challenges of nation-building. They did so by following clearly stated objectives, plans and programmes. Nigeria will have to borrow from the experiences of such states in order to be able to turn the country into a viable, functional and cohesive polity.

References

- Adetoro, A.R. (2000). Issues in social studies and problems of nation-building in Nigeria. Lagos: Goad Educational Publishers.
- Akinwunmi, E.O. (2002). Crowther Samuel Ajayi, 1810 to 1891. *Dictionary of African and Christian Bibliography*. Accessed on December 2, 2018 from www.dacb.org/stories/nigeria/crowther4_samajayi.html
- Akpomuvie, O.B., & Forae, F.O. (2005). Ethnic communal conflicts in Nigeria. *Nigerian Journal of Political Science*, 10(1&2), January-December, 144-146
- Almond, G.A., Powell, B.G., Storm, K., & Dalton, R.J. (2014). *Comparative politics today*, 11th ed. New York: Pearson.
- Anderson, B. (2016). *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*, Rev. ed. London: Verso.
- Appadorai, A. (2001). *The substance of politics* (Rev. ed.). India: Oxford University Press.
- Arowolo, D. (2011). Fiscal federalism in Nigeria: Theory and dimension. *Afro Asian Journal of Social Sciences*, 2(22), 3
- Audu, M.S. (2008). Emerging issues in the culture of corruption in Nigeria: Implications for national development. Saliu, H.A., Jimoh, H.I., Yusuf, N., & E.O. Ofo, *Perspectives on nation-building and development*. Lagos: Concept Publications Limited.
- Bello-Imam, I.B. (2005). *The war against corruption in Nigeria: Problems and prospects*. Ibadan: College Press and publisher Limited, 2005.
- Chidume, C.G., Chukwu, G.A., Ukaegbu, N.M., & Agudiegwu, M.O. (2014). Centenary celebration of Nigeria and challenges of nation-building. *European Journal of Research and Reflection in Arts and Humanities*, 2(2). Accessed on July 18, 2018 from <https://www.idpublications.org/wp-content/uploads/2014/08/CENTENARY-CELEBRATION-OF-NIGERIA-AND-CHALLENGES-OF-NATION-BUILDING.pdf>.
- Campbell, J. (2011). *Nigeria: dancing on the brink*. New York: Rowman & Little Publishers, Inc.
- Canovan, M. (1998.) *Nationhood and political theory*. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
- Coleman, J.S. (1986). *Nigeria: background to nationalism*. Benin City: Broburg & Winstrom.
- Danziger, J.N & Smith, C.A. (2015). *Understanding the political world: a comparative introduction to political science*, 12th ed. Pearson: Longman.

- Deutsch, K.W. (1966). *Nationalism and social communication: an inquiry into the foundation of nationality*, 2nd ed. Massachusetts: MIT Press.
- Diamond, L. (2008). The rule of law versus the big man. *Journal of Democracy*, 19(2), 138-149. Accessed on April 10, 2018 from <https://muse.jhu.edu/article/235509>
- Dike, V.E. (2010). Review of the challenges facing the Nigerian economy: Is national development possible without technological capability? *Journal of Sustainable Development in Africa*, 12(5), 96-104
- Egwu, S. (2011). Ethno-religious conflicts and national security in Nigeria: Illusions from the Middle Belt. S. Adejumobi (Ed.), *State, economy and society in post-military Nigeria*. New York; Palgrave Macmillan.
- Elaigwu, J.I. (2012). *Nigeria: Essays in governance and society*. Jos: Adonis & Abbey Publishers Limited.
- Elaigwu, J.I. (2004). *The challenges of nation-building in the twenty-first century: the Nigerian experience*. Calabar: University of Calabar.
- Elaigwu, J.I. (1985). Nationbuilding and political development in Nigeria: The challenge of unity in a heterogeneous society. Atanda, J. A. & A.Y. Aliyu, *Proceedings of the national conference on Nigeria since independence*, Vol. I. Zaira: Gaskiya Corporation Limited.
- Falode, A. (2011). The Nigerian civil war, 1967-1970: a revolution?. *African Journal of Political Science and International Relations (AJPSIR)*, 5(3), 120-124. Accessed on February 15, 2018 from www.academicjournals.org/journal/AJPSIR/article-abstract/E70BD3B40546
- Friedrich, C.J. (2010). Nation-building. Deutsch, K., & W. Foltz, *Nationbuilding in comparative contexts*. London: Aldine Transaction
- Galadima, H. S. (1998). Militarism and governance in Nigeria. *Governance: A journal of the institute of governance and social research*, 1(1), 116-117
- Gellner, E. 2006. *Nations and nationalism*, 2nd ed. New York: Cornell University Press
- Hechter, M. (1985). Internal colonialism revisited. Tiryakian, E.A. & R. Rogowski, *New nationalisms of the developed west*, London: Allen and Unwin.
- Igbuzor, O. (2008). Strategies for winning the anti-corruption war in Nigeria. *ActionAid Nigeria Briefing*, 2, 6. Accessed on September 10, 2018 from http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/winning_anti-corruption_war_in_nigeria1.pdf

- Harris, P.B. 1986. *Foundation of political science*. London: Harper Collins Publishers Ltd.
- Hippler, J. 2005. *Nation-building: a key concept for peaceful conflict transformation*. London: Pluto Press, 2005
- Hyden, G. & Brathorn, M. (1991). *Governance and politics in Africa*. London: Lynne Rienne Publishers
- Ifamose, F.O. (2004). Governance in a persuaded society: A critique of the anti-corruption of the 4th republic. *Journal of the Historical Society of Nigeria (JHSN)*, 1(1), 82-93
- Janda, K., Berry, M. J., Goldman, J., Schildkraut, D. J., & Manna, P. (2018). *The challenge of democracy: American government in global politics 14th ed.* Boston: Cengage Learning.
- Kellas, J.G. (1998). *The politics of nationalism and ethnicity*, 2nd ed. London: Macmillan.
- Kesner-Skreb, M. (2009). Fiscal federalism: Financial theory and practice. *Quarterly Journal of Economics*, 33(2), 235-237. Accessed on March 12, 2018 from <http://www.fintp.hr/upload/files/ftp/2009/2/skreb.pdf>
- Michael, B. (2006). Philosophical and ideological perspectives on the problem of development in Nigeria in the 21st century. *Journal of Social and Contemporary Issues (JSCI)*, 2(1&1), 55
- Meturama, D.M. (2010). Democracy and the challenge of ethno-nationalism in Nigeria's fourth republic: Interrogating institutional mechanism. *Journal of Peace, Conflict and Development*, 15. Accessed on January 19, 2018 from http://eprints.covenantuniversity.edu.ng/10269/1/Democracy_and_the_Challenge_.pdf
- Muhammad, A. R. A. 2007. Federalism and political stability in Nigeria: current peril and future hopes. *Journal of Sustainable Development in Africa*, 9(4), 188.
- Nation-building and social integration theory, chapter 2, 1. Accessed January 14, 2018 from <http://folk.uio.no/palk/ch02.htm>
- Nwagbara, U. (2010). The Nigerian press, the public sphere and sustainable development: engaging the post amnesty deal in the Niger Delta. *Journal of Sustainable Development in Africa*, 12(3), 13. Accessed on March 10, 2018 from http://www.academia.edu/1478816/The_Nigerian_press_the_public_sphere_and_sustainable_development_Engaging_the_post_amnesty_deal_in_the_Niger_delta
- Nye, J.S. (1967). Corruption and political development: A cost-benefit analysis. *American Political Science Review*, 61(2). Accessed on June 12, 2018 from <https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/corruption-and-political-development-a-cost-benefit-analysis/D5E8F481DE22E6F77FCCB924D502BB9F>

- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *America: Journal of Economic Literature*, 37(3), 120-149. Accessed on February 17, 2018 from <http://econweb.umd.edu/~oates/research../FiscalFederalism.pdf>
- Odofin, A.P. (2005). Federalism and governance in Nigeria: The crisis of transformation and the challenges of nation-building. *Nigerian Journal of Political Science*, 10(1&2), 14-15.
- Odoko, O.F. & Nnanna, O.J. n. a. Fiscal federalism: Fiscal discipline and service delivery in Nigeria. Accessed on May 15, 2018 from <http://www.case.ox.ac.uk/books/epopnlfiscalfederalism.pdf>,
- Olling, R.D. & Westmacott, W. (1988). *Perspectives on Canadian federalism*. Canada: Prentice Hall, 1988
- Olowonini, G. D. (1999). Federalism and vertical intergovernmental financial imbalance in Nigeria. B. Aigbokhan, *Fiscal federalism and Nigeria's economic development*. Ibadan: Secre Publishing
- Oritsejafor, O.E. (2000). Development in Nigeria: A political and economic challenge. Accessed on March 14, 2018 from <http://www.jsd-africa.com/Jsda/fallwinter2000/articlespdf/ARC-Development%20in%20Nigeria.pdf>
- Osaghae, E.E. & Suberu, T.R. (2005). A history of identities, violence and stability in Nigeria. *Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE)*, CRISE Working Paper, 6, 11. Accessed on August 12, 2018 from https://www.researchgate.net/publication/228354552_A_History_of_Identities_Violence_and_Stability_in_Nigeria
- Otite, O. (1986). Sociological study of corruption. F. Odekunle, *Nigeria: Corruption in development*. Ibadan: Ibadan University Press.
- Oyovbaire, E. (1978). The politics of revenue allocation. K. Panther-Brick, *Soldiers and oil, The political transformation of Nigeria*. England: Frank Cass
- Rokkan, S. (1973). Center formation, nation-building and cultural diversity: report on a UNESCO programme. Eisenstadt, S. N. & S. Rokkan, *Building States and Nations: Vol. I & II*. Beverly Hills: Lage.
- Rokkan S. & Urwin, D.W. (1982). *The politics of territorial identity: studies in European regionalism*. London: Sage
- Saliu, H.A. & Lipede, A. (2008). Constraints on democracy in Nigeria. Saliu, H. A., Jimoh, H. I., Yusuf, N., & O.E. Ofo, *Perspectives on nation-building and development in Nigeria*. Lagos: Concept Publicaions Limited.

- Salomone, F. (1991). Ethnic identities and religions. Olupona, J. K. & T. Falola, Religion and society in Nigeria. Ibadan Spectrum Books
- Shola, J.O. (2009). Nigerian parties and political ideology. *Journal of Alternative perspectives in the Social Sciences*, 1(3), 612-634. Accessed on September 6, 2018 from <https://www.japss.org/upload/4.Sholaomotolaarticle.pdf>
- Smith, A.D. (1991). *The ethnic origins of nations*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Smith, M. G. (1971). Institutional and political considerations of pluralism. Kuper, L. & M.G. Smith, *Pluralism in Africa*. Los Angeles: University of California Press.
- Strickler, V.J. & Davies, R. (1996). Political party conventions. F.N., Magill, *International Encyclopedia of Government and Politics*. London and Chicago: Fitzroy Dearbin Publishers.
- The Economist. Economic Intelligence unit democracy index. Accessed on January 25, 2018 on www.economist.com/media/pdf/Democracy_Index_2002v3.pdf

Dominasi Kuasa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

Marno Wance, Raoda M.Djae.

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 100, Kel. Sasa, Ternate, Maluku Utara

Email: ipmummu@gmail.com & raodamjae@mail.com

Abstract

Political power occurring in the village heads elections is a part of political power contestation wave started simultaneously in 2015. South Halmahera Regency is one of the regions participating in this political power contestation. At the contestation process, it is seen that the village residents are divided into some divisions based on their political choices. This situation continues to happen in the simultaneous village head elections in South Halmahera Regency in 2016. It attracts political actors to be involved in intervening power and dominance to win the contestation. Therefore, political power is used to carry out the basis of consolidation for winning the elections. This political power treats long-term power because the greater base of political power at the village level has been formed. The expected benefit of this study is to expand our horizon on political power issues, particularly in the village head elections context. Practically, this study can contribute to study material from various interested parties to analyze electoral conflicts that occur at the lowest level such as at Babang Village and Marabose Village. Besides that, the study also sees the involvement of regional actors and local governments in intervening to dominate power using the authority they have.

Keywords: *Power Pominance, Political Contestation, Local Actors*

Abstraksi

Kuasa Politik yang terjadi pada arena pemilihan kepala desa merupakan kontestasi kekuatan politik serta gelombang basis pemilihan pada pilkada serentak tahun 2015, Kabupaten Halmahera Selatan merupakan salah satu daerah yang turut ikut dalam arena politik lokal. Basis perpecahan masyarakat terlihat dari proses kontestasi pilkada daerah. Mengakibatkan adu kekuatan politik berlanjut pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016. Sehingga menarik para aktor politik ikut terlibat dalam mengintervensi kekuatan serta dominasi kekuasaan untuk memenangkan arena kekuasaan tingkat desa. Maka dari itu kuasa politik digunakan oleh pemangku kepentingan untuk melakukan basis konsolidasi kemenangan sampai pada aktor daerah. kuasa politik ini untuk merawat kekuasaan jangka panjang karena semakin besar basis kekuatan politik di tingkat desa sudah terbentuk.

Manfaat yang diharapkan dari hasil temuan penelitian dapat menambah pengetahuan kita tentang kuasa politik, khususnya pada konflik pemilihan kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bisa menghasilkan bahan kajian dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menganalisis konflik pemilihan yang terjadi pada tingkat paling bawah yaitu Desa Babang dan Desa Marabose. Disamping itu juga, peneliti melihat keterlibatan dari pihak aktor-aktor daerah serta pemerintah daerah dalam melakukan intervensi kewenangan yang di miliki untuk mendominasi kekuasaan.

Kata Kunci: *Dominasi Kuasa, Kontetstasi Politik, Aktor Daerah*

<i>Submite</i>	: 04 Desember 2018
<i>Review</i>	: 01 Januari 2019
<i>Accepted</i>	: 03 Maret 2019
<i>Surel Corespondensi</i>	: ayub_dwianggoro@umpo.ac.id

Pendahuluan

Pada tahun 2016 pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memberikan kebijakan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, dimana pemilihan serentak ini akan dilakukan oleh 28 kecamatan terdiri dari 177 desa seperti yang kita ketahui pemilihan kepala desa yang sering di singkat pilkades mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik rakyat sekaligus sebagai sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa. Pilkades di harapkan mampu memenuhi keinginan masyarakat untuk mengangkat calon yang sebagai kepala desa, pilkades merupakan instrument dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis (Sumber: <https://ambon.antaranews.com> di akses pada tanggal 17 Maret 2017).

Pemilihan kepala desa merupakan arena kontestasi politik demokrasi yang ditandai oleh mobilisasi berbagai sumber daya (modal) kekuasaan. Sumber daya kekuasaan dalam bentuk sosial, cultural, sampai sumber daya ekonomi yang menjadi generator dinamika konflik politik. Karena penyelesaian isu teknis seringkali dibersamai oleh pengelolaan mobilisasi sumber daya kekuasaan oleh para calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya dinamika konflik politik dalam pemilihan kepala desa seringkali meruncing menjadi konflik kekerasan dan anarkis.

Proses pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Halmahera Selatan telah selesai sejak Desember 2016 lalu. Bahkan sebagian kepala desa terpilih kini telah dilantik. Proses demokrasi yang berlangsung di desa itu memiliki hiruk pikuk dan magnet tersendiri di kalangan masyarakat desa di Halmahera Selatan. Pasalnya prosesnya ternyata hingga kini masih meninggalkan bara konflik. Banyak persoalan yang tersisa dan sekali-sekali akan meletup menjadi konflik antar masyarakat. Betapa tidak saat ini akibat dari konflik Pilkades itu, ada bahkan warga yang terusir dari kampungnya karena kalah Pilkades. Ada bahkan panitia Pilkadesnya dihakimi hingga nyaris tewas. Dinamika konflik bahkan ada yang memalang Kantor Camat hingga berhari hari. Warna warni konflik dan kekerasan ini menjadi bunga rampai

proses Pilkades di Kabupaten paling selatan Halmahera 2016 (Sumber: <http://kabarpulau.com> di akses pada Rabu 31 Mei 2017).

Kuasa politik pada konflik pemilihan kepala desa yang muncul saat proses pelaksanaan yaitu 76 Kepala Keluarga dari Desa Yomen Kecamatan Gane Barat Selatan bahkan sampai terusir keluar dari kampungnya dan ingin membuat kampung baru. Ini salah satu contoh dampak dari konflik Pilkades yang terjadi di daerah itu. Para warga masyarakat yang keluar dari desa Yomen dan mau membuat desa baru itu adalah pendukung kandidat kepala desa yang. Mereka dibawa kandidat itu sendiri karena merasa diasingkan. Senada dengan penyampaian oleh anggota DPRD Halmahera Selatan dari fraksi Nasdem Akmal Ibrahim menyatakan mendukung langkah yang diambil ratusan warga itu. Ibrahim mengatakan tidak ada kaitannya antara putra daerah dan pendatang seperti isu yang berkembang. Keluarnya 76 KK dari Desa Yomen itu murni diasingkan oleh warga dan membangun dusun (Sumber: <http://kabarpulau.com> di akses pada Rabu 31 Mei 2017).

Dominasi kuasa pada konflik pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan. Penolakan hasil putusan hasil pemilihan kepala desa (pilkades) dengan menggelar aksi protes di kantor Bupati, terdiri dari Warga Halmahera Selatan dari 5 (lima) desa Marabose, Babang, Wayaua, Bori, dan desa Silang. Pemasalahan dan konflik terjadi di beberapa desa seperti desa Bori, Babang dan Marabose pasca Pilkades karena adanya putusan SK Bupati Nomor: 286 tahun 2016 tentang pembentukan tim penyelesaian perselisihan Pilkades serentak Kabupaten Halmahera Selatan. Dimana SK tersebut, dinilai illegal karena tidak sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016, UU No 6 Tahun 2014, Permendagri 112 Tahun 2014. Maka dengan begitu, Hasil Sengketa Pilkades desa Babang yang diputuskan oleh Majelis/Tim penyelesaian perselisihan hasil Pilkades Serentak Kabupaten Halmahera Selatan dimana Ahmad H. Abu (Calon Kades No. Urut 4) dalam penghitungan dan penghitungan suara memperoleh 565 suara sebagai pemenang kedua sedangkan Irwan Samsudin (Calon No. Urut 2) memperoleh 604 suara sebagai pemenang pertama. Namun, dalam putusan hasil sengketa oleh Tim penyelesaian perselisihan Pilkades Ahmad H. Abu kemudian ditetapkan sebagai Calon Kades terpilih desa Babang, hasil putusan tersebut diduga ada muatan politik dan cacat hukum karena perolehan suara Calon Kades No. Urut 2 Irwan Samsudin adalah murni

pilihan masyarakat desa Babang (Sumber: <http://www.wartamalut.com> di akses pada Rabu 31 Desember 2017).

Berdasarkan pada uraian permasalahan tentang konflik pemilihan kepala desa serentak 2016 di Halmahera Selatan. Sehingga menarik untuk menganalisis tentang faktor “*Dominasi Kuasa Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan*”. Pada pemilihan kepala desa serentak yang dilakukan terjadi penyelewengan kewenangan sehingga berakibat pada politik kekerasan atau kekerasan politik pada pra pilkades maupun pasca pilkades. Peneliti disini ingin mengungkap apa motif dan dan bagaimana dominasi kuasa pada konflik pemilihan kepala serta faktor-faktor yang menyebabkan konflik pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera selatan tahun 2016.

Pada beberapa kasus konflik pemilihan kepala yaitu Istifarin (2016) kekerasan pilkades yaitu ditemukan bahwa konflik kekerasan disebabkan dikarenakan antara lain, *Pertama*, sebelum pemilihan kepala sa pihak *Inumbent* tidak diperbolehkan mencalonkan sebagai kepala desa. *Kedua*, syahwat politik berlebihan untuk menguasai sehingga terjadi pertentangan dalam persaingan memicu terjadinya kecurangan sehingga terjadinya politik kekerasan. Sedangkan hasil penelitian Holifah (2016) politik dinasti pada pilkades, Hasil temuan penelitian yang ditemukan bahwa Strategi yang dilakukan oleh dinasti Samidin untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan kepala desa yakni menggunakan strategi peminjaman kepada warganya yang membutuhkan seperti peminjaman uang, perhiasan, pupuk dan hewan ternak. strategi yang kedua tim sukses dari dinasti Samidin ini menggunakan cara merangkul semua blater-blater dan tokoh-tokoh yang berkuasa dirangkul untuk dijadikan factor pendukung dalam pencalonan dinasti Samidin. Pada penelitian Suwandi (2014) tentang politik uang ditemukan bahwa sogok menyogok terjadi karena masyarakat belum memahami sedekah politik sebagai pelanggaran pemilu serta politik uang berjalan melalui patron keluarga dan tim sukses. Zerunisa (2014) *political marketing* pilkades yang digunakan untuk memenangkan pemilihan kepala desa, Wance (2016) pola interaksi kekuasaan yang terjadi tawar menawar (*barganing*) untuk melakukan pertukaran kepentingan. Sehingga pada riset ini lebih melihat tentang fenomena konflik pilkades serentak mengakibatkan dominasi kuasa oleh penguasa kewenangan. Ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis kuasa politik yang terjadi di ranah kekuasaan. Sedangkan hasil

Wance (2017) konflik kepentingan yang muncul karena adanya pertentangan anggaran, dominasi serta pola interaksi untuk melakukan pertukaran kepentingan diantara kelompok kepentingan.

Konsep Dominasi Kuasa

Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault seorang filsuf pelopor strukturalisme, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan (Sutrisno, 2005). Kekuasaan menurut Foucault ada di mana-mana. Kehendak untuk kebenaran sama dengan kehendak untuk berkuasa. Namun, yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.

Menurut Foucault istilah “kuasa” (*power*) kata Foucault di sini menunjuk pada “totalitas struktur tindakan” untuk mengarahkan tindakan dari individu-individu yang merdeka. Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berada dalam posisi untuk memilih, dan ditujukan untuk mempengaruhi pilihan mereka (Mungis, 2013). Foucault lalu membedakan antara relasi kuasa menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Relasi kuasa sebagai “permainan strategis” (*strategic games between*) antara pihak-pihak yang merdeka. Kuasa (*power*) di level ini hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemerdekaan. Sehingga tidak ada dominasi yang dijalankan dalam relasi kuasa ini, murni sebagai permainan strategi. Dalam konsepsi ini, kuasa “menentukan relasi antar mitra” dalam suatu *ensemble* tindakan-tindakan.
- b) Relasi kuasa sebagai “dominasi” (*domination*). *Dominasi* adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi di mana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas. Dominasi sendiri menunjuk pada relasi kuasa yang bersifat asimetris dimana di dalamnya orang-orang yang ter subordinasi memiliki sedikit ruang untuk bermanuver karena „ruang kebebasan mereka untuk bertindak sangat terbatas” oleh karena efek dari kuasa.
- c) Relasi sebagai bentuk “pemerintahan” (*government*). Konsepsi pemerintahan terutama berasosiasi dengan konsep tentang memimpin, dalam artian mengarahkan atau mengontrol

tindakan. Konsep ini merujuk pada pelaksanaan kuasa atas pihak lain. Mulai dari pelaksanaan pemerintahan yang menjalankan dominasi secara nyata ataupun yang diwujudkan dalam timbal-balik (Kurzweil, 2004)

Relasi Kuasa

Pada dasarnya kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin *law enforcement*/ pelaksanaan hukum (Hidayat, 2009).

Dari gerak tiga komponen diatas, maka kekuasaan juga mempunyai unsur *influence*, yakni menyakinkan sambil berargumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Kekuasaan juga mempunyai unsur *persuasion*, yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (*bujukan atau rayuan*) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada unsur *coersion*, yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan unsur *force* atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer (Hidayat, 2009). Dengan begitu penjelasan tentang kekuasaan diatas para kandidat bisa menggunakan tiga komponen yaitu diantara *influence*, *persuasion*, dan *coercion*.

Konsep Politik Kekerasan

Menurut Johan Galtung, kekerasan itu ada bila manusia dipengaruhi oleh keinginan yang kuat untuk menyakiti, sehingga realitas jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya (Galtung, 1988). Berbicara tentang kekerasan politik, tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang kekerasan politik yang terjadi dalam pemilihan umum. Kekerasan politik dalam pemilihan umum, telah melanggar hak asasi manusia. Baik kekerasan yang dilakukan antar massa, (horisontal) maupun kekerasan yang dilakukan oleh aparat (vertikal). Atau pun

kekerasan personal, maupun kekerasan struktural. Meskipun data yang ada dalam laporan pelanggaran.

Konflik kekerasan politik yang lebih memprihatinkan ialah merebaknya intimidasi terhadap pemilih supaya menjatuhkan pilihannya kepada kontestan tertentu (Sanit, 1997). Bentuk-bentuk kekerasan politik dalam pemilu lainnya ialah perusakan fasilitas fisik pemilu, pemukulan, pembunuhan lawan politik dan huru-hara politik. Pengulangan pencoblosan, pengulangan proses perhitungan suara, politik uang yang masih berlaku di beberapa daerah, kecurangan dalam perhitungan suara, adanya saling hujat antar pendukung partai. Dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang lebih ekstrim. Yang kesemuanya termasuk dalam kemungkaran.

Johan Galtung membagi kekerasan dalam kategori. *Pertama*, kekerasan struktural dikenali dari dua ciri: 1). Bersifat vertikal atas kebawah (yang kuat kepada yang lemah, yang berkuasa kepada yang dikuasai, yang besar kepada yang kecil); dan 2). Mengandung represi (dominasi, hegemoni, eksploitasi). Kekerasan semacam ini terjadi dalam konteks makro, dengan aktor-aktor besar (Negara, militer/aparat keamanan, non-negara, perusahaan trans-nasional, sindikasi, organisasi). *Kedua*, kekerasan Horizontal terjadi pada aktor yang „relatif“ setara dan tidak berdimensi vertikal, baik yang terjadi antar-individu (kerabat atau asing) antar-kelompok (keluarga atau bukan keluarga), atau individu versus kelompok *vice versa*. Sebagaimana konflik struktural, motivasi dasar dari konflik ini adalah kepentingan untuk melakukan dominasi (penundukan), penguasaan (sumber daya), serta penegasian. Termasuk didalamnya adalah motivasi pengakuan eksistensi dalam lingkungan atau pada bidang tertentu (Galtung, 1988).

Konsep Kekuatan Politik

Pada masa orde baru, ketika ideologi developmentalisme menjadi pilihan paradigma pembangunan orde baru, ironisnya konsep ini bukan sepenuhnya produk elit negara melainkan hasil kontruksi kekuatan kapital global (Mustain, 2007). Sebagai akibatnya, produk-produk kebijakan publik dan program pembangunan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga demokrasi pada masa orde baru tidak lain suara dari para wakil rakyat yang dibawah kontrol dan untuk kepentingan lembaga birokrasi, militer, presiden dan kroni-kroninya. Kekuatan eksekutif birokrasi menjadi representasi kekuatan negara sebagai agen kapitalisme global. Implikasinya , strategi pertumbuhan ekonomi pada masa orde baru dengan prinsip *trickle down effect* atau

menetes kebawah, justru mengalirkan hasil pembangunan itu ke rezim orde baru sendiri. Rakyat yang sudah tertindas oleh represi politik pun menjadi lebih tertindas secara ekonomi politik.

Kekuatan politik dimanapun di atas dunia selalu mencerminkan masalah-masalah mendalam kesejarahan dan struktural di mana kekuatan-kekuatan politik itu tumbuh, berkembang dan melakukan peranan. Menurut Hannah Arendt Kekuatan (*strength*) merupakan sifat atau karakter yang di miliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat dipengaruhi. Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh. Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan, namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan pengrusakan terhadap kekuatan (Pitaloka, 2004).

Metode

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif kualitatif yaitu ada beberapa definisi mengenai pendekatan ini, (Moeleong 2011) menjelaskan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. di mana metode yang di gunakan menekankan pada proses penelusuran data / informasi hingga di rasakan telah cukup di gunakan untuk membuat suatu interpretasi. Tipe penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena-fenomena sosial tertentu yang berkenaan dengan masalah dan untuk diteliti. Senada apa yang di kemukakan oleh (Sugiyono, 2011) yang menjelaskan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan fenomena peristiwa faktual yang terjadi di lapangan bahkan mampu menyajikan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi dari penelitian ini. Di mana objek penelitian yang akan di teliti tentang bagaimana mendeskripsikan “*Dominasi Kuasa Pada Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara*”. Pertimbangan kenapa peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dengan

menyajikan data-data dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena sosial yang sangat sulit diungkapkan di permukaan.

Unit Analisa data pada Penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten, DPRD, Pemerintah Desa, BPD Desa, Panitia Pemilihan.

Tabel 1 Unit Analisa Data

Institusi (Pemkab, DPRD, Pemerintah Desa, BPD Desa, Panitia Pemilihan)	Jumlah Responden
Bupati Halmahera Selatan	1 Orang
Ketua DPRD	1 Orang
Pemerintah Desa	1 Orang
BPD Desa	1 Orang
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda	4 Orang
Jumlah	8 Orang

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Pada penelitian ini ada tiga metode analisis data menjadi acuan dalam penulisan yang berdasarkan pada pendapat Huberman (Mukhtar. 2013) bahwa analisis data deskriptif kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Senada dengan apa yang disampaikan Miles dan Huberman yang dikutip oleh (Sugiono. 2011) yang membagi analisa data menjadi tiga komponen yaitu: a). Reduksi data, Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. b). Penyajian data, Kedua pakar ini membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. c). Penarikan Kesimpulan, Berdasarkan permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, kuasa politik yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan,

mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Dan kesimpulan akhir muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Argumentasi Elit Untuk mendominasi kekuasaan

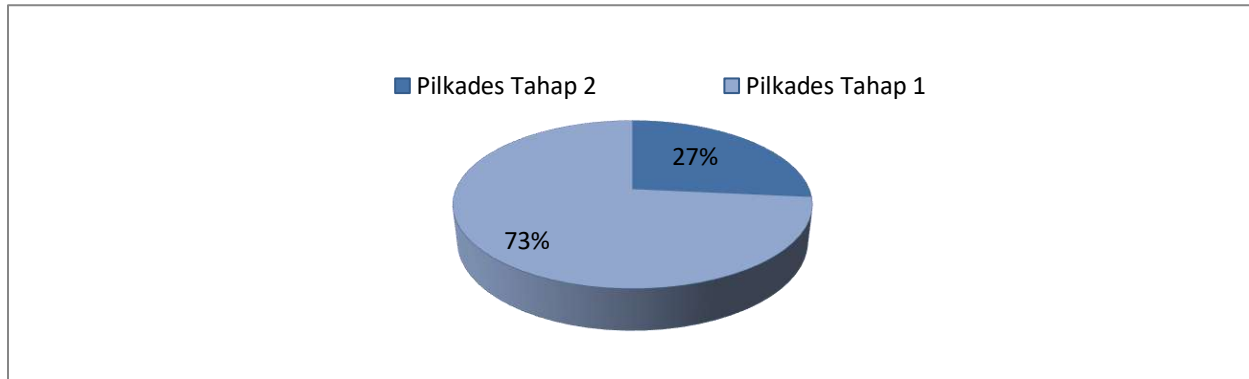
Sistem pemerintahan di Indonesia, terkait pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terendah yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kepala desa merupakan seorang yang telah dipilih secara demokrasi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat yang telah memiliki hak suara berdasarkan peraturan yang ada. Kepala desa memiliki wewenang yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, seorang kepala desa dibantu oleh beberapa perangkat desa seperti kepala urusan, kepala desa, serta BPD mereka saling menjalin relasi dengan satu sama lain.

Kuasa politik merupakan suatu hubungan yang terjalin oleh seorang dengan orang lain maupun seseorang dengan suatu lembaga. Dalam setiap kuasa politik memiliki suatu hubungan yang terjalin dengan baik dan saling mendominasi dalam perebutan kekuasaan publik. Misalnya saja dalam pemerintahan desa seorang kepala desa juga memiliki masa jabatan tertentu dan akan berhenti menduduki jabatan tersebut. Kepala desa yang sudah habis masa jabatannya ini biasanya disebut dengan mantan kepala desa. Sepanjang pemerintahan desa di Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi pergantian kepala desa beberapa kali. Pada masa peralihan pergantian kepala desa terjadi dominasi kekuasaan dalam menggantikan perangkat pemerintah desa untuk mempertahankan kekuatan politik di level paling bawah. Pemerintahan desa juga merupakan benteng pertahanan dalam arena kontestasi daerah. sehingga kuasa politik pemerintah desa dapat menentukan kemenangan kontestasi ke depan.

Pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan dilakukan secara serentak di 249 Desa pada 32 Kecamatan secara keseluruhan. Desa-desa yang sudah selesai masa jabatan pada tahun 2014 dan akhir 2015 akan di ikut sertakan dalam proses pemilihan kepala desa serentak tahun 2016. Sedangkan desa yang masa jabatan berakhir pada tahun akhir 2016 akan mengikuti

pemilihan serentak pada tahun 2017. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Halmahera Selatan akan dilakukan dengan dua tahap pemilihan.

Diagram 1 Pilkades Tahap I



Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan pada diagram 1 di atas bahwa pemilihan kepala desa tahap I di Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan pada tahun 2016. Dari jumlah desa secara keseluruhan yaitu 249 yang tersebar di 32 Kecamatan ini, pada pilkades tahap I hampir secara keseluruhan desa sudah habis masa jabatan dan akan dilakukan pergantian kepemimpinan dalam pemerintah desa. Setelah dilakukan pemilihan tahap pertama selanjutnya akan dilakukan pemilihan tahap 2 pada tahun 2018. Dari sisi anggaran pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 sangat besar karena jumlah desa yang melaksanakan pemilihan lebih banyak dibandingkan dengan pemilihan kepala desa pada tahun 2018. Anggaran pemilihan serentak bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Selatan yang dipergunakan untuk biaya akomodasi, honor penyelenggara.

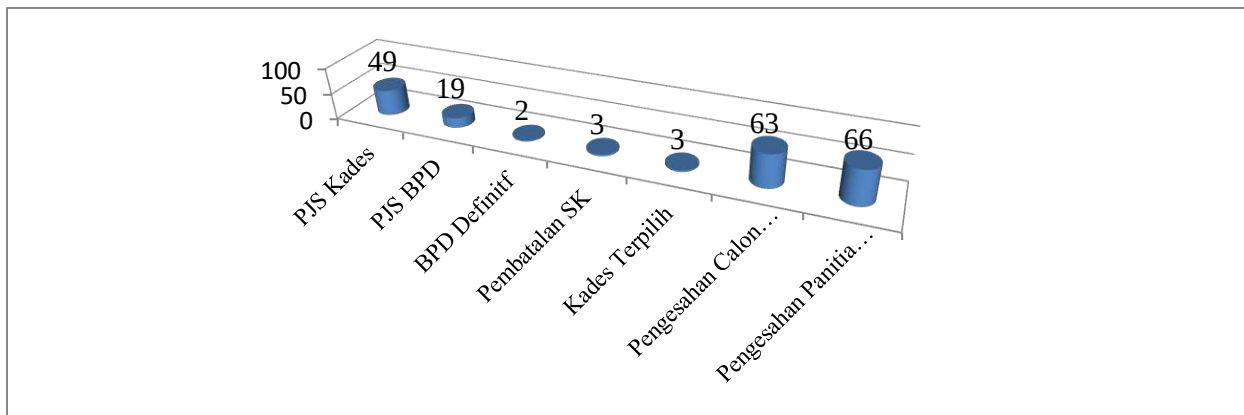
Panitia penyelenggara pemilihan kepala desa (Pilkades) tingkat kabupaten menetapkan pengunduran jadwal pelaksanaan pilkades serentak di 183 pada tanggal 12 November 2016. Kondisi itu terjadi lantaran anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pilkades di 183 desa itu cukup minim yakni hanya sebesar Rp 3,2 miliar. Nilai ini tentu lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2015 lalu yang dialokasikan sebesar Rp 30 miliar. Jika pilkada lalu jumlah desa yang melaksanakan hajatan politik mencapai 249 desa, sementara pilkades hanya 183 desa, dengan selisih desa yang begini tipis, mestinya anggaran yang disiapkan minimal Rp 10 miliar. (Sumber: *beritalimamenit.com* Di akses pada tanggal 10 Oktober 2018)

Kekuatan Politik dalam Bentuk kekuasaan

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan adalah urusan Pemerintahan Desa yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa. Urusan Pemerintah Desa yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan dari Pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Di Kabupaten Halmahera Selatan pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 menampungnya dalam produk hukum yaitu pemberian Pejabat Sementara (PJS) baik itu diberikan untuk kepala desa maupun BPD di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun rincian pergantian pemimpin pejabat sementara yaitu sebagai berikut:

Diagram 2 Pengesahan Kekuasaan Di Tingkat Desa Tahun 2016



Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan pada data diagram 2 diatas bahwa pemberian pejabat sementara untuk menggantikan baik kepala desa dan BPD dengan tujuan melaksanakan proses pemilihan kepala desa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, dalam pasal 47 dan 48 disebutkan Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan dan kewenangan Kepala Desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa. Masa jabatan Pejabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dalam masa 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan.

Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa tersebut selama 6 (enam) bulan, setelah ditetapkannya Pejabat Sementara Kepala Desa di beberapa desa yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan pada Pilkades serentak tahun 2016 maka selain melaksanakan tugas dan

wewenang sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa, kepada pejabat sementara dibebankan tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang definitif.

Penetapan Pejabat Sementara Kepala Desa berakibat pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, apakah secara legalitas dinyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa yang dipilih secara demokratis, seperti dalam hal kebijakan-kebijakan strategis seperti penggunaan uang atau penjualan tanah di desa. Sehingga tugas dan wewenang Kepala Desa dan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa patut dipertanyakan.

Kewenangan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 47 yang berisi: “Pejabat Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa”. Berdasarkan Pasal tersebut diketahui bahwa tugas dan wewenang Pejabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009. Adapun tugas dan wewenang Pejabat Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
- 3) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 4) mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa
- 5) menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 6) memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- 7) membina kehidupan masyarakat desa
- 8) membina perekonomian desa
- 9) mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya

- 10) menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.
- 11) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa juga dibebankan tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang defenitif. Untuk melihat bagaimana perbandingan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Selatan, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Kinerja Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dan BPD

Jabatan		Keterangan
Pejabat Sementara (PJS) Kades		1. Lemahnya tata kelola administrasi desa 2. Penyelenggaran pemilihan kepala desa di tunda selama satu tahun lebih 3. Pembangunan desa belum dijalankan secara maksimal 4. Pelayanan publik yang belum maksimal 5. Kantor Desa jarang di buka untuk pelayanan publik 6. PJS lebih mementingkan kepentingan kelompok/politik
PJS BPD		1. Pengetahuan fungsi dan kewenangan BPD yang masih lemah 2. BPD belum pernah mengevaluasi kerja PJS secara optimal 3. PJS BPD jarang melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menyaring aspirasi 4. Pengawasan dan hak bertanya kepala PJS kepala desa terkait kerja-kerja PJS

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan pada tabel 2 di atas dapat digambarkan bahwa kewenangan penyelenggaraan PJS oleh pemerintah desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sementara di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016 belum maksimal dan efektif. Terbukti, dengan tugas dan kewajiban PJS yang berikan belum mampu diaktualisasi untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara cepat. Namun yang terjadi adalah pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan membentuk tim pemilihan di Kabupaten untu melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Selain itu, PJS dan BPD belum mampu menata administrasi desa yang baik sehingga pada proses pemilihan data pemilih tidak bermasalah serta pembangunan fisik belum dijalankan sesuai dengan amanat PJS yang diberikan oleh pemerintah.

Faktor Penyebab Konflik

Berdasarkan pada kajian kasus terkait dengan masalah-masalah yang muncul pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung yang berkaitan dengan erat dengan kematangan perencanaan sampai pada pelaksanaan pemilihan oleh rakyat harus dipastikan hak semua orang yang memilih bisa diakomodir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik pemilihan kepala desa serentak di tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Faktor menjadi sumber masalah pada pemilihan kepala (Pilkades) desa serentak pada tahap I adalah lemahnya administrasi penyelenggara. Administrasi Pilkades langsung yang kurang baik menyebabkan sengketa hasil Pilkades. Sejumlah urusan administrasi misalnya pendataan penduduk, pemutakhiran data calon pemilih. Akibatnya proses pemilihan berlangsung sebagaimana mestinya.
2. Proses sosialisasi pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan timbulnya konflik pasca Pilkades. Sehingga, sosialisasi Pilkades mesti diadakan karena menjadi tumpuan utama dalam mensukseskan salah bentuk demokrasi lokal di tingkat desa tersebut. Selain itu, dalam proses sosialisasi juga perlu ditekankan satu cara dalam mendidik masyarakat berpolitik secara kritis serta kandidat kepala desa (Kades) juga bisa menerima hasil dari pilihan rakyat secara kolektif. Oleh sebab itu, Pilkades langsung memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilih secara cerdas dengan pertimbangan kritis-rasional berasas pada visi dan program kerja.

Pendekatan menyesuaikan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dalam artian calon Kepala Desa pada Pilkades serentak yang dengan cara salah satu pihak melepaskan atau mengesampingkan keinginan kelompoknya dan memenuhi keinginan pihak lain. Melalui pendekatan ini pihak yang satu merelakan kebutuhannya, sehingga pihak lain mendapatkan sepenuhnya yang diinginkan.

Pasca pemilihan Kepala Desa serentak 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan terlihat bahwa di antara beberapa calon atau kandidat yang kalah di pertarungan secara perlahan telah menerima kekalahan dan tentunya itu semua tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah setempat, Tokoh-tokoh masyarakat serta jajaran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah

yang selalu beruaha untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang kontra atas keputusan yang di keluarkan oleh lembaga pemungutan suara pemilihan Kepala Desa. Kemudian jika keputusan yang diambil ada pihak tertentu merasa dirugikan maka proses hukum sangat terbuka untuk dilakukan banding melalui PTUN di Ambon.

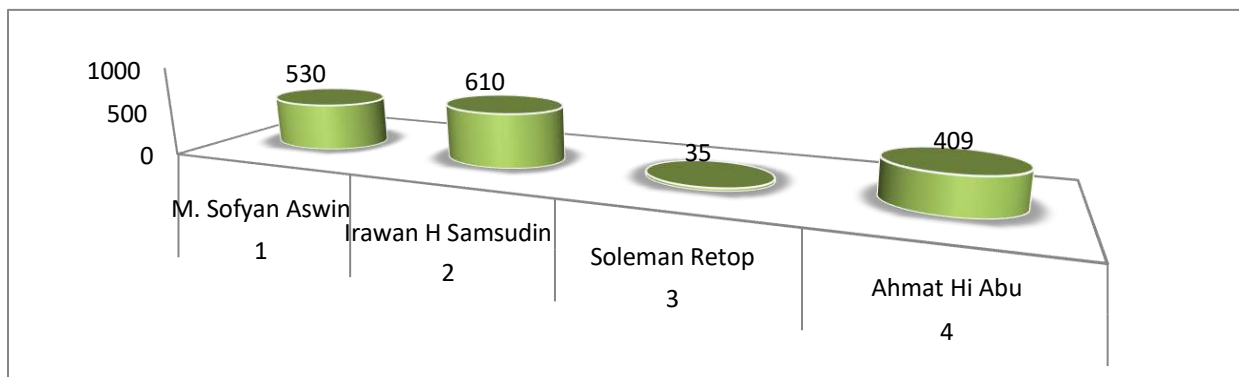
Kasus Konflik Desa Babang

Banyaknya rentetan konflik yang terjadi pasca pemilihan Kepala Desa tentunya promatur yang terpilih maupun yang tidak terpilih bersaing dalam melakukan pendekatan baik pendekatan kepada masyarakat maupun pendekatan terhadap pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dan terbukti bahwa ada satu calon kepala desa yang terpilih berhasil melakukan komunikasi kepada Pemerintah Daerah.

Persaingan-persaingan yang terlahir bukan hanya berbentuk pendekatan yang di lakukan kepada pihak pemerintah namun ketika kembali menyimak sedikit prosesi tentang masa kampanye sebelum berlangsungnya pemilihan Kepala Desa, para calon kepala Desa aktif dalam melakukan berbagai hal untuk merebut simpati masyrakat mulai dari persaingan yang bentuk fisik maupun persaingan-persaingan berbentuk nonfisik. Kemudian persaingan yang di lakukan pasca pemilihan adalah persaingan dalam hal melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar bisa mempengaruhi dan merubah haluan masyarakat dari yang sepakat menjadi tidak sepakat maupun dari yang tidak sepakat menjadi sepakat.

Adapun hasil rekapitulasi suara pemilihan kepala desa Babang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Diagram 3 Perolehan Pilkades Babang 2016



Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan nomor urut 2 Bapak Irwan Hi Samsudi yang memenangkan Pilkades Babang pada tahun 2016. Namun pada Pilkades tersebut belum dilakukan penandatanganan berita acara perhitungan rekapitulasi suara untuk mengesahkan kemenangan pada desa babang tersebut. Tim monitoring dari pemerintah yaitu kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Halmahera Selatan yang melihat proses pemilihan kepala desa serentak di Babang. Namun karena dari BPMD melakukan monitoring di desa lain sehingga tidak memantau proses sampai selesai rekapitulasi sampai penandatanganan berita acara. Dengan argumentasi tersebut sehingga terjadi konflik kekuasaan di Desa Babang serta melibatkan kelompok kepentingan untuk menyelesaikan kandidat dan tidak berdasarkan pada proses pemilihan yang terjadi pada saat pencoblosan. Argumentasi tersebut sehingga membuat pasangan lain untuk melakukan gugatan ke PTUN Ambon untuk mencari keadilan pemilu di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebanyak 2.744.000 orang, yang menggunakan hak pilih 1.600.022 orang. DPT Ini diambil berdasarkan pada rekap pemilih pada pemilihan bupati tahun 2015. sebanyak Desa yang terjadi konflik pemilihan kepala Desa di Halmahera Selatan salah satunya juga Desa babang. Dalam kasus ini, ada beberapa faktor sehingga terjadi konflik Pilkades 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Konspirasi kekuasaan dari salah satu kandidat yang bertarung pada pemilihan kepala desa serentak 2016.
2. Dominasi kekuasaan dengan diusungnya salah satu kandidat calon yang berasal dari kader partai politik yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Halmahera Selatan.
3. Panitia pemilihan di tingkat desa adalah Anak dari calon kepala desa pada Pilkades 2016.

Kasus tersebut menjelaskan tentang calon kandidat yang bertarung pada pemilihan kepala desa babang tahun 2016 melakukan pertemuan dengan Anggota DPRD Halmahera Selatan, Calon kades langsung bertemu dengan Bapak Asnawi Lagalante dengan Bapak Benyemin Daud dengan substansi haring yaitu sebagai berikut:

1. Panitia pemilihan kepala desa tidak ada hubungan keluarga
2. Ketua Panitia pemilihan kepala desa babang ada kedekatan hubungan keluarga.
3. Biaya pendaftaran calon kepala desa sekitar Rp. 15.000.000 kemudian menjadi Rp. 5.000.000

4. Pada penyampaian DPT banyak masyarakat yang tidak terdaftar. Atas kejadian itu kemudian terjadi melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah.

5. Hilangnya tokoh masyarakat sebagai figur desa.

Hasil pertemuan tersebut kemudian pimpinan DPRD mengundang panitia pemilihan Kabupaten tahap I untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi menjelang pilkades serentak 2016. Pilkades tahap I di ketua oleh bapak Amir dukomalamo yang dipercayakan untuk memimpin melaksanakan Pilkades 2016. Pada pertemuan kedua antara bersama pemerintah Kabupaten bersama dengan DPRD dan Masyarakat terjadi pertikaian argumentasi sehingga terjadi konflik kepentingan. Ada beberapa persoalan yang ditemukan pada pasca Pilkades babang 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Pemilih fiktif yang di Mobilisasi berasal dari berbagai daerah untuk memenangkan kandidat tertentu
2. Panitia pemilihan kepala desa Babang melakukan pleno kemudian menghilangkan kotak suara Pilkades 2016.
3. Rekapitulasi perhitungan suara Pilakdes babang 2016 di menangkan oleh pasangan nomor urut 2. Namun lemah secara hukum karena belum ada penandatanganan berita acara rekapitulasi suara.
4. Pleno penetapan kepala desa dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Halmahera Selatan.

Kasus Desa Marabose

Pada kasus pemilihan kepala desa serentak 2016, konflik di Desa Marabose yang di sebabkan oleh beberapa persoalan yang terjadi sejak pemilihan kepala desa terebut. Adapun bakal calon yang mendaftar pada seleksi Administrasi yaitu sebagai berikut:

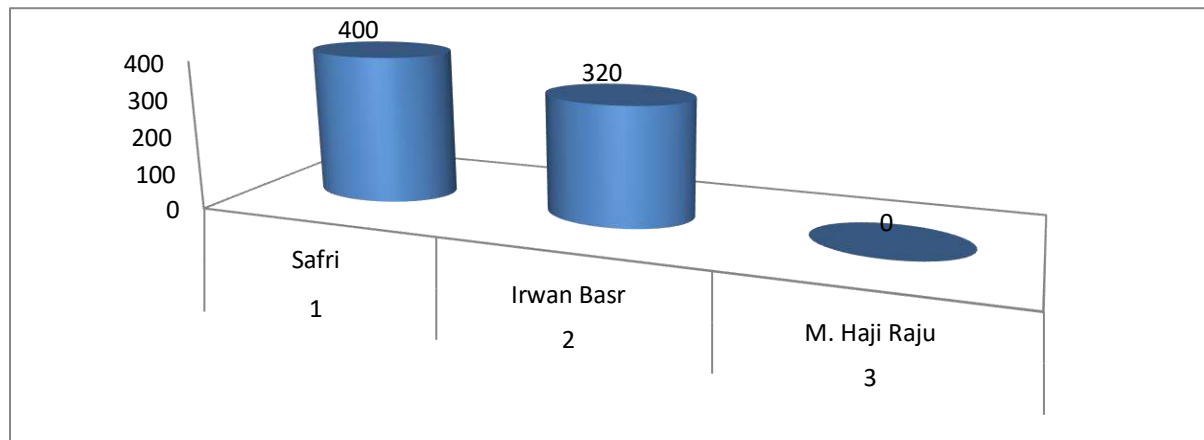
Tabel 3 Seleksi Berkas Pilkades Marabose 2016

Bakal Calon	Keterangan
Safrin	Lulus
Irwan Basir	Lulus
M. Hi Raju	Lulus
Malik (PNS)	Tidak Lulus

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan tabel 3 di atas bahwa tahapan seleksi berkas pada Pilkades Marabose terdiri dari empat pasangan calon namun karena melalui tahapan seleksi administrasi kemudian salah satu pasangan di gugurkan yaitu bapak Malik yang berstatus sebagai PNS yang belum mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Pada tahap ini, hasil seleksi dari panitia pemilihan tingkat desa menetapkan 3 pasangan yang akan bertarung dalam Pilkades Desa babang 2016. Konflik kekuasaan pasca Pilkades dilakukan namun pada tahapan pemilihan proses pemilihan dengan aman, damai dan transparan. Adapun jumlah perolehan suara sekaligus menjadi memperoleh suarat terbanyak yaitu sebagai berikut:

Diagram 4 Pemenang Pilkades Serentak Marabose 2016



Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Berdasarkan pada tabel di atas hasil Pilkades serentak di Marabose pasangan nomor urut satu bapak safri memperoleh jumlah suara terbanyak kemudian disusul oleh bapak Iwan Basri sedangkan posisi ketiga yaitu Bapak M. Haji Rahi. Sedangkan jumlah KK 300 orang dan jumlah DPT Desa Marabose sebanyak 1014 Orang. Proses pilkades berjalan sangat normal berdasarkan pada aturan yang sudah ditetapkan. Konflik kekuasaan semakin terjadi ketika saat rekapitulasi suara yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Persoalan distribusi C6 yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk
2. Penyelenggara Pilkades serentak 2016 di Marabose ada keberpihakan ke salah satu pasangan lain.
3. Penyelenggara tidak memberikan form C6 ke salah satu pasangan calon

4. Pada proses rekapitulasi akhir ada tim pasangan lain melakukan perusakan terhadap plano rekapitulasi suara.

Proses konflik perhitungan terjadi ketikan menjelang akhir terjadi proses perusakan pleno perhitungan sehingga panitia tidak sempat melakukan tanda tangan berita acara sebagai bentuk aspek formal dalam mengesahkan hasil Pilkades Marabose. Keputusan yang berpihak tersebut kemudian calon kades di beberapa desa melakukan gugatan di PTUN Ambon. Adapun desa yang melakukan gugatan tersebut terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 4 Daftar Jumlah Desa Sengketa di Pilkades Tahap I

Nama Desa	Keterangan
Desa Gala	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Tawabi	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Bisori	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Geti Lama	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Pulau Gala	Sidang PTUN Ambon
Desa Waya	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Matuting Tanjung	Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I
Desa Marabose	Sidang PTUN Ambon
Desa Bori	Sidang PTUN Ambon
Desa Wayaua	Sidang PTUN Ambon

Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel 4 di atas bawah ada sepuluh desa yang dibermasalah sehingga harus diputuskan melalui pengadilan dan tim penyelesaian sengketa Pilkades 2016. Sedangkan desa yang sudah melakukan pelantikan untuk menjalankan tugas pembangunan serta penataan tata kelola, serta manajemen yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, proses pelantikan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan setelah ada putusan yang bersifat mengikat dan tetap untuk dijalankan oleh calon kades pada Pilkades serentak 2016.

Kesimpulan

Pelaksanaan Pilkades serentak 2016 dapat mencapai tujuan akhir, yakni terpilihnya kepala desa melalui proses Pilkades secara langsung. Walaupun banyak berakhir dengan proses hukum pelanggaran pemilu. Pilkades serentak 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai besar terjadi konflik dan diselesaikan melaui proses PTUN di Ambon. Hasil putusan pengeadilan

konflik pilkades dimenangkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Dominasi kekuasaan penyelenggara di Desa Babang yaitu keperpihakan penyelenggara pilkades serta masih mempunyai hubungan darah/keluarga dengan salah satu pasangan.

Konflik pemilihan kepala desa di Babang dan desa Marabose diputusan pada PTUN Ambon untuk dilakukan pemilihan ulang (PSU) untuk memilih Kepala Desa Marabose. Karena Pilakdes akan dilaksanakan pada tahap II dengan pertimbangan efesiensi sehingga diberikan PJS untuk menjalankan roda pemerintah desa. Penyebab konflik karena terjadinya mobilisasi penduduk luar daerah untuk melakukan pencoblosan sehingga memicu konflik kekuasaan di Pilkades serentak 2016.

Peneliti merekomendasi untuk dilakukan aspek lain dari dominasi kuasa yaitu mencoba menganalisis akuntabilitas Pilkades tahap I dan tahap II untuk melihat lebih jauh pertanggungjawaban Pilakdes serentak di Kabupaten Halmahera Selatan. Pada aspek tata kelola pemilihan kepala desa secara serentak yaitu Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pilkades dalam aspek SDM sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal di desa. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk meningkatkan operasional penyelenggaraan Pilkades serentak 2016, berkaitan dengan luas wilayah dan daerah kepulauan sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk mencukupi segala kebutuhan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pendidikan politik untuk memberikan kedewasaan bagi masyarakat dan kandidat untuk menerima segala keputusan yang bersifat terikat.

Daftar Pustaka

- Aron, Raymond (1965). *Main Currents In Sociological Thought II*, Terj. Howard R. dan Weaver H., Anchor.
- Cahyono, Heru , Editor (2005) *Konflik Elit Politik Pedesaan*, Pustaka Pelajar dan LIPI Jakarta.
- Collins, Randall (1975). *Conflict Sociology*, New York Academic Press.
- Eddy Kiswanto, *Pemilihan Kepala Desa; Implementasi Peraturan Daerah di Kecamatan Rembang*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Eldridge J.E.T. (1980) *Max Weber The Interpretation of Social Reality*. Schocken Books New York.
- Edith Kurzwel, (2004) *Jaringan Kuasa Strukturalisme dari Levi Strauss sampai Foucault* (Yogyakarta: Kreasi Wacana)
- Galtung, J. (1988). *Kekerasan, Perdamaian dan Penelitian Perdamaian. Menggapai Dunia Damai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.*
- Hidayat, I. (2009), *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA press.
- Istifarin, I. (2016). *Fenomena Politik Kekerasan Dalam Pilkada Di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Madura* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Hikmat, M. M. (2014). Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Pilkada Langsung di Indonesia. *Mimbar&58; Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 18-27.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/437>
- Jurnal pemberdayaan komunitas*, september 2004, volum 3, nomor 3, hal 171
- Kahar, A., & Qodir, Z. (2016). *Dinamika Etnis Dalam Proses Politik Lokal Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010)*. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(3).
<http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0046>
- Kusnadi (2002). *Konflik Sosial Nelayan*. LKIS Jakarta.
- Lubis, (1998). *Menggapai Dunia Damai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mustain, (2007). *Petani VS Negara; Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

- Moleong, (2001). *Motode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muji Sutrisno, Hendar Putranto (2005) *Teori-Teori Kebudayaan* Penerbit Yogyakarta: Kanisius.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Nur, H. (2016). *Politik dinasti: studi kasus kemenangan dinasti samidin dalam pilkades di desa banjar kec. Kedungdung kab. Sampang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Rohmawati, T. (2013). *Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah*. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 1.
<https://repository.unikom.ac.id/30662/1/bu-tatik-rohma.pdf>
- Solihah, Rofiatu. (2015). *Kyai dan Blater Dalam Masyarakat Madura: Relasi Kekuatan Politik Lokal dalam Pilkades Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates Sampang*. Diss. Uin sunan ampel Surabaya.
- Sanit , A. (1997). *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sri Sudaryatmi, S. dkk. (2000). *Beberapa Aspek Hukum Adat*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Suwandi, S. (2015). *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014: Studi Tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik Uang Di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Turner, Jonathan. (1991). *The Structure of Sociological Theory*, Wardworth Publising Company California.
- Wafii, A. (2013). *Fenomena Premanisme Politik: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Wance, M., & Suranto, S. (2017). *Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah*. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 108-141.
<http://journal.ummy.ac.id/index.php/GPP/article/viewFile/2643/2606>
- Wance, M. (2016). *Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah (Studi Di Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015)*.
<http://repository.ummy.ac.id/handle/123456789/8940>

- Wance, M. (2017). POLITIK ANGGARAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PADA PEMBAHASAN APBD KABUPATEN BURU SELATAN 2015. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2(2), 178-204. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/623/379>
- Wisadirana, D. (2005). *Sosiologi Pedesaan*. Universitas Muhamadiyah Malang : UMM Press.
- Yulianti, Y. dan Purnomo, M. (2003). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Zerunisa, R. (2017). Political marketing kandidat dalam pemilihan kepala desa (pilkades)(studi kasus pilkades desa gentan kecamatan gantiwarno kabupaten klaten). *Adinegara*, 6(1), 100-104.
<http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/adinegara/article/download/8913/8563>
- <http://kabarpulau.com/berita-konflik-pilkades-di-halsel-cukup-memiriskan-.html>. di akses pada Rabu 31 Mei 2017)
- <https://regional.kompas.com/read/2016/11/12/12450391/pemilihan.kepala.desa.serentak.di.halma.hera.selatan.polisi.siagakan.kekuatan.penuh>. di akses pada Rabu 31 Desember 2017)
- <https://ambon.antaranews.com/berita/31890/halmahera-selatan-gelar-186-pilkades-serentak>. di akses pada tanggal 17 Maret 2017

Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milineal dalam Pemilu

Kokom Komariah, Dede Sri Kartini

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran

Jl. Bukit Dago Utara No.25 Bandung 40135 Telp. (022) 2510276

Email: kokom17001@mail.unpad.ac.id

Abstract

Social media nowadays has been crucial part of human being life particularly for the generations those are so called millennial. The massive use of social media is not merely functioned for the social purpose such as information sharing among them but also has been used for business and economic or even political purposes. The local election of the Jawa Barat province in the year of 2018 is a moment where the millennial generation functioned the social media such as facebook and whatsapp for the political purposes. This article discusses the phenomenon of using internet-based social media as an instrument in political communication and campaigning in the local election of West Java Province in 2018 as well as discussing the effectiveness of the media contents in shaping the pattern of millennial generation political behavior. The research adopts a qualitative approach by taking the object of research on political communication, as well as culture and political behavior. The main informants from this study were beginner voters who also categorized as the group of the millennial generation. This study found that social media contents in general became an important instrument in shaping the pattern of political behavior of the millennial generation. The roles of the media for instance are indicated that current life of the millennial generation that cannot be separated from such media, social media contents provides political knowledges about profiles of candidates in local election, social media content provided political education both related to the technical implementation of the election and also the vision and mission of the candidates and, millennial generation have their respective communities which they make as a forum for discussion about the social media contents.

Keywords: *Social Media, Millennial Generation, Local Election*

Abstraksi

Media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat khususnya generasi milineal. Penggunaannya yang begitu massif bukan saja dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial melainkan juga untuk kepentingan ekonomi, bisnis sampai pada kepentingan politik. Pemilu adalah salah satu *moment* politik dimana media sosial khususnya *facebook* dan *whatsapp* untuk kepentingan politik. Artikel ini membahas tentang fenomena penggunaan media sosial berbasis internet sebagai instrumen dalam komunikasi politik dalam kontestasi pemilu di Jawa Barat tahun 2018 serta efektivitas konten media sosial tersebut dalam membentuk pola perilaku politik generasi milineal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi pada Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis. Informan utama dari penelitian ini adalah pemilih pemula yang juga masih tergolong kepada kelompok generasi milineal. Penelitian ini menemukan bahwa media sosial beserta kontennya menjadi instrumen penting dalam membentuk pola perilaku politik generasi milineal. Peran itu antara lain ditunjukkan bahwa generasi milineal saat ini tidak bisa dilepaskan dari media sosial, konten media sosial memberikan pengetahuan politik tentang profil calon dalam kontestasi pemilu, konten media sosial memberikan pendidikan politik baik terkait dengan teknis pelaksanaan pemilu dan juga visi-misi para kandidat, serta, generasi milenial memiliki komunitas yang menjadi wadah untuk berdiskusi terkait konten media sosial itu.

Kata Kunci: *Media Sosial, Generasi Milineal, Pemilu*

<i>Submite</i>	: 18 Desember 2018
<i>Review</i>	: 13 Januari 2019
<i>Accepted</i>	: 03 Maret 2019
<i>Surel Corespondensi</i>	: winda86@gmail.com

Pendahuluan

Internet dan media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya bagi warga kelas ekonomi menengah ke atas dan para generasi muda yang dikategorikan sebagai generasi milenial. Massifnya penggunaan internet dan juga media sosial berbasis internet serta merta telah menggeser peran media-media konvensional atau wadah-wadah sosial yang selama ini masih memiliki peran pokok dalam menyebarkan beragam informasi termasuk pengetahuan bagi warga. Media massa berbasis cetak atau elektronik seperti koran, majalah, radio atau televisi semakin ditinggalkan oleh warga karena beberapa alasan di antaranya media cetak tidak efisien lagi dari segi harga demikian halnya dengan kontennya yang tidak selalu *update* seperti layaknya media berbasis *online*.

Generasi milineal secara sederhana dimaknai sebagai generasi yang terlahir pada tahun 1980-an sampai pada akhir 1990-an (Mannheiml & Kecskemeti, 1955). Generasi ini menjadi bagian atau segmen masyarakat yang paling banyak menggunakan media sosial berbasis internet tersebut. Intensitas generasi milineal ini dalam menggunakan teknologi informasi berbasis internet telah menjadi *trend* sekaligus rutinitas yang terkadang mengambil sebagian besar waktu produktif mereka. Media sosial sebagai salah satu *feature* dalam teknologi informasi berbasis internet tersebut, secara praktis, pada akhirnya sangat efektif untuk dijadikan sebagai media untuk melakukan penyebaran informasi, pengembangan pengetahuan, wadah pertukaran informasi, pengembangan usaha maupun iklan layanan masyarakat dan kampanye politik.

Media sosial berbasis internet yang sering digunakan dan melekat pada kehidupan generasi ini utamanya adalah *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Instagram* dan *Blog*. Media sosial ini secara mudah dan murah dapat diakses melalui telepon genggam dengan fasilitas *android*. Media ini pada satu sisi dapat dimanfaatkan secara positif oleh generasi milineal dalam mengembangkan pengetahuan dan kapabilitasnya pada berbagai sektor kehidupan dan pada sisi yang lain dapat memberikan dampak negatif ketika konten yang ditampilkan tidak mendidik atau

memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat. Konten media sosial yang kita dengar saat ini sudah juga banyak memuat berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*); mengandung unsur negatif seperti pornografi, provokasi berbasis sara, penyebaran paham-paham radikalisme, perjudian sampai pada prositutisi. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, konten media sosial tersebut terkadang sudah mengandung unsur kampanye hitam maupun kampanye negatif terhadap kandidat tertentu. Maraknya penggunaan media sosial dan juga murah biaya akses selanjutnya menempatkan generasi milineal dengan mudah pada dua posisi sesuai pilihan masing-masing yaitu sebagai pengguna (*user*) media sosial dan pada posisi yang lain sebagai pembuat konten berita (*creator*), informasi atau konten media tersebut.

Tingginya intensitas generasi milineal terhadap penggunaan media sosial ini serta merta dilirik oleh aktor-aktor politik sebagai wadah baru yang dengan mudah, murah dan efektif untuk dijadikan sebagai *platform* sekaligus sebagai alat atau sarana komunikasi politik dalam rangka melakukan sosialisasi program politiknya sampai pada kampanye yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Meadow (1985) yang menyatakan bahwa komunikasi politik merujuk kepada segala bentuk pertukaran pesan atau simbol yang memberikan dampak signifikan yang telah ditentukan sebelumnya atau tela memiliki dampak pada sistem politik. Pada perhelatan politik dan demokrasi seperti pemilu, media sosial hadir juga pada dua sisi yang dikotomis tersebut yakni tampil dalam makna positif seperti membangun kesadaran dan partisipasi politik kelompok milenial dan tidak jarang tampil pada makna negatifnya seperti digunakan untuk tujuan menghasut warga *netizen* dengan isu-isu sara maupun penyampaian berita bohong (*hoax*).

Pemilukada Jawa Barat yang telah dilangsungkan pada bulan Juli 2018 tidak terlepas dari fenomena penggunaan media sosial tersebut. Partai politik, pasangan calon, tim kampanye maupun para simpatisan pasangan calon menggunakan media sosial sebagai *platform* untuk melakukan komunikasi politik, menyebarkan informasi kepemiluan, menyampaikan profil calon, visi-misi maupun kampanye program. Dari berbagai konten dalam media sosial tersebut, selain bermakna positif, tidak sedikit yang bermakna negatif seperti unsur provokasi berbasis sara, informasi yang berbau *hoax* maupun kampanye negatif. Kelompok generasi milenial sebagai pengguna utama dari konten-konten tersebut menjadi pihak yang dapat saja menjadi korban dari konten-konten negatif tersebut.

Pemilukada Jawa Barat bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dari konteks kontestasi politik nasional. Hal ini, paling tidak, didasari pada fakta bahwa mayoritas atau jumlah penduduk nasional terbesar dan jumlah pemilih pemilu terbesar terdapat pada provinsi ini. Badan Pusat Statistika (2017) mencatat bahwa persentase jumlah penduduk provinsi ini adalah 18,3% dari total penduduk nasional yang bermakna jumlah pemilih juga berada pada kisaran angka tersebut. Tambahan lagi, bahwa pada pemilu peresiden tahun 2014, pasangan calon presiden Prabowo-Hatta yang akhirnya menjadi oposisi menjadi pemenang dalam kontestasi politik ini dengan persentase kemenangan mendekati 60 % (59,68) (Kompas, 2014). Dalam pemilu tahun 2019, yang dari awal telah mengisyaratkan adanya dua pasangan calon serta kembalinya Prabowo mencalonkan diri, menjadikan kontestasi Pemilukada Jawa Barat menjadi lahan pertarungan “sengit” untuk kembali mempertahankan dukungan rakyat atau bagi presiden *incumbent* untuk merebut suara rakyat yang sebelumnya mendukung kelompok oposisi.

Kajian ini merupakan kajian eksplanatik dan difokuskan untuk mengetahui peranan media sosial sebagai wadah dalam melakukan komunikasi politik serta menganalisis efektifitas konten yang termuat dalam media sosial itu dalam membentuk perilaku politik generasi milineal di Desa Windu Raja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis pada perhelatan Pemilukada Jawa Barat Tahun 2018. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth-interview*) sebagai alat pencari data yang utama. Informan dalam kajian ini adalah pemilih pemula yang masih dikategorikan sebagai generasi milineal yang unsurnya paling tidak didasarkan atas keterwakilan jenis kelamin, tingkat pendidikan, afiliasi terhadap organisasi keagamaan serta okupasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif atau yang lebih mencoba untuk memahami makna, konteks partikular, fenomena dan proses yang berkaitan dengan objek penelitian.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam (*indepth interview*) sebagai instrumen dan teknik pengambilan data (Maxwell, 1996). Penelitian ini antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses tentang konten media sosial dalam proses penyelenggaraan kampanye

dan pemilu. Rumusan masalah difokuskan tentang bagaimana media sosial berbasis internet dijadikan sebagai instrumen dalam kampanye serta bagaimana konten-konten media sosial tersebut dapat memberikan dampak terhadap perilaku politik dalam pemilu.

Informan penelitian terdiri atas 17 informan dan utamanya adalah kelompok pemilih pemula sekaligus generasi milineal yang telah menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi Pemilu Jawa Barat Tahun 2018. Disamping itu, informan penelitian juga terdiri atas tokoh masyarakat dan pemerintahan pada lokasi penelitian. Informan dari kalangan milineal disesuaikan dengan keragaman strata yang paling tidak didasarkan atas jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis okupasi dan terafiliasi-tidaknya informan dengan organisasi kepemudaan, kemahasiswaan atau keagamaan yang ada di wilayah mereka. Untuk melengkapi analisis, informan tambahan dari kalangan akademis yang mengetahui secara umum kondisi sosial politik Jawa Barat turut menjadi informan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi Massa dan Perilaku Politik

Kajian ini mengambil teori besar tentang komunikasi massa dan perilaku politik dalam konteks pemilu atau demokrasi elektoral. Teori komunikasi politik yang diadopsi adalah teori yang dikembangkan oleh D. McQuail (McQuail, 1987). Media sosial memang sedikit berbeda dengan media massa pada umumnya, namun semua media memiliki konsekuensi dan nilai ekonomi serta merupakan objek persaingan untuk memperebutkan kontrol dan akses politik maupun akses ekonomi (McQuail, 1987). Media sosial memang tidak banyak dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi dan media sosial banyak dimanfaatkan untuk tujuan sosial maupun tujuan non ekonomi lainnya. Pada sisi politik media sosial dapat digunakan sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan mempengaruhi pilihan sikap misalnya pada pemilu serta memberikan legitimasi dan membentuk persepsi (McQuail, 1987).

Media termasuk media sosial dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi politik yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintahan. Komunikasi politik dapat ideal dilakukan jika bersamaan dilakukan dengan pemasaran politik yang baik yaitu adanya *product* yang bermutu,

place yang tepat, *price* yang murah atau terjangkau dan *promotion* yang tepat (Cangara, 2016). Pesan-pesan politik tersebut dapat dilakukan melalui media konvensional dalam komunikasi seperti sosialisasi, pertemuan, kampanye maupun media cetak dan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi khususnya dengan kehadiran internet, media sosial menjadi media elektronik yang dapat dijadikan sebagai sarana atau alat dalam melakukan komunikasi politik tersebut.

Kehadiran *feature* media sosial seperti *Facebook* dan *Whatsapp* merupakan sebagian dari *feature* media sosial yang banyak digunakan oleh warga Indonesia secara keseluruhan dan para generasi milineal secara khusus. Dalam kajian komunikasi politik strategi dalam pengemasan pesan dalam kampanye politik sangat penting karena pengemasan pesan akan mengarahkan cara masyarakat memaknainya sehingga pesan-pesan itu harus sesuai dengan isu-isu yang sedang berkembang dalam masyarakat (Yanto, 2014). Jenis pesan dan substansi pesan tersebut selanjutnya disebut dengan konten media.

Konten media sosial dapat mempengaruhi opini publik yang selanjutnya dapat menentukan perilaku politik mereka. Satu dari perdebatan abadi dalam kajian perilaku politik adalah pertanyaan dasar tentang kemampuan politik publik yang menyangkut pengetahuan mereka, pemahaman dan ketertarikan pada masalah-masalah politik (Kligemann & Dalton, 2011). Perilaku politik itu merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik (Surbakti, 1999). Perilaku politik menurut Edikusuma sebagaimana dikutip Solikhah (2014) merupakan tindakan individual atau kelompok dalam aktifitas politik termasuk persepsi, sikap, orientasi, pemberian suara, protes dan lobi. Perilaku politik secara psikologis merupakan bagian dari tingkah laku secara umum dan perilaku ini merupakan gejala yang dapat diamati. Pembahasan perilaku menurut David E. Pater sebagaimana dikutip Mukhlis (2015) bisa terbatas pada perilaku individu dan dapat juga pada komunitas, masyarakat atau entitas yang lebih besar. secara empiris perilaku politik itu merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode (Surbakti, 1999).

Pengetahuan, pemahaman akan politik berikut proses-proses yang ada didalamnya tidak terlepas dari lingkungan di mana masyarakatnya tinggal dan melakukan sosialisasi secara rutin. Dalam konteks Indonesia, budaya politik merupakan realitas yang dianggap paling kuat dan fundamental dalam sistem politik (Gatara & Said, 2007). Terlebih bahwa budaya masyarakat Indonesia khususnya budaya antar etnis yang demikian heterogen dan kompleks dengan fragmensinya menghasilkan heterogenitas etnis dan budaya dan menjadikannya sebagai negara di dunia yang paling plural dengan bahasa paling beragam (Lukas, 2002). Secara umum terdapat 2 (dua) kategori untuk dapat menjelaskan eksistensi budaya politik dalam sebuah entitas negara atau unit pemerintahan yang lebih kecil yaitu konsep budaya politik yang dipahami secara struktural yang melihat budaya politik sebagai fenomena dan konsep budaya politik yang dipandang dalam makna fungsional dan instrumental yang menjadi determinan dalam perilaku memilih (Marijan, 1999). Dengan demikian relasi budaya politik dengan perilaku politik memilih menjadi lebih jelas dalam konteks ini.

Almond dan Verba berpendapat bahwa budaya politik sebagai sikap dan orientasi warga negara terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya termasuk sikap kepada peran warga negara di dalamnya, Almond dan Verba (1984) melihat bentuk orientasi menjadi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif. Sedangkan Mas'ood & MacAndreas menitikberatkan kepada sikap masyarakat terhadap pemerintahan (Mas'ood & MacAndreas, 2000),

Orientasi kognitif menyangkut pengetahuan dan kepercayaan kepada sistem politik, orientasi afektif menyangkut perasaan terhadap sistem politik dan orientasi evaluatif menyangkut keputusan dan pendapat tentang objek politik (Fadil, 2007). Pendapat itu hampir sama dengan pendapat yang memaknai budaya politik sebagai pola perilaku dan orientasi individu atau warga terhadap politik (Kantaprawira, 1985). Dengan kerangka berpikir tersebut, Almond & Verba selanjutnya mengklasifikasikan tiga tipe budaya politik yaitu budaya politik partisipan, budaya politik subjek dan budaya politik parokhial (Mas'ood & MacAndreas, 2000).

Budaya politik partisan merupakan budaya yang intens dan aktif dalam kegiatan politik paling tidak dalam pemilihan (*voting*) dan memiliki informasi politik yang cukup. Budaya masyarakatnya diorientasikan secara nyata dalam semua elemen, proses, sistem, struktur politik maupun birokrasi (Gatara & Said, 2007). Budaya politik subjek dicirikan bahwa orang-orang secara patuh-passif kepada pejabat pemerintah dan aturan namun tidak berpartisipasi dalam

kegiatan politik ataupun memilih dalam pemilu. Budaya parokhial ini dicirikan bahwa warga sama sekali tidak sadar atau menegasikan adanya pemerintahan dan sistem politik dan mengalami proses apriori terhadap persoalan politik dan pada level yang paling ekstrim masyarakat menjadi apolitik (Gatara & Said, 2007).

Media Sosial Sebagai Flatform Pilihan Untuk Komunikasi Kampanye Politik

Kekuatan media sosial sebagai wadah dalam komunikasi politik sebenarnya bukan fenomena baru dalam dunia politik khususnya pada negara yang tingkat literasi dan kesadaran politiknya sangat tinggi. Munculnya tagar atau *hashtag* “*Make America Great Again*” atau “*I am with Her*” adalah contoh konkrit bagai mana media sosial berbasis online menjadi wadah penting dalam melakukan komunikasi politik dan kampanye pada pemilu presiden Amerika tahun 2016 (Cohen, 2016). Pada makna yang negatif, tagar yang lain justru lebih banyak muncul seperti: “*Lock Her Up*”, “*Delete Your Account*”, “*Never Trump*”, “*Crooked Hillary*” dan sebagainya (Cohen, 2016). Untuk kasus Indonesia, hastag semacam itu juga sudah banyak hadir dalam rangkaian pilukada di Indonesia. Pencantuman *hashtag* tersebut adalah tema penanda kampanye yang ditautkan pada berbagai media sosial sehingga tema-tema itu sekaligus menjadi pengingat bagi pemilih ketika akan menjatuhkan pilihannya pada pasangan kandidat tertentu. Dalam konteks pilukada Jawa Barat Tahun 2018, *hashtag* yang sering muncul antara lain *hashtag*: Jawa Barat Juara, Hasanah Menang, 2019 Ganti Presiden, maupun 2DM P4T GULIP4T. Komunikasi politik tidak terlepas dari kampanye sehingga banyak juga ahli yang menganggap bahwa komunikasi politik itu hanya terbatas kepada masa kampanye saja (Gazali, 2004). Asumsi ini pada satu sisi banyak benarnya apalagi dengan penggunaan media berbasis internet telah menjadi kebutuhan harian manusia pada negara-negara maju seperti Amerika dan konten-konten politik menjadi warna paling banyak selama masa kampanye pemilu di negara itu.

Perhelatan politik melalui Pilukada Jawa Barat pada dasarnya tidak lepas dari pertarungan politik secara nasional. Hal itu didasari pada fakta bahwa, Jawa Barat merupakan lumbung suara terbesar dalam pertarungan politik nasional khususnya pada Pemilu Presiden. Dengan persentasi penduduk 18% dari total jumlah penduduk nasional menjadikan Jawa Barat menjadi lahan pertarungan politik yang sengit sejak pemilihan langsung diperkenalkan. Kedua, Jawa Barat berdasarkan hasil Pemilihan Presiden Tahun 2014 menempatkan kelompok oposisi

sebagai pemenang kontestasi sehingga kubu oposisi nasional ingin mempertahankan posisi itu dan pada sisi yang lain kubu petahana ingin merebut suara mayoritas di daerah ini untuk mengamankan posisi sebagai pemenang pada kontestasi Politik tahun 2019. Konteks pemilu pada Jawa Barat melalui komunikasi politik lewat media sosial ini selanjutnya dianggap sebagian kontestan sebagai satu langkah dalam mewarnai perubahan sistem politik secara nasional ke depan melalui pergantian pimpinan nasional jika salah satu pasangan calon bisa memenangkan kontestasi. Hal ini sekaligus mengkonfirmasi pendapat yang menyatakan bahwa “*political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the political system*” (Meadow, 1985). Pendapat yang lain menganggap bahwa komunikasi politik tersebut tidak terlepas dari perlunya strategi yang merupakan keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan (Ardial, 2010)

Potret pertarungan politik tersebut mengharuskan kedua pihak atau paling tidak kelompok partai politik yang terafiliasi pada dua kubu dikotomis itu melakukan strategi politik untuk memenangkan kontestasi termasuk strategi kampanye. Semua saluran dan *platform* yang dapat digunakan untuk meraih dukungan dari pemilih digunakan para masing-masing kandidat dalam kontestasi termasuk didalamnya melalui media sosial. Pemilih pemula atau generasi yang dikategorikan sebagai pemilih milenial tidak luput dari *trend* nasional yang menggunakan media sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan termasuk menggunakan media tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang politik. Pemilih pemula dalam lokasi penelitian ini menggunakan media sosial *Facebook* dan *Whatsapp*, sebagaimana menu itu merupakan aplikasi khusus yang dapat disajikan terpisah dalam konten smartphone atau komputer menjadi media sosial utama. Media sosial lain seperti *twitter*, *instagram* maupun *blog* jarang menjadi pilihan generasi milenial di lokasi penelitian ini.

Alasan penggunaan *Facebook* dan *Whatsapp* sebagai media sosial utama tidak lepas dari kemudahan secara teknis untuk menggunakan aplikasi ini disamping banyaknya *netizen* pengguna kedua aplikasi ini. Tentunya akan berbeda jika pilihan media sosial yang digunakan adalah *Twitter* atau *Blog*. Aplikasi *twitter* seperti disampaikan para informan tidak menarik seperti sedikitnya konten tulisan yang bisa ditampilkan pada status atau sulitnya menampilkan gambar-gambar kreatif melalui aplikasi ini. Kalau menggunakan aplikasi *blog*, hal ini akan lebih

rumit, disamping harus paham tentang penataan *layout blog* juga harus mengetahui rumus-rumus bahasa komputer untuk membuat tulisan-tulisan bergerak dan animasi. Parahnya lagi, tidak semua aplikasi *blog* itu dapat diakses atau dibuat akun secara gratis melainkan membayar mengikuti periode tertentu sehingga para generasi milineal menganggapnya tidak efisien.

Pada pemilu karda Jawa Barat Tahun 2018 para kandidat dan juga relawan yang terafiliasi dengan pasang calon kepala daerah, semuanya menggunakan media sosial *facebook* maupun *whatsapp* dalam melakukan kampanye politiknya. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pasangan nomor urut 1 (Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum) misalnya menggunakan akun *facebook* dengan nama Relawan Jabar Juara. Pasangan nomor urut 2 (Hasanuddin dan Anton Charliyan) melalui akun *facebook* Relawan Hasanah. Pasangan nomor urut 3 (Sudrajat dan Ahmad Syaikh) dengan akun *facebook* Pendukung Sudrajat Syaiku-Asyik dan Pasangan nomor urut 4 (Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi) dengan akun *facebook* Dukung 2DM P4T GULIP4T.

Gambar 1. Laman *Facebook* Pendukung Calon Gubernur Pemilu karda Jawa Barat 2018



Sumber diolah dari <https://www.facebook.com>

Konten yang ada pada akun media sosial *facebook* di atas memuat tentang visi-misi para pasangan calon, program, profil maupun kegiatan harian yang dilakukan para pasangan calon pada masa kampanye maupun di luar masa kampanye. Terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu, konten yang disajikan juga memuat informasi tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilu dan rekrutmen tenaga penyelenggara pemilu. Selain itu, konten akun tersebut juga memuat peraturan dan teknis pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi pemilu. Namun, sebagai bagian dari kampanye politik, konten yang umum dan dominan yang ditampilkan adalah visi-misi, program maupun kebijakan yang akan dilakukan oleh pasangan calon jika nantinya mereka kelak akan menjawab sebagai kepala dan wakil kepala daerah.

Teori-teori komunikasi politik yang dikembangkan oleh ahli (McQuail, 1994) pengaruh konten media yang ditampilkan selalu dikaitkan dengan dampak dan pengaruh terhadap masyarakat penerima informasi yang ditampilkan oleh media. Dampak dan pengaruh konten media sosial tentang konten media yang dibuat melalui *facebook* maupun *whatsapp* seperti disampaikan di atas pada kajian ini memang tidak diukur secara kuantitatif melainkan pada aspek kualitatifnya. Dampak yang jelas terjadi antara lain menguatnya keyakinan generasi milenial untuk memilih pasangan calon yang menjadi pilihannya dan pengaruhnya sangat besar bagi perolehan suara pasangan calon dalam perhitungan akhir pemilu. Hal ini seperti disampaikan oleh informan dari unsur penyelenggara pemilu melihat *trend* pergerakan tingkat elektabilitas pasangan calon seperti pasangan Sudarajat Syaikhul yang bergerak dari angka elektabilitas yang rendah menjadi peraih suara terbesar kedua dalam perhitungan suara akhir pemilu (Herman, wawancara, Oktober 2018). Pergerakan signifikan tersebut salah satunya disebabkan oleh kecerdasan tim kampanye pasangan calon dalam mengusung tema pergantian pimpinan nasional. Menyardingkan kondisi Jawa Barat dengan kondisi Indonesia secara keseluruhan yang dinilai oposisi selalu gagal dalam menjalankan janji kampanyenya menyebabkan adanya dampak dan pengaruh signifikan dalam peta konstelasi pemilu.

Persepsi Terhadap Konten Media Sosial

Platform media sosial yang digunakan oleh mayoritas generasi milenial di lokasi penelitian ini adalah *facebook* dan *whatsapp*. Konten media sosial yang ada pada kedua aplikasi itu secara tidak langsung berpengaruh pada perilaku politik mereka. Perilaku politik meliputi

tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya (Surbakti, 1999). Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Konten media sosial yang mereka terima ditanggapi secara beragam oleh informan. Pada level partisipasi politik yang paling rendah, mereka menganggap bahwa konten media sosial dalam *moment* pilkada adalah hal yang biasa dan menganggap tidak banyak berpengaruh terhadap perilaku politik warga dalam pemilu. Mereka menganggap bahwa hal yang paling potensial untuk bisa dijadikan modal dalam memenangi pertarungan tetap dengan menggunakan politik uang (Siti Awaliah, wawancara, Oktober 2018). karena masyarakat pada saat ini lebih banyak dihadapkan pada permasalahan sulitnya ekonomi dan tingginya biaya hidup yang harus ditanggung masing-masing keluarga saat ini. Informan ini menyampaikan bahwa media sosial itu walaupun berpengaruh, pengaruhnya sangat kecil dalam mempengaruhi hak pilih warga.

Pada level partisipasi menengah, kelompok milineal ini menganggap bahwa bagaimanapun konten media sosial terkait dengan penyelenggaraan pemilukada Jawa Barat dapat dilihat pada dua sisi. Pertama, konten itu ternyata memberikan banyak pengetahuan seperti tentang profil pasangan calon sendiri, kinerjanya serta visi-misinya ke depan. Konten ini paling tidak dapat menjadi semacam pengantar bagi generasi milineal untuk mengenali para calon yang bertarung dalam kontestasi pilkada. Kedua, konten media sosial itu ternyata juga membawa dampak negatif seperti adanya unsur SARA yang diangkat, menjelekkan atau bahkan cenderung bermakna fitnah bagi pasangan calon tertentu. Dengan kondisi ini kalau tidak ada semacam *filter* maka konten itu justru dapat membawa kerusakan yang lebih berat dalam tatanan sosial kemasyarakatan kita (Opik Taofik, wawancara, Oktober 2018). Pendapat informan ini tentunya sejalan dengan Almond dan Verba (1984) tentang melihat adanya bentuk orientasi tertentu dalam budaya politik baik pada tingkat kognitif, afeksi maupun evaluasi dalam melihat konten-konten yang ada pada media sosial berbasis online tersebut.

Pada level partisipasi politik yang paling tinggi atau sering juga disebut budaya politik partisipatif, mereka menganggap bahwa bagaimanapun pada dunia yang sudah berubah di mana teknologi berbasis internet sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia dan masyarakat maka *platform* itu sangat penting untuk digunakan. Tentunya penyebaran informasi dan

pengetahuan politik lewat media sosial sangat murah dan penggunaanya adalah para pemilih-pemilih potensial dalam makna bahwa mereka juga akan menjadi pemilih pada pemilu-pemilu selanjutnya. Konten media sosial mereka lihat lebih banyak manfaat positifnya dari pada makna negatifnya. Mereka berkesimpulan bahwa saat ini orang tidak sembarangan lagi membuat konten politik yang tidak benar melalui media sosial. Di samping sudah ada aturan hukum yang mengaturnya juga karena masyarakat Indonesia sudah mulai cerdas memaknai politik dan tidak serta merta konten yang ada tersebut mereka anggap benar seluruhnya (Yoga, wawancara, Oktober 2018).

Informan lainnya, yaitu tokoh pemerintah desa yang menjadi informan dari penelitian ini menyatakan bahwa media sosial sangat efektif dalam memberikan edukasi dan kampanye politik kepada generasi milenial terlepas apakah konten media tersebut mengandung unsur *hoax* atau tidak (Mia Melinda, wawancara, Oktober 2018). Informan ini menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu atau bahkan para tim kampanye pasangan calon sudah jarang terjadi seperti layaknya pada masa orde baru yang hampir kegiatan kampanye digelar pada setiap kecamatan atau terkadang sampai pada desa-desa. Hal itu tidak dapat dilakukan lagi sekarang ini, disamping karena waktu pelaksanaan kampanye tatap muka sudah sangat terbatas, juga karena biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kampanye itu tidak sedikit. Untuk menutupi hal tersebut maka kampanye melalui media sosial itu adalah sarana yang paling tepat untuk dilakukan. Media sosial bagaimanapun turut memberikan pengetahuan baru, pengalaman baru dan pendidikan politik bagi warga sehingga posisinya sangat strategis.

Jika dilihat dari konten yang ada pada media sosial khususnya *facebook* maupun *instagram* yang dibuat oleh tim kampanye atau relawan pasangan calon ada sedikit perbedaan dalam membuat konten. Konten yang ditampilkan oleh tim kampanye isinya selalu normatif dalam makna tidak ada kecenderungan untuk mengusung tema-tema yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) demikian juga dengan kampanye negatif, hujatan dan kebencian pada pasangan lainnya. Sedangkan konten yang dibuat oleh relawan tidak jarang dibuat seolah-olah menyanjung pasangan calon atau melebih-lebihkan pasangan calon sekaligus memberikan hujatan pada pasangan lainnya. Selain tampilan yang seperti itu, komentar dan *feedback* yang dilakukan oleh follower juga akan berbeda dibandingkan dengan akun yang

langsung dibuat oleh tim kampanye pasangan calon dibandingkan dengan akun yang dibuat oleh relawan pasangan calon.

Komentar dan *feedback* pada akun yang dibuat oleh tim kampanye pasangan calon cenderung lebih sopan, beretika sekaligus memberikan pendidikan politik pada warga. Sedangkan komentar dan *feedback* yang diberikan oleh *follower* akun relawan tidak jarang dijumpai kalimat-kalimat yang bernada menghina, menghujat, ujaran kebencian (*hate speech*) atau bahkan cenderung merendahkan pasangan calon yang lain. Kecenderungan seperti sekaligus disimpulkan bahwa proses seleksi dan juga kehati-hatian yang ditunjukkan para pengelola akun berbeda antara akun yang dikelola langsung oleh tim kampanye dengan relawan. Proses seleksi dan verifikasi akun yang dimuat lebih ketat dilakukan pada akun yang dibuat oleh tim kampanye dibandingkan dengan akun yang dibuat oleh relawan.

Informan ini selanjutnya berkeyakinan bahwa jika ingin memenangkan pertarungan pada kontestasi pemilu sekarang ini maka kuasailah media khususnya media sosial. Menguasai media sosial tentunya bukan bermakna bahwa para kandidat harus memiliki aplikasi khusus dalam internet yang diperlakukan sebagai media sosial melainkan tim kampanye kandidat tersebut menggunakan media sosial itu pada tingkat intensitas yang tinggi, kreatif dan pandai mengangkat isu-isu pokok yang menjadi perhatian masyarakat serta menggambarkan solusi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi segala isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

Sikap dan Keyakinan Terhadap Muatan Media Sosial

Sikap politik adalah merupakan hubungan atau pertalian di antara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Peristiwa atau kejadian politik secara umum maupun yang menimpa pada individu atau kelompok masyarakat, baik yang menyangkut sistem politik atau ketidak stabilan politik, janji politik dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang tidak pernah ditepati dapat mempengaruhi perilaku politik masyarakat (Surbakti, 1999).

Pemilukada Jawa Barat menarik diteliti karena Gubernur petahana dianggap sebagai salah satu kepala daerah yang paling berhasil di Indonesia. Gambaran prestasi gemilang petahana

selalu dijadikan barometer bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah pada tahun 2018. Pasangan calon yang ditampilkan pun berasal dari kalangan beragam profesi dan latar belakang yang berbeda. Namun, hampir semuanya dapat dikategorikan sebagai para kader terbaik bangsa yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi dan kemajuan bersama. Beragam sikap ditampilkan oleh informan dalam penelitian ini. Mayoritas informan melihat bahwa konten media sosial terkait dengan kampanye Pemilukada melihat bahwa tidak semua konten yang ditampilkan tersebut bermakna positif sehingga tidak layak untuk diteruskan kepada teman atau khalayak. Oleh karenanya diperlukan proses penyaringan dan pencermatan terhadap konten-konten tersebut.

Para generasi milineal dalam menyikapi konten media sosial yang ada melihat bahwa tema-tema kampanye banyak yang memuat hal positif yang dapat diambil dari konten media sosial yang ditampilkan. Pemuatan profil para pasangan calon beserta kinerjanya selama ini memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat umum tentang layak tidaknya seorang calon untuk dipilih menjadi kepala daerah. Tema seperti ini penting bagi pemilih pemula yang belum banyak mengetahui latar belakang dan kinerja pasangan calon sebelumnya. Pada konten seperti ini, beberapa informan menyampaikan bahwa tidak jarang mereka lakukan *feedback* dengan memberikan tanggapan *like* atau turut membagikan konten seperti pada *facebook* atau *whatsapp* mereka. Pada bahagian lainnya, informan yang menjadi relawan pasangan calon turut juga melakukan modifikasi atas konten seperti ini seperti memperbaiki tampilan gambar sehingga lebih baik dilihat oleh para *follower* atau teman-teman para relawan.

Para pasangan calon, tim kampanye pasangan calon serta relawan pasangan calon pada sisi yang lain mengusung tema-tema pokok yang menjadi prioritas pasangan calon jika nantinya mereka menang dalam kontestasi pemilukada ini. Pasangan nomor urut 1 (Ridwan Kamil & Uu Ruzhanul Ulum) mengusung tema tentang perlunya dilakukan pemekaran daerah pada beberapa daerah yang dianggap sudah layak untuk dimekarkan, program pemberian kredit bagi usaha rakyat serta program memangkas kesenjangan antara desa dan kota yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat. Pasangan nomor urut II (TB Hasanuddin & Anton Charliyan) mengusung tema pokok tentang strategi kerja “sangkurang” yakni bekerja dengan cepat atau membangun sesuatu dengan cepat serta melakukan sinergi dengan semua *stakeholder* untuk membangun Jawa Barat. Pasangan nomor urut III (Ahmad Syaikh & Sudrajat) mengusung tema yang lebih besar dari

sekedar pemilihan gubernur Jawa Barat yaitu tentang perlunya pergantian pimpinan nasional pada pemilu tahun 2019. Pasangan nomor urut IV (Dedi Miswar & Dedi Mulyadi) mengusung tema tentang reformasi birokrasi serta penataan ruang dan kawasan.

Orientasi dan Tindakan Terhadap Muatan Media Sosial

Tindakan yang ditampilkan oleh generasi milineal dalam penggunaan media sosial mayoritasnya dibagi atas tiga tingkatan sesuai dengan tingkatan budaya politik juga. Tingkatan pertama adalah mereka yang apatis dalam makna sama sekali tidak peduli dengan segala bentuk konten media sosial terkait dengan kampanye pemilukada. Tingkatan kedua adalah para pemilih yang dilabeli dengan budaya subjek yang bermakna bahwa konten tersebut sekedar dibaca dan tidak ada kecenderungan untuk membagi apalagi membuat atau memodifikasi konten media sosial yang diperolehnya. Pada tingkatan terakhir, yaitu tindakan paling tinggi atau budaya politik partisipatoris dimana para pemilih bukan hanya membaca dan memahami konten media sosial, tetapi juga turut membuat, memodifikasi dan menyebarkan konten berita tersebut.

Secara teoritik terdapat 3 (tiga) tingkatan orientasi seseroang dalam budaya dan perilaku politik yaitu pada aspek kognitif, afektif dan evaluatif (Almond & Verba, 1984). Orientasi kognitif menyangkut pengetahuan dan kepercayaan kepada sistem politik, orientasi afektif menyangkut perasaan terhadap sistem politik dan orientasi evaluatif menyangkut keputusan dan pendapat tentang objek politik (Fadil, 2007). Pada level kognitif, informan melihat bahwa konten-konten yang ditampilkan oleh media sosial memiliki makna yang beragam mulai dari masalah pencitraan, membangun image, tindakan melebih-lebihkan pasangan tertentu maupun justru mencoba untuk mengekspose kelemahan, keburukan atau kekurangan pasangan calon lain. Dengan gambaran seperti itu, beberapa pemilih menganggap bahwa konten media sosial yang ada tidak lebih dari pertarungan wacana tanpa membahas lebih dalam atau menampilkan topik-topik yang lebih substantif (Euis Ristiani, wawancara, Oktober 2018).

Generasi milineal dengan partisipasi politik paling rendah tidak terlalu peduli dengan konten media sosial yang ada atau sama sekali tidak ingin mengetahui apa *trend* politik yang sedang berkembang dalam konteks pemilukada Jawa Barat. Mereka berpikir bahwa masih banyak urusan yang lebih penting dikerjakan atau dibahas selain urusan-urusan politik. Urusan politik sudah ada ahlinya dan generasi muda akan lebih baik fokus pada apa yang mereka

kerjakan sekarang seperti menimba ilmu atau bekerja bagi yang sudah bekerja (Dede Maesaroh, wawancara, Oktober 2018). Menurut informan ini bahwa rakyat juga tidak terlalu pusing dengan urusan politik tersebut karena bagi mereka urusan ekonomi khususnya memberikan nafkah kepada keluarga jauh lebih penting dari urusan-urusan politik itu. Dampaknya adalah, generasi milineal pada kategori ini tidak melakukan apa-apa sehubungan dengan adanya konten kampanye politik dalam media sosial yang dikirimkan melalui akun media sosial mereka. Afeksi semacam ini tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman yang disaksikan oleh para generasi milineal pada perhelatan pemilu-pemilu sebelumnya sehingga perasaan yang timbul dari mereka terkadang lebih memandang perhelatan pemilu tidaklah menjadi pembahasan penting yang harus menjadi perhatian generasi muda dan masyarakat Indonesia (Revi Febrian, wawancara, Oktober 2018).

Generasi milineal dengan partisipasi politik menengah atau subjek menganggap bahwa konten media sosial terkait kampanye politik dalam Pemilu 2017 Jawa Barat umumnya bernilai positif sehingga tidak jarang mereka berikan tanggapan dengan memberikan tanda suka atau *like* pada konten yang mereka terima. Mereka juga mencerna konten yang ada pada media sosial tersebut sehingga tidak semua konten yang masuk mereka anggap benar sehingga konten yang masuk tersebut dibiarkan saja tanpa memberikan tanggapan terhadap konten tersebut. Mereka umumnya berprinsip bahwa kehadiran konten media sosial itu terkadang membuka mata dan hati mereka tentang kinerja dan orientasi isu yang dibawa oleh pasangan calon. Salah satu pasangan calon, misalnya mengusung program membangun desa karena kesenjangan antara daerah *urban* dan *rural* begitu kentara sehingga visi misi tersebut dinilai dapat menarik hati para pemilih untuk memilih pasangan tersebut. Pasangan calon lainnya misalnya mengusung tentang pergantian pimpinan nasional yang ternyata cukup efektif dalam meraih suara. Kondisi ini serta merta orientasi pada tingkat evaluatif seperti disampaikan (Fadil, 2007) telah dilakukan generasi milineal dalam konteks pemilu 2017 ini.

Pada tingkatan yang terakhir, kategori informan dibagi dua yaitu aktif dalam makna independen dan aktif pada makna partisipan. Aktif secara independen adalah mereka yang melakukan penyebaran konten kampanye dari media sosial secara berimbang dan tidak didasari atas kepentingan mereka untuk “menjagokan” salah satu pasangan calon dalam kontestasi itu. Sedangkan pada kategori kedua adalah partisipan yang sifatnya pragmatis yaitu mereka yang melakukan penyebaran konten media jika hanya konten tersebut secara politik menguntungkan

pasangan calon yang didukungnya. Dalam konteks komunikasi politik seperti disampaikan McQuail (Pawito, 2009) bahwa apa yang dilakukan sebagian generasi milineal ini merupakan tidakan lanjutan dari komunikasi politik yaitu proses penyampaian informasi termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan, pertukaran dan pencarian tentang semua itu yang dilakukan oleh para partisipan dalam konteks kegiatan politik.

Kesimpulan

Perhelatan Pemilukada Jawa Barat telah diselenggarakan dan menempatkan pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode 2018-2023. Kemenangan tersebut didasari oleh banyak faktor dan salah satunya tidak terlepas dari peranan komunikasi politik melalui pemanfaatan media sosial. Pasangan lain juga memperoleh keuntungan elektoral dalam pemanfaatan media sosial ini dengan pengambilan tema yang tepat dalam konteks politik nasional kontemporer. Perolehan suara signifikan pasangan Sudrajat dan Syaikhul dengan elektabilitas rendah pada awal tahapan kontestasi terbukti mampu menempati peringkat kedua pada perhitungan suara akhir. Hal ini mengkonfirmasi pendapat D. McQuail tentang pentingnya media massa termasuk didalamnya media sosial sebagai instrumen utama dalam komunikasi politik (McQuail, 1994) .

Intensnya penggunaan media sosial di kalangan generasi milineal pada sisi yang lain sejalan dengan tipe budaya politik mereka dan budaya politik masyarakat Indonesia secara umum. Generasi milineal dengan karakteristik budaya politik yang dominan apatis atau parokhial ternyata tidak serta merta sejalan dengan pola perilaku politik mereka dalam kontestasi pemilu ini. Generasi milineal dengan penggunaan media sosial yang intens cenderung berpartisipasi secara politik dengan memanfaatkan media sosial menjadi katalisator untuk berpartisipasi dalam politik. Media sosial beserta kontennya dijadikan sebagai *platform* dalam membentuk persepsi politik, kepercayaan, sikap dan tindakan kalangan generasi milineal dalam menentukan pilihan, memberikan rekomendasi dan mengajak orang lain bagi untuk memilih pasangan calon yang mereka sukai atau mereka usung. Namun demikian, budaya politik generasi milinial yang mayoritasnya sudah intens dengan penggunaan media sosial tetap memiliki keragaman karakteristik budaya politik baik partisan, subjektif dan parokhial. Gambaran ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa perbedaan budaya politik di kalangan generasi milineal sekalipun

mereka menggunakan media sosial *online* tetap sejalan dengan kategorisasi budaya politik (Almond & Verba, 1984).

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. & Verba, Sidney (1984). *Budaya Politik: Tingkahlaku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (terjemahan). Jakarta: Bina Aksara.
- Ardial (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Indeks
- BPS (Badan Pusat Statistika) (2017). *Jawa Barat dalam Angka*, Bandung: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat.
- Cangara, Hafied (2016). *Komunikasi Politik, Teori dan Strategi*, Depok: Rajawali Press.
- Cohen, Michael (2016). “*Top Political Hashtags of 2016*” Berita 19 September 2016. Diakses 7 Oktober 2018 pada <https://medium.com/soapbox-dc/nine-hashtags-that-are-driving-the-2016-presidential-election-b1ce248bf703>
- Fadil, Muhammad (2007). *Konflik Daerah sebagai Budaya Politik Masyarakat*. Jurnal Madani, II (2007), 21-27.
- Gatara, Said AA & Said, Moh. Dzulkiah (2007). *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gazali, Effendi (2004). *Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu, 8 (I) Volume 8, 53 –74.
- Kantaprawira, Rusadi (1985). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Kompas (2014) “*Ini Hasil Rekapitulasi Pemilu Presiden di 33 Propinsi*” Berita 22 Juli 2014. Diakses 16 Oktober 2018 pada www.kompas.com/hasil-rekapitulasi-pemilu-presiden-di-propinsi-jawa-barat
- Laman Facebook “Dukung 2DM P4T GULIP4T”
https://www.facebook.com/groups/1806111156336567/?epa=SEARCH_BOX
- Laman Facebook “Jabar Juara” <https://www.facebook.com/jabarjuara1/>
- Lukas, Helmut (2002). *The Perception of Indonesia’s History and Culture by Western Historian and Social Scientists*. A Seminar Paper of the Indonesia’s Cultural Diversity in Times of Global Change (pp.1-10). Brussel, Belgium.
- Mannheim, Karl & Kecskemeti, Paul (1955). *Essay on Sociology and Social Psychology*. Journal of Philosophy, 52 (17), 468-472

- Marijan, Kacun (1999). *"The Study of Political Culture in Indonesia"*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, XII (2), 57-66.
- Mas'ood, Mochtar & MacAndreas, Colin (2000). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Maxwell, J. A. (1996) *Qualitative Research Design: An Interactive Approach* .Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc
- McQuail, D. (1987). *Mass Communication Theory: An Introduction (3'd ed.)*. Edisi Bahasa Indonesia, Teori Komunikasi Massa. Alih bahasa, Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Jakarta: Erlangga.
- McQuail, D. (1994). *Mass Communication Theory: An Introduction (3'd ed.)*. London: Sage.
- Meadow, Robert G (1985). *Political Communication Research in the 1980s: An Essay Review*, Journal of Communication, 35 (1), 157-173.
- Mukhlis (2015). Perilaku Politik Elit Keagamaan dalam Politik Lokal. Jurnal SALAM, 18 (1), 1-183.
- Pawito (2009). *Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan*.Yogyakarta: Jelasutra.
- Russell J. Dalton & Hans-Dieter Klingemann (2011). *The Oxford Handbook of Political Behavior*, Oxford: Oxford University Press.
- Sholikhah, Amirotnun (2014). Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi pada Masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap). Jurnal Komunika, 8 (1), 79-97.
- Surbakti, Ramlan (1999). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo
- Yanto (2014) Strategi Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif *Incumbent* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Partai Golkar Di Kabupaten Mukomuko). Jurnal Professional FIS UNIVED, 1 (2), 61-72.

Communication Within and Among Faith-Based Organizations in Community Empowerment Program

Hadiyanto A. Rachim, Nunung Nurwati dan Gigin G. K. Basar

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Padjajaran

Jl. Bukit Dago Utara No.25 Bandung 40135 Telp. (022) 2510276

Email: hadiyantoarachim@unpad.ac.id, nunung.nurwati@unpad.ac.id, gigin@unpad.ac.id

Abstract

The issue of this research is concerning the communication within and among Zakat Management Organizations (OPZs) as Faith-Based Organization (FBO). The main research problem is how OPZ(s) can successfully develop cooperation in increasing both public trust and institutional productivity. Interpretive Approach through Social Construction Theory was used as a reference to see the process of organizational communication through OPZ's communicator ethos. The research method used was qualitative with a technique of case study, and informants were from OPZ's West Java unit. The results showed that the communicator ethos as a source of credibility in communication within and among OPZs, derived from Islamic Teachings, applicable (positive) laws, and basic guidelines of OPZs, can produce organizational values as the basis of implementing cooperation in community empowerment programs. Cooperation among OPZs in an empowerment program is more related to personal power and interpersonal power aspect than to political power aspect. There is a need to strengthen openness and mutual trust values among the OPZs, changes in zakat regulation, more transparent, accountable and equitable governance in order to increase trust, realization of zakat potentials, and prosperity.

Keywords: *Communication, FBO, Communicator Ethos, and Empowerment*

<i>Submit</i>	: 26 Januari 2018
<i>Review</i>	: 27 November 2018
<i>Accepted</i>	: 05 Maret 2019
<i>Surel Correspondensi</i>	: winda86@gmail.com

Introduction

Some studies of zakat management by zakat organizers can hopefully optimize zakat proceeds and particularly suggest how zakat may empower beneficiaries in conformity with Islamic Laws (Siena, 2005; Mintarti, Kurniadi, and Utomo, 2009; Guasfahmi, 2009; Sari, 2013). On the other side, zakat management by Zakat Management Organization (*Organisasi Pengelola Zakat*—OPZ) is aimed at increasing *muzaki*'s trust to OPZs and in turn enhancing both the

performance of OPZ services and OPZ governance in improving efficiency, effectiveness, transparency, and accountability (Fauzia, 2013).

The present research dealt with how OPZs can simultaneously build public trust and optimize their management. It will be seen from OPZ side through its communicator ethos in developing cooperation in community empowerment programs. This is why it needs to conduct, as a *research gap* of earlier researches. The issue of OPZ's communication by communicator ethos has come to be a social welfare issue because its concept is applied by Social Work (International Federation of Social Workers (IFSW)); stating that social work is a human-helping profession by service program, human-environment interactions, utilization of human capacities for social functionality, accomplishment of social roles, realization of aspirations according to their values as a form of social changes and empowerment.

The *zakat* potentials are actually large enough at national level, around Rp217 trillion or 3.14 percent of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP), of which only approximately 1 percent was realized (Baznas, 2011). West Java Province possesses the largest potential, Rp17 trillion in 2015, of which only 0.02 percent was realized (West Java Zakat revitalization, 2016). Meanwhile, policies on zakat management, studies of governance, utilization and empowerment of zakat, and maintenance of trust to transparent and accountable OPZs failed to increase the realization of the quite large potentials.

Based on the existing phenomena and *research gap*, the study of communication among OPZ organizations by communicator ethos would complement earlier studies. The questions dealt with in the present research were as follows:

- 1) How OPZ's communicator ethos may become a source of values in developing cooperation within and among OPZs in community empowerment program?
- 2) What is the organizational communication model that OPZs employ in developing cooperation in community empowerment program?

The objectives of the present research were:

- 1) To describe and analyze the sources of OPZs' communicator ethos in West Java as a communicational strategy of organization in developing cooperation in implementing community empowerment program.

- 2) To describe and analyze the communication within and among organizations in forms of organizational culture and organizational leadership of zakat organizers in West Java in developing cooperation in implementing community empowerment program.

Method

The research design used was descriptive with a qualitative method using an interpretive social science approach as suggested by Neuman (2002, p. 70), where the researchers endeavoured to comprehend the meanings connecting to the communication within and among OPZ organizations by engaging informants from West Java Baznas and *Lazis Dewan Dakwah* in developing cooperation in implementing community empowerment programs. The researchers then managed to interpret the data and fact so as to acquire an understanding of the whole object to investigate in relation to the communication within and among OPZs by OPZ's communicator ethos in implementing community empowerment program in West Java.

Results and Discussion

General Condition of Zakat Management in West Java

Based on the general description of social-economic and cultural conditions of West Java's community, strengthening the optimization process relating to zakat is of high significance, in the hope that zakat potentials in West Java could be better utilized for public welfare. Such significance is based on at least some factors, namely:

- 1) The number of Moslems is a vast majority, achieving 97 percent of the total population or 47 million persons in total (BPS, 2010); thus, it is very logical that West Java's people are religious and of strong faith in God, and that they are very measured in cultivating their awareness of accomplishing their duties, as Moslems, to pay zakat;
- 2) In economic sector, processed industry and trade account for more than 60 percent (BPS, 2010), so that it may be a parameter in exploiting the sources of zakat from the sector, and also the welfare level of West Java Province, which is relatively higher as seen from the difference between their income per capita and revenues for consumption per year;

- 3) The distribution of population with high levels of economy and above-average economic status, as in the buffer zones of Jakarta and Great Bandung, reaches 44 percent (BPS, 2010), so that its contribution is very significant to increasing zakat revenues.

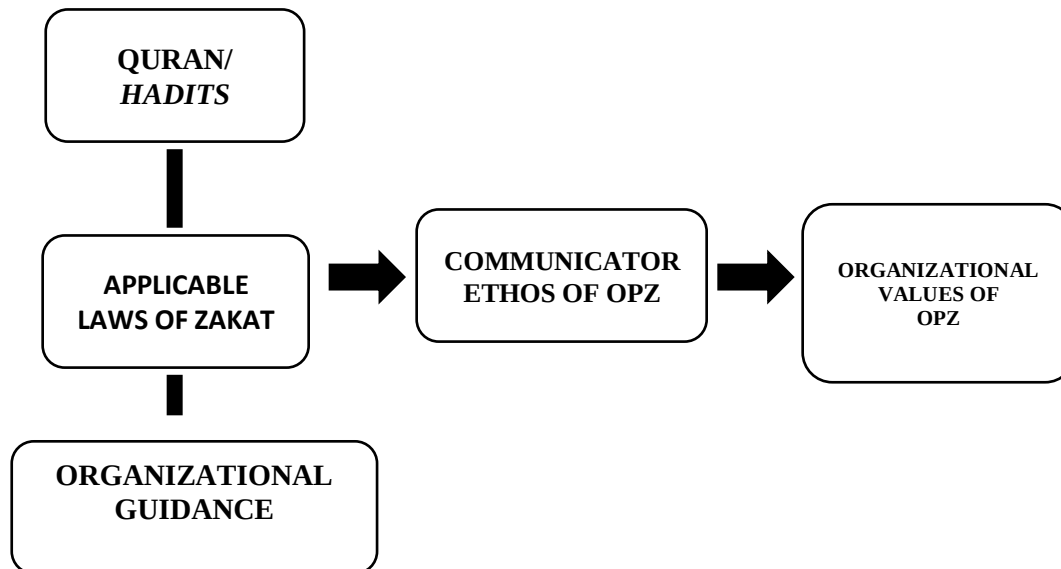
Meanwhile, in the implementation of zakat management in West Java, it was revealed that West Java possessed the highest level of zakat sources, i.e., 17 trillion rupiah in 2015, of which 282 billion was realized (West Java Zakat Revitalization, 2016).

According to West Java government's official website, of 27 municipalities and regencies, only 13 municipalities/regencies that have been officially acknowledged as zakat organizers. It is because the rest has not yet had a legal umbrella, decree of regent or mayor as a minimum, which regulates zakat management at regional level (West Java Zakat Revitalization, 2016). Moreover, according to West Java Province BAZNAS data on the existence of other institutions, there are 20 national-level *Lembaga Amil Zakats* (LAZs) operating in West Java jurisdiction, some of which are officially acknowledged by the government, namely: LAZ *Rumah Zakat Indonesia*, LAZ *Persis*, and LAZ *Dompot Peduli Umat Darut Tauhid*. Another LAZs are affiliated to national-level organizations that are operating in West Java, among others: LAZIS *Muhammadiyah*, LAZ *NU*, and LAZIS *Dewan Da'wah*.

The Communicator Ethos of West Java BAZNAS OPZs and LAZIS Dewan Dakwah

Based on the research results, the communication within an organization by the sources of communicator ethos has produced organizational values which in turn affect cooperation in implementing community empowerment program, as shown on the chart below:

Picture 1 The Communicator Ethos of West Java BAZNAS OPZs and LAZIS Dewan Dakwah



Source: processed from research results

According to the figure above, the communicational processes that take place within an organization and among organizations are strongly affected by the communicator ethos of each organization's management, where communicator ethos has been possessed by individuals in their own organization when they joined the organization, relating to their understanding on both Islam religion in general and on zakat in particular.

The findings of the research suggested that, in the communicational process of zakat organizations derived from communicator ethos, when the individuals joined their organization some of them undergo crystallization of values predominantly following the organization's norms, but some are more predominant based on the organizational culture that has already been built and there is similarity in values between communicators before or after joining their organization, and even their original values are strengthened after having joined the organization. In other words, the presence of the individuals in the organization increasingly strengthens the development of the organization. The former predominantly take place in BAZNAS zakat institution of West Java Province, and the latter in LAZIS Dewan Da'wah of West Java Unit.

The fact proves that organizational reality is a subjective construction where organizational communication is a process of creating the meaning of interactions that creates,

maintains, and changes the organization. Where objective views emphasize more on structural aspects, subjective views emphasize more on process aspect. Therefore, an organization is more than a tool, but rather it is a way of thinking (Pace & Faules, 1993).

In line with the views, the communicational strategies relying on communicator ethos are strongly affected by both organizational culture and communicational style as leadership behaviors in any organization which also influence the satisfying achievement of organizational goals. This is because the communicators mobilize their whole resources as the potentials they possess, including competence, integrity, and good faith in implementing their communicational processes. Therefore, an effective organizational communication concept is an organizational communication by using a subjective, interpretive, and humane approach that emphasizes more on value, ideological, and cultural aspects than on structural, functional, and duty-distributing aspects in an organization.

Therefore, the view that reinforces the role of those communicators with ethos in organizational communication is supported by a social construction theory which places humans as individuals who have a freedom of creating a social reality in their own environment and in other time social environment as an inter-subjective interaction process that reinforces and provides knowledge as a social reality for the individuals. According to Berger and Luckmann (1966), social institutions are established and maintained or changed by human actions and interactions. Though both societies and social institutions appear objectively as real, in reality they are all built in subjective definitions by an interactional process, as an externalization concept. An objectivity concept can arise only by repeated affirmations made by others with the same subjective definitions. At the highest generality level, by an internalization concept, humans create their world in universal symbolic meanings, that is, their comprehensive worldviews, legitimating and regulating social forms and giving meanings to their diverse life fields through institutions established by inter-subjective processes institutionalized in their externalization processes.

However, both organizations with communication predominant in normative aspect of enforcing its communicator ethos and ones with communication predominant in cultural aspect have their own internal organizations that separately and simultaneously are capable of building their own organizational values that later become an organizational capital in accomplishing their

organizational values, in this case developing cooperation in community empowerment program toward an empowered target of the program.

Communication of West Java BAZNAS and LAZIS Dewan Da'wah Organizations in Cooperation of Community Empowerment Programs

A series of data and facts relating to basic organizational values as a source of communicator ethos that affects the processes of communication between OPZs in developing cooperation of community empowerment programs can be seen in the following table:

Table 1
Communicational Relations among OPZs in Cooperation of Community Empowerment Program by BAZNS and LASz in West Java

Indicators		OPZ	
		WEST JAVA BAZNAS	WEST JAVA LAZIS DDII
Main Sources of Communicator Ethos		1. Koran/ <i>Hadits</i>	1. Koran/ <i>Hadits</i>
		2. Applicable laws	2. Organizational guidance
Basic Organizational Values		Synergy	Faith
		Professional accountable	Proselytizing Cooperation
Organizational Communication Model		a. Internal communication between central OPZ and regional OPZs	a. Internal Communication between Central and Regional OPZs
		b. Internal communication among local OPZs	b. Communication between Central OPZ and Other Central OPZs/Foreign
		c. Communication between OPZs and Local Government/Agency	c. Internal Communication among local OPZs
		d. Communication between OPZ and <i>Muzaki</i>	d. Communication between local OPZs and Islamic Mass Organization
		e. Communication between OPZ and Beneficiaries	
Cooperation of Community Empowerment Program		a. Regional Government /UPZ of West Java Province	a. Central BAZNAS OPZ
		b. Agencies	b. Foreign Donation
		c. MUI	c. Islamic Mass Organization
		d. Beneficiaries	

Source: processed from the research results

Based on the matrix of the processed research results above, there were 4 (four) indicators of how OPZs' communicator ethos is related to the implementation of cooperation in community empowerment program that can be described as follow:

- 1) For indicator of the source of communicator ethos, both West Java BAZNAS and LAZIS Dewan Da'wah puts Koran and Hadits as the main source which are then made as guide for the OPZ organizers who are involved in managing zakat at their own institution. However, there is difference when the main source is applied in running an organization related to zakat management. West Java BAZNAS emphasize strongly on the applicable (positive) laws such as act, president decree, minister decree, and Central BAZNAS decree as the legal umbrella and guidance in implementing zakat management including in developing cooperation with other institutions. On the other side, for LAZIS Dewan Da'wah organizational guide is made as its main reference in developing cooperation in community empowerment programs. Nevertheless, OPZ LAZs generally prefer applicable laws on administrative procedures and requirements for the establishment of an OPZ.
- 2) For indicator of basic organizational values as communicator ethos implemented by each OPZ, there is difference and similarity in emphasis. A similarity is that there is a synergy value at OPZ BAZNAS and cooperation value in OPZ LAZ which is employed as an ethical basis in implementing empowerment programs. That is, the two OPZs commit to building communication and coordination outside their own OPZ. However, the basis of building cooperation and synergy differs for both OPZs. West Java OPZ BAZNAS is based more on the mandates of legislations where BAZNAS serves as protector and facilitator of zakat institution of all kinds so that it has a more enforcing formal legal basis. On the other side, for OPZ LAZIS Dewan Da'wah the cooperation value based on faith and proselytizing carried on as a concept of change is made as the main basis because it becomes organizational vision and mission that the organization has to pursue in implementing programs; being different in the emphasis of values, it may well produce different leadership styles in both. For example, for the type of BAZNAS as protector and coordinator, in all zakat institutions a best-single leadership style can be applied. On the other side, LAZ in general can apply a conditional-best leadership style;

- 3) For indicator of communication model, both OPZs apparently differ in a quite principal ways. For example, West Java BANNAZ emphasizes more on organizational communication with vertical agencies such as regional government and agencies under its control and it has not optimally developed organizational communication with other OPZs in program cooperation. On the other side, LAZIS Dewan Da'wah is apparently more capable of building wider networks with fellow OPZs and with foreign funding institutions and collaboration in programs with other Islamic mass organizations.
- 4) For indicator of cooperation in community empowerment program, both OPZs follow a more predominant communication models. West Java BAZNAS develops more cooperation of programs with public agencies, while West Java LAZIS Dewan Da'wah is capable of winning some opportunities of cooperation with diverse kinds of those organizations and communities that make business in zakat management and in other sectors such as education and humanity.

The subjective perspective on organizational communication also emphasizes the roles of humans and processes in creating meanings. That is, meanings occur not only in humans but also emerge in transactional processes between persons at an organization. As such, according to subjective view, organizational communication is an endless process. Therefore, an organizational communication will not exist until it is created and interpreted by humans. Morgan (2003) maintains that, according to interpretive perspective, social world does not exist in a concrete meaning, but rather it is built by interactions and convention among individuals. Accordingly, a process of creating meaning is one of building organizational realities and aspect of understanding symbolic discourse that enrich organizational life (Pace, Faules, & Mulyana, 2006).

The aspect of understanding in an organizational communication with a subjectivism approach leads more to organizational culture that includes values, belief, ideology, and norm expressed by symbols, myths, stories, rituals, language, and artifacts (Jones & May, 1992). If artifacts are seen as something concrete, the approach is functionalism, and culture is considered as artifacts. However, if organizational culture is seen as a formation of understanding, making sense of symbolic behaviors and process of forming the understanding become important. Samovar (2014) classifies the aspects of culture into three major groups of social-cultural

elements that directly influence the creation of meaning for perceptions, in turn determining communicational behaviors. The social-cultural elements are: 1) Faith, value, and attitude systems, 2) Worldviews, and 3) Social organizations (Saduarsa, 2011).

A description of the concept of organizational culture in an organizational communication context can be understood from the ethos of its communicators, because the dimensions of ethos which are then investigated by experts are related to the personal quality of a communicator, such as: skill, competency, experience, knowledge, trustworthiness, honesty, reliability, sincerity, dynamism, vigilance, energy, societal passion, personal capacity, and hospitality. Thus, there is a correlation between communicator ethics and communicator ethos. The latter can be meant as an ethic evidence of a communicator that may be universal in nature. However, ethics in communicating may well have a subjectivity element, depending on the public dealt with (Johannesen, Valde, & Whedbee, 2008).

Conclusion and Suggestion

Conclusion

Based on the research result on organizational Communication relying on the communicator ethos of OPZs (Zakat Management Organization) in Cooperation of Community Empowerment Program in West Java, some conclusion could be drawn as follows:

- 1) The source of reference for OPZs' communicator ethos is the basis of how OPZs manage zakat. Externalization process of zakat management has affected the preliminary process of zakat management. Only when the objectifying process—that is, inter-subjective interactions falling into domain of organization—occurs, that the source of OPZ reference basically refers to the organization source, each with different characteristics, i.e., those which refer to the applicable laws of zakat management are practiced by BAZNAS. Thus, synergic, professional, transparent, and accountable values are very prominent. On the other side, those which refer to organizational doctrine, experience, and vision-mission are implemented by LAZIS Dewan Dakwah, thus bringing about a doctrine of values on *dakwah* as the core of change, autonomy, and cooperation, as well as controlled organizational climate;
- 2) The organizational values as the result of the source of OPZs' communicator ethos become a basis of communication among OPZs in developing cooperation in community

empowerment program and also become a crucial strategy, considering two (2) things, namely: 1) reciprocally, communicator ethos in an organization may generate organizational behaviors as an organizational culture that can create an organization in a form of organizational values; 2) also reciprocally, communicator ethos in the communication of organization may generate organizational norms by communicational model, and the styles communicational behaviors in the leadership of OPZs also contributes to forming organizational values;

- 3) Organizational communication process by a communicator ethos is moving in the organization intern by referring to those organizational values emphasizing more on both vision-mission and internal structure of the organization. Meanwhile, in the scope outside the organization and other organizations, cooperation is developed on a basis of understanding grounded on mutual advantage of the beneficiaries, openness, and mutual trust;
- 4) The implementation of cooperation in community empowerment program by BAZNAS initiated directly by and in cooperation with government has community empowerment programs relying more on personal power aspect (fulfillment of the beneficiaries' basic needs) and interpersonal power aspect (expansion of the accesses to the sources of fulfilling the beneficiaries' needs).

Suggestion

Based on the research result and discussion relating to the problems that OPZs face in their organisasional communication in the implementation of cooperation of community empowerment program, some fundamental suggestions are proposed as follows:

- 1) Organizational management, particularly at supervisor/manager level, should more actively play its role and has high initiative and mobility in building organizational communication by strengthening the ethos of the management that contains ideas, attitudes, and ideal acts in zakat-managing processes; so that the community empowerment programs are not simply verbalistic formal jargons, but rather become an organizational value driving force founded on the values of Islamic tenets on zakat;
- 2) For joint agendas relating to the orientation of the implementation of cooperation in community empowerment program, communication and coordination have to be opened as

wide as possible among zakat institutions by promoting mutual trust, openness, and wider welfare values, so that the implementation of the programs become efficient, effective, and on target, directed mainly to two (2) aspects, namely collection and utilization of zakat. This is to prevent any hidden agenda and sectoral ego of each zakat institution in zakat collection and utilization processes;

- 3) The existence of zakat institutions regulated in Law Number 23 of 2011 should be strengthened with provisions that give authorities to zakat institutions in charge of coordinating all zakat organizational potentials, in this case BAZNAS, and a power of punishing those zakat institutions which are not synergic, collaborative, and cooperative. Moreover, in attempt to keep the image of zakat institutions as a whole, BAZNAS should be functioned only as regulator, facilitator, mediator, educator, and advocate for the implementation of zakat management for all OPZs, not as the implementer of zakat management, so that it becomes a competitor of other OPZs which are also under guidance of BAZNAS. In addition, the decision makers, both executive and local parliament, should be encouraged to strengthen those regions with majority populations of Moslems for them to enact zakat regulation reaching up to grassroots in community;
- 4) Researches related to communicator ethos as an organizational communication strategy should be conducted on policy aspects that support the improved implementation of effective and comprehensive zakat management system for the prosperity of people.

Bibliography

- Fauzia, A. (2013). *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia* (Vol. 1). Brill.
- Johannesen, R. L., Valde, K. S., & Whedbee, K. E. (2008). *Ethics in human communication*. Waveland Press.
- Jones, A., & May, J. (1992). *Working in human service organisations: A critical introduction*. Longman Cheshire.
- Neuman, L. W. (2002). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*.
- Pace, R. W., & Faules, D. F. (1993). *Organizational communication*. Allyn & Bacon.
- Pace, R. W., Faules, D. F., & Mulyana, D. (2006). *Komunikasi organisasi: strategi meningkatkan kinerja perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R., & Roy, C. S. (2014). *Intercultural communication: A reader*. Cengage Learning.

Formulation and Constraints of Women Economic Empowerment of AN-Nisa' Cooperative

Daris Zunaida, Rini Rahayu Kurniati, Sri Nuringwahyu
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193 Malang

Email: dariszunaida@unisma.ac.id, rinirahayukurniati@unisma.ac.id, srinuringwahyu@unisma.ac.id

Abstract

One of the problems faced by Muslim women in Indonesia is the lack of empowerment in the economic field. An-Nisa' cooperative in Pati district, Central Java is one of the cooperative which consists of women who want to empower women. The effort to empower women's economy is certainly not easy because of the gender stigma in women and also the effort of male gender domination of women. This research uses qualitative research method with descriptive approach. The study was conducted for 6 months in An-Nisa' cooperative. The research data were collected through in-depth interview, observation, documentation and Focus Group Discussion (FGD). The results show that the economic empowerment effort undertaken by An-Nisa' cooperative through the agreement that all members are women. Empowerment is also done through unsecured loans. Constraints faced in the economic empowerment of women is the domination of husbands in the utilization of productive credit.

Keywords: Empowerment, Economic, Women, Microfinance, Muslimah

<i>Submite</i>	: 20 Desember 2018
<i>Review</i>	: 17 Februari 2019
<i>Accepted</i>	: 18 Juni 2019
<i>Surel Corespondensi</i>	: yuli@usm.ac.id

Introduction

Women are one of the gender groups that often experience marginalization. Cultural stigma often puts women as second-class gender groups or who are often referred to as "wingking" or back-groups in Javanese terms. Women are only considered to play a role in the affairs of the kitchen, mattress, and well, so that they should not play an active role in social, especially in economic role.

Many perspectives also say that women often have to rely totally on their husbands. Women should be fully dependent on their husbands because working women are the root of defamation and trouble. Therefore, a good woman is a woman who does not work because she will totally serve her husband and family.

Based on data from the 2011 UNDP Human Development Report that the Indonesian Human Development Index (HDI) in 2011 POLICY AND STRATEGY for Women's Economic Productivity Improvement (PPEP) 2 was 0.617 and ranked 124th out of 187 countries. Down

compared to 2010 which was ranked 108 out of 169 countries. Whereas for the 2011 Gender Inequality Index (GII) of 0.505 was ranked 100. In 2008 GII Indonesia 0.714 ranked 108th out of 139 countries. This shows that the condition of the quality of life of the Indonesian people is still low and that women who are economically in fact have the potential to become a development burden. Even though women with high quality of life can become national development assets that contribute positively and significantly to an equitable and equitable development process (Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, 2012).

Similar data is based on the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik, 2011) report on the level of poverty in Indonesia, namely the number of people living below the poverty line in March 2006 as many as 39.90 million people (17.75%). Increased by 3.95 million people, an increase from the previous year. But in March 2011, there was a significant decline in the national poverty rate for 5 years. The poor population fell from 17.75% (39.90 million people) to 12.49% (30.02 million people) of the total population.

Some research results indicate a significant increase in poverty alleviation through micro financial institutions for the poor, especially among women. Like the Nobel Peace Prize winner, Muhammad Yunus and his Grameen Bank in Bangladesh. It is said that women have an important role in alleviating poverty which starts from the family. Of the total 6.61 million customers or 97% are women who are customers (Asmorowati, 2007).

The results of the research conducted by Asmorowati (2007) show that there is a significant effect of micro credit on efforts to combat poverty. Microcredit programs make a positive contribution to the economic well-being of poor households, and influence the growth of community independence. This is because microcredit provides financial access to the poor.

A research conducted by Aswidaningrum (2017) shows that women do not have equal role to men is motivated by a subjective interpretation and not neutral. Women who do not have equal position with her husband are seen as a form of worship, so it is not considered a form of marginalization of women's position. The deviation of religious practices in male and female relation is the legitimacy of women's dependence on husbands.

A woman will not have problems if her husband is a responsible person. On the other hand, if her husband is not a responsible person, he will consider the woman who does not earn money as a weak woman. Economic dependence becomes a weapon for the husband to suppress his wife, resulting in an unequal relation. This is the root of violence in the household.

The results of a research conducted by Johny, (2011) shows that the dominant factor underlying the occurrence of domestic violence was a factor of economic dependence. Research conducted in the Banyumas Police area shows 70% of domestic violence was motivated by

economic dependency factor. The results also show that the majority of female victims did not dare report to the Police because they were still dependent on their husbands.

The economic dependence of wives to husbands is also not only in the home alone because many regulations also provide restrictions on women's economic access. Access to bank credit also requires the consent of a husband for a married woman. This is a big problem for women when husbands really curb the economic rights of women. The husband will disagree when his wife intends to take the credit that will be used for venture capital.

Women find it difficult to get a way out of getting the much needed business capital out of economic dependency. The amount of business opportunity for women can not be utilized because of limited business capital. Business actors in traditional markets and rural trade in the majority of women, making women very potential to do entrepreneurship, so it is in need of venture capital.

The research by Mahastanti & Nugrahanti, (2013) shows that there is a gender bias in access to credit in banks. Women are still seen as customers who have a higher risk level than men. Women will be limited in the amount of credit taking because they have a higher risk.

The real difference in people's lives is the dominance of men rather than women in decision making in the community. The development process carried out by women involvement is limited to seeing, observing and accepting the results of development. (Sutisna, 2013). Therefore, a special institution is needed that can provide the widest possible space for women to contribute in planning, implementing and evaluating development well, especially in the context of empowerment. This can have significant implications for improving women's welfare.

Previous research shows that there is a significant influence on poverty, especially for women. Accessibility to the establishment of cooperatives for women is important to do, able to enter the smallest sectors to encourage and motivate women to be creative in managing finances through cooperative access. Poverty actually departs from the family, so alleviation can also be done from the household. One of the things that can be done most is forming cooperative management groups. However, there are still many obstacles faced. One of them is support from the family itself, especially from the husband as the head of the household, support from the community as part of the form of awareness that is also still difficult to implement. As well as our cultural and cultural patterns towards the form of savings and loans that still assume if it can be instant because it must be difficult with various cooperative bureaucracies.

The phenomenon is what makes it important for Muslimat NU, as a women's religious organization with the largest members in Indonesia encouraging the establishment of cooperatives. It is hoped that the cooperative can become a facilitator for the empowerment of

Muslimat NU members who are all women. Cooperatives are expected to serve members of Muslimat NU so that it is expected to be beneficial to improve the welfare of the members.

This research is expected to analyze the steps and describe the obstacles faced by An-Nisa' cooperative in economic empowerment of women. Analysis is also done by identifying the obstacles and challenges faced by An-Nisa' cooperatives in the economic empowerment of women.

The concept of empowerment can not be separated from the concept of development. Some development concepts are conveyed by the authors as the basic theoretical framework and definitions. The concept of development from Larrain (1989) stated the concept of development that "*the very concept of development has begun late, in close connection with the emergence of capitalism and the critique of feudal society*". Feudal society, in the structure of agrarian society has limited due to land ownership results in stagnation of production. After the era of capitalism emerged, then there is a change toward materialism where the ideals of development can be realized. Larrain's conception sees development as a historical process in which development is an answer to the stagnation that occurs in the feudal society. Therefore, capitalism can break the stagnation lead to the development.

Empowering women according to their conceptions includes three things: (1) capacity building means building women's capacity; (2) cultural change, namely a cultural change that takes sides with women; and (3) structural adjustments are structural adjustments that favor women (Utama and Handayani, 2014).

The concept of empowerment according to Wallerstein is a social action concept that promotes participation or involvement. That empowerment is a social action process that prioritizes the participation of people, organizations, and societies to achieve the goal of increasing individual and community control, political efficacy, people's quality of life, and social justice (Wallerstein, 1992; Lord & Hutchison, 1993; Saugi and Sumarno, 2015).

The development strategy must certainly focus on efforts to accelerate structural change so as to strengthen the position and role of the people's economy in the national economy. These structural changes include the process of change from the traditional economy to the modern economy, from a weak economy to a resilient economy, from subsistence economics to a market economy, from the position of dependence on the position of independence (Sukamto, 2016).

Larrain's concept of development is based on the concept of Weber, which is always contradicted between the two stages of community life, namely traditional and modern. The feudal society is considered as a traditional society, while modern society is the result of the stages of the development process. Modern society is characterized by the organization of capital into the enterprise, rational technology, free labor, unlimited markets, and legislation that can be

taken into account (Sztompka, 1993) . This concept of development can be seen as a theory of evolution, where development is the process of evolution from traditional society into modern society characterized by increasing its productivity and expansion of world markets (Suwarsono & So, 1991) .

Peet (2009) explained that " *development means making a better life for everyone* " which means the fulfillment of basic human needs, including food needs, health, security, healthy living place, same service for everyone and caring among others. The previous definition focuses on the achievement of ethical values of essentially egalitarian ethic. The latest development of the notion of development is the discovery of the belief in modernity which is marked by the recognition of the success of western history based on the values and ethics of rationality, the mastery of science and technology, democratization to become a better world for all.

The relationship of development and poverty as Peet's theory (2009), based on statistical data shows a close pattern of relationship between growth, development, and poverty. Poverty results from extreme inequalities . There are three streams of alternative theory that look at the relationship between development and poverty.

- a. Marxist and neo-Marxist see that development makes high standards in materialism resulting in environmental destruction, natural destruction, cultural shifts so as to become more consumptive while on the other hand, there is inequality in access to resources resulting in poverty.
- b. Post-structuralism, rather seeing that the notion of development is a form of dominance of western powers so that this is more of a problem than a solution in terms of poverty.
- c. Feminist flow sees that development is a form of gender dominance so that gender inequality is regarded as a source of problems that contribute to the problem of poverty. Therefore, gender equality is needed to solve development problems including poverty.

Community empowerment is a process of social and cultural adaptation by industry and government to the life of local people. Local people are seen as a society that must get attention, so it should be synchronized with other communities. Therefore, community empowerment is defined as a process of social-cultural adaptation to pay attention to the part of society that is still not equivalent to other parts of society (Budimanta & Rudito, 2008).

While Nasdian (2014), who cited his opinion Payne stated that empowerment is a process that is intended to help people obtain the power (power) to make decisions and determine the actions they will take, including reducing the effects of personal and social barriers to action.

Phillips & Pittman (2009) stated that " community development is intended to build capacity ". Furthermore, they added that community developers build the capacity of a people when they encourage or teach others to create their own dreams, to learn new skills and

knowledge ". Community empowerment is an effort for capacity building encouraging to learn new skills or knowledge. Mardikanto (2009) believed that community empowerment is an ongoing effort to improve the dignity of the underprivileged people who are unable to escape the poverty trap and backwardness.

Method

This research uses qualitative research method with descriptive approach. Qualitative research method with descriptive approach chosen to be able to understand and describe how An-Nisa' cooperative in Pati district empower its women member. The study was conducted for 6 months in An-Nisa 'cooperative in Pati district - Central Java from March to August 2017.

The research data were collected through in-depth interview, observation, documentation and Focus Group Discussion (FGD). Interviews were conducted with the board and members of An-Nisa' cooperative. Observation is done on the regular activities, cooperative services to members and activities in the office. Documentation is done to obtain data of cooperative, Articles of Association, and also the progress of the cooperative. FGD is conducted to deepen the data that has been obtained from interviews, observation and documentation.

The researcher made used of data triangulation to analyze the data, and data reduction is done to sort the data so that the data taken more qualified and not biased. Data reduction is also used to make the conclusion process easier and better.

Results and Discussion

Member Economic Empowerment Steps

Empowerment conducted by An-Nisa' cooperative in Pati district is more focused on economic empowerment. Economic empowerment is considered to be quite important because it is often found that the sources of women's inadequacy are preceded by the lack of economic power. An-Nisa Cooperative assumes that economic empowerment will sustain women's empowerment in other respects.

The steps of economic empowerment of members by An-Nisa' cooperative include:

- 1) All its member are women

Relationships between women and men often reflect less equitable relationships. Men often still assume that women are second class. This often arises also when men and women Unequality between men and women makes the An-Nisa' cooperative members are all women, and it is expected all the board is also women. This condition will be a precaution to

prevent the possibility of gender bias. Women will be able to fight for their own destiny through policies, decisions and cooperative services for fellow women.

Women's concerns dominated by men in policy, decisions and cooperative services are no longer available. Cooperatives are really organized and operated by women so that there are alignments to women. Men can no longer interfere with the organizing and operational of cooperatives.

Cooperatives also become a forum for women empowerment, both women who become cooperative boards and women who are members of the cooperative. The women who become administrators will increase their capacity to prove that they are able to become the organizers of economic institutions, namely cooperatives. Likewise, members will be conditioned to be more empowered as they will be encouraged to make productive endeavors as well as to make investments through principal savings, mandatory savings and voluntary savings.

The number of An-Nisa' cooperative's members in 2017 are 600 people. The number of members at the establishment in 1999 was 25 people and increases every year. The number of members will continue to increase in the future because every credit applicant is firstly required to register to become a cooperative member. Of course they will be required to pay principal savings and mandatory savings.

Most members have productive businesses though with a small enough capacity. The undertakings are mostly home-made businesses such as grocery stores, tailors, tempe and tofu makers, food stalls, food processing. Many members of the cooperative are traders of traditional markets who conduct business activities in the market.

Each year the cooperative conducts Annual Members Meeting/ *Rapat Anggota Tahunan* (RAT) held every March or April since 2000 until March 2017 to provide opportunity for the boards to do the accountability reports and subsequent work program discussions. Then, the net income is distributed to the members depending on the level of activity of the member as well as the substantial savings, mandatory savings and voluntary savings. The management of the cooperative has changed four times since the AN-Nisa cooperative was established. Cooperative management is selected by members with five years of service alternately. It is hoped that by becoming a cooperative management, there will be an increase of women's capacity in organizing cooperative-based institutions.

2) Productive Savings and Loans Unit

The main business of An-Nisa' cooperative is savings and loans units. There are many benefits in savings and loans for members of the economic empowerment of women. The

most important benefits of savings and loan business is the empowerment of women investment and the fulfillment of business capital needs.

Investment is one form of economic empowerment of women therefore women who are less empowered will not be able to invest. Encouragement of cooperatives so that women can make productive investments through the obligation to pay principal savings and compulsory savings to cooperatives to become members of the cooperative. Mandatory savings and principal savings are a condition of membership, so they will be encouraged to set aside some money for investment by becoming a cooperative member.

Voluntary savings can also be paid by members of the cooperative when they have much money so as to provide benefits for them and the cooperative. Women who connoted as a group that has a high level of consumption that is considered less interested in investing. Voluntary savings are a form of member stimulation to be willing to invest. A strong investment push makes women more economically empowered.

The amount of principal savings, mandatory savings and voluntary savings of members in 2017 more than three million rupiah. Members will benefit from the use of the member's savings and simultaneously with cooperative business profits distributed annually in the form of net income. The business profits obtained by the cooperative are also manifested in the form of ownership of land and ittwo offices which has a real value of about two billion rupiah which of course belongs to all members of the cooperative.

Another benefit of savings and loans in empowerment is the provision of venture capital for members. Members can empower their economy through business pioneering and capacity building. Women often do not have the capital to start a productive enterprise. Likewise, businesses that have been running often have limited capital so that it is difficult to develop.

Most productive businesses of female cooperative members are micro businesses such as market traders, tailors, grocery stores, craftsmen and other small business establishments. Micro-enterprises with small capacity make it difficult to access capital from banks because they are less *bankable*. These conditions often make women with micro businesses become easily trapped by moneylenders with high interest rates.

An-Nisa' cooperative savings and loan business makes it easy for members to get business capital loans even though the business capacity is quite small. Credit services with interest rates that are affordable enough to make members can escape from the shackles of moneylenders. Expected interest rates are low enough and easy access to credit allows members to start a business or shoot the business so as to improve economic empowerment.

The amount of operational fund in the An-Nisa' cooperative in 2017 is more than six billion rupiah. The funds come from members' savings funds as well as funds from banks. An-Nisa' Cooperative has been trusted by state-owned banks to access loans used to serve the needs of member loans. It is expected that members can utilize such large funds for productive venture capital with an affordable interest rate.

The advantage for taking credit from cooperative is a partially paid service will return to the members. The profit from savings and loans obtained from credit services after deducting bank interest expenses and operating expenses will be the net profit of the cooperative. The net profit of the cooperative will surely be the residual result of the effort for the member and then partially distributed to the member.

The phenomenon is of course different if the women borrow some money from bank. Besides having more complicated requirements, the bank's business profits will not return to customers. Therefore, by lending funds to the cooperative will indirectly empower themselves because they will get additional revenue from the rest of the cooperative business profit.

3) Credit Without the Approval of the Husbands

Financial institutions such as banks or cooperatives other than An-Nisa' cooperatives often require the consent of a partner when applying for a loan. The purpose of the provision is that credit applications are known by both parties, both husband and wife. Expected between husband and wife are equally responsible for credit repayment.

A good husband and wife relationship will not be a problem because of course when the filing of credit are mutually open and jointly responsible. Problems arise when marital relationships are not harmonious, especially when women are not given economic access by their husbands. These conditions often occur in women who experience gender discrimination in the household.

Husbands who discriminate against their wives will see women empowerment, particularly in economic empowerment as a threat. Women who are also his wife when able to independently through productive business then it becomes not easy to depend economically with the husband. Productive women are certainly more empowered because they no longer depend on the economic dominance of their husbands.

Restrictions on economic access by husbands is what makes women will always depend on the husband, so the potential to become victims of violence in the household. This condition makes it difficult for women to get approval from their husbands when they want to apply for credit in banks or other financial institutions. Limited access to credit for business

capital makes women unable to start productive business so as not to be separated from dependence husband.

That phenomenon is what makes the An-Nisa' cooperative creates a special policy regarding the requirement of the consent of the spouse in the credit application for business capital. An-Nisa' cooperative member may apply for a business capital loan without having to include their husband's consent if she feels that her husbands are discriminating against gender. In other words, women who are restricted from their economic access by their husbands may apply for credit immediately without attaching their husbands' consent.

Policies without having to seek approval of husbands in credit applications are expected to be a way out of husband's domination and restrictions on economic access. Women are expected to empower themselves by obtaining business capital from cooperatives without having to rely on their husbands. This pattern will greatly help women who are experiencing gender discrimination or who are being sexually dominated by their husbands.

Ease of access to credit without the consent of the husband is expected to prevent women from acts of violence in the household. Women can directly apply for business credit to start and develop their business so that they do not fully depend economically on their husbands. This makes the wife becomes spared from her husband's efforts to create gender dependency and dominance in a household that is potentially transformed into domestic violence.

If women experience domestic violence, not harmonious with their husbands or no longer at home with their husbands then credit services without the consent of their husbands be a help to their economic problems. That condition may become one reason for husbands not to fulfill the family daily needs. The greatest difficulty faced by women is when they can not access credit.

An-Nisa' Cooperative provides a way out by granting credit access without the husband's consent to start productive endeavors. It is hoped that giving credit access can be useful for women in running productive business to support themselves and their children. Some members have taken advantage of this service and proved to be a solution to the economic difficulties they face.

4) Unsecured Savings and Loans

Women often do not have access to credit because they have no collateral required by banks or other financial institutions. Collateral is usually only owned by people who own valuable assets such as land certificates or Proof of Motorized Vehicle Ownership. Likewise,

the collateral will be quite difficult for women who have problems with their husbands because the collaterals are often kept by their husband.

Banks and financial institutions will be quite difficult when making credit policy without collateral requirement. Credit risk will be quite high because it is potentially experiencing bad credit. Therefore, unsecured loans are an impossibility from banks or other financial institutions.

Considerations that make An-Nisa' cooperative makes the credit policy of free collateral for members for loan less than Rp. 500.000, 00. It is hoped that these unsecured loans can be utilized by women who will start productive businesses for women who really have no collateral. This policy makes it easier for women to get enough credit to start a productive enterprise and try to improve empowerment.

An-Nisa' Cooperative allows to provide credit without collateral as it is given to its own members. The bond of cooperative relationships with members makes the borrower more responsible so that the possibilities of bad loans are quite small. The existence of principal, mandatory and voluntary savings for credit without collateral, indirectly can be a collateral.

According to the experience of An-Nisa' cooperative credit with the amount of less than Rp 500 thousand rupiah is very rare to become bad credit. Members will feel a loss if they lose the trust of the cooperative due to small amount of money. Although no collateral is proven the collateral trust between cooperatives and members is more effective to bind compared to physical collateral as is the general credit process.

Another factor that makes credit of less than Rp. 500.000,- rarely become bad credit because there is no storage utilization of credit. Loans with small nominal amounts are of course only needed by members who really need business capital. The allocation of funds for business capital will of course help them to pay the loan.

Constraints of Woman Economic Empowerment

1) Constraints of Coercion Credit for Husband

Less empowered woman often find it difficult to escape from male domination when she was forced by her husband to access credit services from An-Nisa' Cooperative. Although credit submission is fully done by the woman, but in reality the benefit is more for her husband.

In some cases, women are forced to lie when applying for credit by saying that the loan will be used as a productive venture capital which is operated by themselves. In fact when the credit is disbursed the funds are directly received by their husbands, so that they are

not benefited from the loan. The husbands who received the loan can directly perpetuate his economic dominance to his wives.

Those phenomenon will likely result in bad credit because her husband is reluctant to pay for the loans. His wife was not be able to pay for not being given money by her husband. This affects the lack of trust of the cooperative in the future. Improperly targeted borrowing actually turned increasingly eroded women's empowerment because their credit access to An-Nisa's cooperatives will be closed due to bad credit.

An-Nisa' cooperative management should take an action when their members experience loan problems. Number of bad credits will certainly disrupt the operational of An-Nisa' cooperative and will be a trigger for the decline in profits, thus threatening the operational costs of the cooperative. In addition, bad loans will also encourage other members to join in disorderly conduct of credit payments.

The magnitude of the risk of bad debts makes the cooperative management should keep bad credit not increasing. The amount of bad debts would threaten cooperative operations and bring cooperative to the financial crisis. Therefore, the board must take anticipatory steps in order to avoid bad credit. Borrowers who experience bad credit are directly marked, so they will not approve their credit application in the future.

2) Credit Abuse Constraints

The loans granted by An-Nisa 'cooperatives to its members represent productive loans designated for venture capital. It is expected that with the use of credit for business capital will increase member economic empowerment. It's just that it often happens misuse of credit because it is allocated to things that are consumptive, making it difficult to restore credit and unable to increase economic empowerment.

Women often in the household must face the economic burden, especially when the husband is less economically responsible. Credit from cooperatives that should be used for venture capital is ultimately used to meet household needs. This of course affects the failure of productive credit so it is less useful in improving women's empowerment.

Misuse of credit for the fulfillment of household needs will also impact on the severity of installment payments. They will have difficulty paying the monthly installment because the loan has been used to meet the daily needs. This is different if the loan is used for business in which the business profits can be used to pay the credit.

Anticipation steps undertaken by An-Nisa' cooperative board to avoid the deviation of credit usage is to conduct survey. Information will be extracted from the nearest source of credit applicant members as well as other members close to the applicant. Although not fully

able to anticipate the occurrence of irregularities in the use of credit, but at least can reduce and anticipate the occurrence of bad loans.

However these bad loans will reduce the cooperative's trust with members. This becomes one of the constraints of economic empowerment conducted by cooperatives. Decreasing trust in the cooperative with members who will make loans for productive business will of course have an impact on the reduction of institutional capacity to encourage members' economic empowerment.

Conclusion

The efforts undertaken by An-Nisa' Cooperative – Pati district is more focused on its members' economic empowerment. An-Nisa' Cooperative which has been operating since 1999 to serve its members in the form of savings and loans for business. Savings and loans for business is expected to strengthen its members' business capital both in starting and developing productive businesses to gain profit and improve empowerment.

There are four steps in economic empowerment conducted by An-Nisa 'cooperative to its members. The first step is to make the cooperative all its women members so as to facilitate the empowerment of women. The second step is to run a convenient lending and loan business to encourage women to invest and productive businesses. The third step is to make credit policy without having to with the husband's approval for women to be separated from the husband's dominance so as to be empowered. The fourth step is to make credit with small nominal without collateral in order to empower women in pioneering productive effort easily.

There are two obstacles faced by the An-Nisa' cooperative in women economic empowerment which is often found in women's empowerment. The first obstacle is the hijacking of credits by husbands so that instead of improving women's empowerment, it is actually reducing women's empowerment. The second constraint is the deviation of utilization of productive credit for the fulfillment of household needs. Anticipation made by An-Nisa' cooperative must be done so that cooperative operation can continue to run, but the result is a decrease of cooperative trust in member so that the effort of economic women empowerment is less maximal.

Bibliography

- Asmorowati, Sulikah. 2007. Impact of Providing Micro Credit to Women: Analysis of the Adoption of the Bank Indonesia Grameen Model. *Community Journal, Culture and Politics*, 20 (2) 175-190.
- Aswidaningrum, R. (2017). "Gender Inequality in Religion as Symbolic Violence on the Recognition of Ex-Single Parasites". *Research Journal*, 11 (1), 198–126. Retrieved from <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPeneliti/article/view/2102>.
- Budimanta, A., and Rudito, B. (2008). *Methods and Management of Community Development Techniques*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development.
- Central Bureau of Statistics. (2011). *Analysis and Calculation of the 2010 Poverty Level*. Jakarta: Central Bureau of Statistics
- Johny, R. H. (2011). "Violence against Women (Criminal Etiology Study in the Banyumas Police District)". *Journal of Legal Dynamics*, 11 (2), 214–229.
- Larrain, J. (1989). *Theories of Development: Capitalism, Colonialism and Dependency*. USA: Basil Blackwell Cambridge.
- Mahastanti, L. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). "Gender Bias in Access to Banking Credit (Study of Micro and Medium Entrepreneurs in Salatiga)". *MODE* 25 (2): 139–151. Retrieved from <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/559>.
- Mardikanto, T. (2009). *Agricultural Extension System*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Ministry of Women's Empowerment and Protection of Indonesian Children. (2012). *Policy on the Strategy for Increasing Women's Economic Productivity (PPEP)*. Jakarta: Deputy of Gender Administration for Economics.
- Nasdian, F.T. (2014). *Community development*. Jakarta: Indonesian Torch Library Foundation.
- Peet, R. (2009). *Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives*. New York : The Guilford Press.
- Phillips, R., and Pittman, R. (2009). *An Introduction To Community Development*. London & New York: Routledge.
- Saugi, Wildan & Sumarno. (2015). "Empowering Women through Local Food Management Training". *Journal of Community Education and Empowerment* 2 (2): 226-238.
- Sukamto. (2016). "Formulation of the Strategy for Empowering the People's Cabinet in the Indonesian Cabinet Work in the Islamic Economic Perspective". *Malia Journal* 8 (1): 21-40.

- Sutisna, Anan. (2013). "The Model of Women's Empowerment and Gender Governance Through Community Education Services at the Community Learning Center". *Education Horizon Journal*. November 2013. Th. XXXII. No. 3.
- Suwarsono, and So, A. Y. (1991). *Social Change and Development in Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Sztompka, P. (1993). *Sociology of Social Change*. Jakarta: Prenada Media Jakarta.
- Utama, Agung and Handayani, Titin Hera Widi. (2014). "The Model of Empowering Poor Women Through Local Potential-Based Entrepreneurship Training in Wedi District, Klaten Regency". *Research Journal of Humanities* 19 (2): 154-167.

Model Strategi Pengembangan Sosial Radio Komunitas dalam Mitigasi Bencana Di Kawasan Gunung Kelud

Anam Miftakhul Huda

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Balitar Blitar, Jl. Majapahit No. 4a Blitar

E-mail: a6.asix6@yahoo.co.id

Abstract

This study reviewed about the importance of the existence of community radio in disaster-prone areas to maintain the existence of this radio, this community radio conducts social development, specifically in the field of disaster mitigation and information for surrounding communities. The existence of community radio is important as a means of various informations and to strengthen brotherhood in the community. Jangkar Kelud community radio is mass media engaged in broadcasts in the kelud area, namely in Blitar Regency, Malang Regency and Kediri Regency, this radio was formed by a group of people in the Kelud area, the problem is the death threat of the existence of radio station. It is useless when disaster no longer occurs, but the benefits of community radio are not when a disaster occurs but radio as a disaster mitigation media are very important continuously to convey awareness to the community. This type of research is descriptive qualitative, by adopting observations, interviews and documentation. The results of this study are, the strategy of building familiarity between residents and the *Jangkar Kelud Community*, Strategy to Build External Support, Disaster Learning Strategies from an Early Age because it is assets to instill the caring sosil value in the Kelud Mountain area from early childhood.

Keywords: Model, Strategy, Community Radio, Social Development

Abstrak

Penelitian ini mengaji tentang pentingnya keberadaan radio komunitas di kawasan rawan bencana untuk menjaga eksistensi radio ini maka radio komunitas ini melakukan pengembangan sosial, khusus dalam bidang informasi kebencanaan maupun mitigasi kebencanaan untuk masyarakat sekitar, Keberadaan radio komunitas jadi penting sebagai salah satu sarana berbagai informasi dan perekat rasa persaudaraan di masyarakat. Radio komunitas jangkar kelud adalah media massa yang bergerak dalam siaran dikawasan lingkaran kelud yakni di Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri, Radio ini dibentuk oleh sekelompok masyarakat di Lingkaran Kelud, yang menjadi permasalahan adalah ancaman kematian keberadaan radio tersebut alih-alih radio tidak ada manfaatnya kembali ketika bencana tidak lagi terjadi, namun manfaat radio komunitas tersebut bukan ketika terjadi bencana namun manfaat radio sebagai media mitigasi bencana itu yang sangat penting secara terus untuk menyampaikan kewaspadaan kepada masyarakat. Tipe penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, dengan mengadopsi pengamatan, wawancara penggiat Jangkar Kelud dan dokumentasi dari kegiatan Jangkar Kelud. Hasil penelitian ini adalah, Strategi membangun Keakraban Antar Warga dan Komunitas Jangkar Kelud, Strategi Membangun Dukungan dari Luar, Strategi Pembelajaran Kebencanaan

Sejak Usia Dini di karena aset untuk menanamkan nilai peduli sosial di kawasan Gunung kelud adalah dari dini yakni anak-anak.

Kata Kunci: *Model, Strategi, Radio Komunitas, Pengembangan Sosial*

<i>Submite</i>	: 29 Januari 2019
<i>Review</i>	: 29 April 2019
<i>Accepted</i>	: 21 Juni 2019
<i>Surel Correspondensi</i>	: ayubdwianggoro86@gmail.com

Pendahuluan

Keberadaan radio komunitas merupakan radio yang di miliki oleh komunitas tertentu. Keberadaan penyelenggaraan media radio di Indonesia berlandasan dua ranah yaitu, pertama landasan hukum untuk basis materialnya yakni tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sedangkan untuk basis kultural yakni tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kedua Undang-undang ini merupakan landasan keberadaan radio yang ada Indonesia, Namun sayangnya kedua landasan hukum ini tidak memberi jaminan yang jelas bagi penyelenggaraan media penyiaran, termasuk radio komunitas. Keberadaannya tidak bisa menjamin eksistenssi media, karena berbagai problematika di alami oleh keberadaannya. Hal ini berbagai prolematika yang di alami oleh radio komunitas baik secara teknis maupun secara administrasi sehingga radio tersebut sulit untuk berkembang (Takariani, 2013).

Radio memiliki kemampuan yang dapat di manfaat untuk *earlywarning system*. Salah satu penggunaan radio komunitas dikawasan rawan bencana, Faktor penting dari manfaat system ini adalah peranan informasi tentang bencana menjadi sangat penting Masyarakat mesti terus menerus mendapat dan mempunyai kemampuan untuk mencari informasi yang mencerdaskan tentang bencana (Komariah, Novianti, & Subekti, 2014). Penggunaan *earlywarning system* dalam kebencanaan merupakan bagian terpenting dalam pengurangan resiko bencana. Sistem peringatan dini (*earlywarning system*) merupakan sistem usaha mengingatkan masyarakat beberapa saat sebelum terjadi bencana, hal ini guna pembelajaran kepada masyarakat akan kewaspadaan bila terjadi bencana selanjutnya menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengenali bencana secara komprehensif. Sistem peringatan dini yang efektif kemampuan masyarakat dapat membaca/literasi akan tanda-tanda bencana dan bahayanya (LIPI, 2014).

Komunitas atau masyarakat dikawasan rawan bencana diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi ternyata memiliki nilai-nilai atau norma yang dapat mengatur tata hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, yang sering disebut pranata sosial. Hal ini berarti nilai-nilai dan norma tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam memberikan kontribusi pada penanganan masalah kesejahteraan sosial. Pranata sosial secara fisik memang tidak tampak, tetapi dapat dirasakan keberadaannya, terutama bila hal itu berfungsi dengan baik (Nuryana, 2003).

Tujuan media komunitas sebagai berikut: (1) Media komunitas memberikan pelayanan informasi isu-isu dan problem universal, tidak sektoral dan primordial (2) Media komunitas dapat pengembangan budaya interaksi yang pluralistik, (3) Media komunitas dapat penguatan eksistensi kelompok minoritas dalam masyarakat, (4) Media komunitas dapat bentuk fasilitasi atas proses menyelesaikan masalah menurut cara pandang local (McQuail, 2010). Penelitian sejenis diambil dari strategi komunikasi radio komunitas Usukom FM. Penelitian ini membahas tentang radio komunitas pendidikan dalam mempertahankan eksistensinya dengan menekankan pada manajemen internal radio komunitas. Hal itu sama dengan radio komunitas Usukom pada radio komunitas Jangkar Kelud dalam mempertahankan eksistensinya dengan caranya tersendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengawasan pada manajemen radio komunitas Usukom FM. Dari penelitian itu menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan manajemen siaran yang dilakukan Usukom FM kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Eksistensi siaran dapat dijaga melalui program serta membuka interaksi langsung maupun tidak langsung, seperti halnya untuk membuka permintaan melalui sms, telephone (On-air) interaktif dan disajikan langkah untuk mempromosikan keperluan sesuai kebutuhan radio komunitas. Dalam menjaga eksistensi baik radio komunitas baik secara internal maupun eksternal, usaha-usaha dari media komunitas untuk menjalin kebersamaan dengan lingkungan itu perlu dilakukan.

Penelitian strategi komunikasi dan manajemen siaran yang dilakukan di Duta FM kurang mengena dalam pengelolaan manajemen radio komunitas dalam penerapan manajemen penyiaran, karena kurangnya SDM terkait ketrampilan dalam manajemen radio komunitas. Maka dari itu, pengembangan radio komunitas yang termasuk dari modal sosial yang meliputi keberadaan SDM memiliki kemampuan dan rasa kepemilikan terhadap radio komunitas tersebut (Heri, 2014).

Radio komunitas di Indonesia menghadapi empat masalah besar yaitu: (1) Radio komunitas mengalami persoalan membentuk institusi dan manajemen radio yang berbasis pada partisipasi komunitas; (2) Radio komunitas mengalami implementasi regulasi siaran terkait program siaran, perizinan, standar teknologi siaran dan etika siaran; (3) Radio komunitas mengalami persoalan SDM; dan (4) Radio komunitas mengalami persoalan dana (Masduki, 2005). Pengelolaan radio komunitas yang tidak hanya bermodalkan semangat saja, atau bertumpu pada kepentingan beberapa warga sesaat, penyaluran hobi dan aktualisasi diri tidak tepat dan terjamin regularitasnya. Faktor penting dari manfaat sistem ini adalah peranan informasi tentang bencana menjadi sangat penting. Masyarakat mesti terus menerus mendapat dan mempunyai kemampuan untuk mencari informasi yang mencerdaskan tentang bencana. Semua pihak yang terlibat dalam manajemen bencana harusnya mempunyai tugas/peranan yang sangat besar dalam meningkatkan literasi masyarakat akan bencana baik ketika bencana belum terjadi (mitigasi), sedang terjadi maupun dalam melakukan pemantauan akan gejala bencana. Selain sistem peringatan dini yang dilakukan oleh institusi-institusi yang terkait tentu perlu kerjasama dari seluruh pihak. Salah satunya dengan siaran dialog interaktif ini adalah, sebagai salah satu cara untuk menunjang program pemberdayaan potensi masyarakat di bidang informasi dan komunikasi, dan sebagai perpanjangan tangan dari upaya pemerintah memajukan pengetahuan serta wawasan masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi di daerah tersebut karena sesuai dengan kepentingan masyarakat sekitar (Dyan, Harumike, & Miftakhul, 2018b).

Tidak hanya mengandalkan respon dari pemerintah, tetapi juga masyarakat lokal dalam respon bencana. Oleh karena itu, Jalin Merapi melakukan kolaborasi dengan stasiun radio komunitas dan komunitas lokal sebagai sumber informasi. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat untuk mengukur kapasitasnya dalam memperkuat komunikasi bencana. Jalin Merapi merupakan jaringan yang menghubungkan anggota komunitas dengan audiens yang lebih luas melalui stasiun radio komunitas di mana jaringan tersebut tidak mengganggu cara anggota masyarakat berkomunikasi satu sama lain. Hal tersebut dibangun berdasarkan karakteristik masing-masing komunitas, seperti budaya lokal, tingkat adaptasi teknologi komunikasi, preferensi media, perilaku komunikasi sehari-hari, dan tingkat kepercayaan di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, radio komunitas memiliki kapasitas penting dalam melibatkan karakteristik lokal secara bersamaan dalam proses komunikasi

bencana partisipatif. Di lain hal, masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi dalam komunikasi bencana berdasarkan kapasitas mereka sendiri, pengetahuan lokal mereka dan perilaku komunikasi mereka yang sebenarnya.

Jangkar kelud merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di sekitar Gunung Kelud guna penanganan bencana secara mandiri oleh masyarakat sekitar Gunung Kelud, Keradaan jangkar kelud berasal masyarakat belajar dari keberadaan komunitas Lingkar Merapi yang ada Yogyakarta, disini terbentuk sebuah radio komunitas jangkar kelud di setiap daerah untuk menyampaikan informasi aktivitas Gunung Kelud. Keberadaan radio jangkar kelud sangat membantu dalam masyarakat untuk pengetahuan mitigasi kebencanaan.

Pemanfaatan radio komunitas Jangkar Kelud memiliki misi untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat dikawasan rawan bencana yakni mitigasi kebencanaan Gunung Kelud (Huda, Bajari, Muhtadi, & Rahmat, 2018). Fungsi radio komunitas ini menyebarluaskan informasi dan gagasan dari luar maupun dari dalam komunitas sebagai upaya menumbuhkan kepekaan social dilingkar Kelud, selain itu menyiarkan berbagai informasi sosial, ekonomi, politik dan hukum bagi masyarakat setempat. Dengan adanya mendorong partisipasi masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan penyiaran serta kegiatan sosial, budaya, politik, hukum dan lingkungan maka radio komunitas dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Radio komunitas jangkar kelud memiliki misi untuk mengelola usaha dengan cara yang terbaik untuk memelihara kesinambungan dan kelangsungan operasional dan menumbuh kembangkan budaya dan kearifan lokal Kelangsungan dan eksistensi ini yang dimiliki oleh jangkar kelud sebagai bentuk dasar penelitian ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara wawancara dengan informan yakni pengiat radio komunitas Jangkar Kelud. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mengikuti kegiatan radio jangkar kelud dan data mengenai informan di lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di kawasan lingkar kelud yakni tujuh radio komunitas Jangkar Kelud di kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang keberhasilan jangkar kelud dalam menangani bencana dari letusan Gunung Kelud dengan dapat mengurangi resiko secara mandiri..

Peneliti meminta kepada informan pertama untuk menunjukan siapa informan selanjutnya yang layak sebagai informan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus radio komunitas suara Jangkar Kelud, penyiar radio komunitas Jangkar Kelud dan masyarakat pendengar radio komunitas. Subjek penelitian adalah semua yang ikut berperan dalam partisipasi di “Radio Komunitas Jangkar Kelud” di kawasan rawan bencana Gunung Kelud dengan jumlah tidak dibatasi dan dirasa cukup penelitian akan di ambil kesimpulan. Adapun kriteria informan sebagai berikut:

- a. Pengelola radio komunitas “*Jangkar Kelud*” (Penyiar, Crew, Strukturalisasi Organisasi) (Mbah Darmo, Asmono, Suprpto, Andika, Eko Suroso, Fery, Makris)
- b. Pejabat pemerintahan (Ngasri Camat Ngancar), Profesional (Khoirul Huda Ketua RAPI, Khoirul Huda Pos Pantau Kelud, (Sutrisno, Gendon pengiat NGO Kappala Yogyakarta), (yang Menjalin relasi dengan keberadaan radio komunitas Kelud)
- c. Pendengar sekaligus masyarakat sebagai bentuk Evaluasi radio komunitas.

Penentuan informan dalam penelitian ini mempertimbangkan keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh yakni dari pengiat radio komunitas Jangkar Kelud, Dengan jumlah informan yang dibutuhkan yang didasarkan pada tujuan penelitian dan kewenangan seorang peneliti dalam menentukan seorang informan yang layak untuk diwawancara, selanjutnya setelah data diambil dan olah dengan teknik triangulasi dengan tindakan terakhir yakni croscek yang dilakukan peneliti yakni *croscek* sumber dengan informan penelitian yakni penggiat radio komunitas Jangkar Kelud.

Hasil Dan Pembahasan

Strategi radio komunitas Jangkar Kelud dalam memperoleh simpati pendengar. Tujuan yang jelas dalam kegiatan dan program radio komunitas Jangkar Kelud, namun bila ada respon terhadap masyarakat atau pendengar itu berhasil nihil. Ibaratnya pembeli itu raja dalam jual beli atau pemasaran, sama halnya dengan dunia radio pendengar itu raja. Bagaimana radio komunitas mendapat simpati oleh pendengar sehingga mereka bisa ikut merasakan keberadaan radio tersebut. Strategi tidak berfungsi hanya sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan jalan saja,

melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Sumber diolah dari :Wawancara dengan Suprpto, 2015).

Strategi komunikasi yang merupakan paduan antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh komunitas. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa sewaktu-waktu berubah bergantung pada situasi dan kondisi.

Efektifitas penyampaian pesan yang terkait erat dengan strategi komunikasi, sebuah radio di kawasan rawan bencana harus bersaing dengan stasiun radio lain untuk memperoleh pendengar. Oleh karena itu untuk dapat eksis sebuah radio media informasi kebencanaan Gunung Kelud harus mengenali lingkungan untuk kemudian merancang dan menerapkan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Kemampuan radio komunitas kebencanaan untuk beradaptasi dengan lingkungan sangat diperlukan, disamping itu kreatifitas dan inovasi sama sekali tidak boleh diabaikan (Sumber diolah dari :Wawancara dengan Suprpto, 2015)

Weber menyatakan bahwa dalam radio komunitas terdapat keterlibatan hukum kausal dan generalisasi. Hukum kausal yakni hukum sebab akibat, sedangkan generalisasi merupakan suatu hal yang umum dalam semua ilmu. Oleh karena itu, hal tersebut dijadikan fokus utama dalam ilmu sosial. Tindakan sosial bagi Weber merupakan salah satu tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya atau yang di arahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer, 2001). Tindakan sosial itu meliputi usaha untuk pengembangan sosial dalam kemasyarakatan. Tindakan Sosial ini merupakan bagian dari keterbukaan publik di mana radio memiliki peran sebagai kontrol sosial (Dyan, Harumike, & Miftakhul, 2018).

Model pengembangan sosial merupakan usaha untuk menjaga agar eksistensi radio komunitas ini dalam menjalankan fungsi dalam berjalan dengan baik. Maka perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat untuk keberadaannya, konsep komunitas yang dari komunitas inilah menjadi acuan dalam pengembangan sosial radio komunitas Jangkar Kelud ini. Model strategi pengembangan sosial yang digunakan oleh Jangkar Kelud adalah sebagai berikut:

Strategi Keakraban Antar Warga dan Komunitas Jangkar Kelud

Unsur yang paling penting dari keberadaan radio komunitas adalah legitimasi dari (sebagian besar) anggota komunitasnya atau rasa kepemilikan anggota terhadap radio komunitas tersebut, sebagai pengelola maupun khalayak siaran radio komunitas. Jika tidak terdapat legitimasi atau rasa kepemilikan tersebut maka radio tidak akan berjalan dengan baik. Keberadaan radio komunitas hanya akan kuat jika didukung anggota komunitasnya, tanpa itu jangan harap radio komunitas akan bertahan lama di tengah komunitasnya. Berdasarkan wawancara Asmono pada tanggal 19 Mei 2015 sebagai berikut.

“Awalnya Kelud FM itu berjalan lancar namun pada saat gunung Kelud erupsi kegiatan di Kelud FM menjadi mati. Nah disaat seperti itu, media hanya mengangkat berita terkait Kelud FM. Harusnya jangan hanya Kelud FM aja yang diangkat. Kan masih ada Tempu Raya, Satak FM, dan 9 radio itu seharusnya yang diangkat. Bukan hanya peran serta Kelud FM atau bukan hanya peran camat Kancar saja, tetapi teman-teman tim siaga desa yang ada di Lingkar Kelud itu juga berperan aktif. Kabupaten Kediri kan bukan Kancar saja, kan banyak, yang jadi kendala itu. Jadi dihebohkan tapi tidak tahu awalnya bagaimana, perjuangan teman-teman bagaimana tidak ada yang tau. Media itu kalau memberitakan seperti itu, jadi tidak ditambahi. Jangkar Kelud itu ada radionya, radio komunitas dan radio komunikasinya. Bukan hanya radio saja, tetapi HT ya HT saja tidak, jadi ya lengkap” (Sumber diolah dari :Hasil wawancara dengan Asmono, 19/05/2015)

Berdasarkan data dari wawancara di atas menunjukkan bahwa komunitas Jangkar Kelud telah memiliki rasa kepemilikan atau legitimasi atas keberadaan radio komunitas. Keberadaan radio komunitas di Jangkar Kelud telah didukung oleh anggota komunitasnya sehingga kegiatan radio juga dapat bertahan lama.

Radio komunitas bermula dari kebutuhan komunitasnya yakni masyarakat di lingkungan “Jangkar Kelud”. Keberadaan media ini diperuntukkan sebagai media yang berfungsi *early morning system* dalam pencegahan bencana Gunung Kelud. Radio komunitas di sekitar Gunung Merapi Yogyakarta juga memiliki media komunitas yang memiliki tujuan sama. “Jangkar Kelud” berkiblat dengan media tersebut dan mencoba memberi manfaat penuh terhadap komunitasnya di lingkaran “Jangkar Kelud”. Pemahaman menakutkan akan bencana Gunung Kelud harus dihilangkan dan diubah menjadi suatu realitas yang harus dihadapi masyarakat di Lingkar Kelud. Pemahaman masyarakat di Lingkar Kelud bisa diterapkan dengan melakukan kegiatan pertemuan rutin seminggu sekali. Keputusan itu dilakukan karena status aktif gunung

kelud yang memang tidak akan ada yang tahu kapan dan bagaimana dia akan “beraksi”. Menurut data dari hasil wawancara Raka pada tanggal 12 September 2015 sebagai berikut.

“Lingkar Jangkar melakukan pelatihan ke berbagai kabupaten salah satunya ke Kabupaten Blitar yang meliputi Sumber Asri, Penataran, dan Karangrejo. Setelah pelatihan dilakukan ternyata animo masyarakat untuk belajar itu sangat tinggi. Akhirnya terdapat semacam simulasi jadi semisal gunung itu jalur evakuasinya di mana, titik berkumpulnya di mana, kapan ketika tanda-tanda akan meletus juga dipelajari, serta dalam pelatihan itu juga menghadirkan narasumber ketika dibutuhkan informasi terkait dengan status gunung yang berasal dari pusat vulkanologi. Biasanya menghadirkan pak Khoirul dari Bandung. Kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi komunitas radio Jangkar Kelud dalam memahami bagaimana manajemen bencana di sekitar kawasan gunung Kelud” ((Sumber diolah dari :Hasil wawancara dengan Wawancara Raka, 12/09/2015).

Usaha radio komunitas Jangkar Kelud untuk memperoleh legalitas dari masyarakat sebagai komunitas harus melibatkan partisipasi masyarakat. Semua proses tahapan harus menggandeng masyarakat sepenuh di Lingkar Kelud. Keberadaan pengelolaan radio komunitas mulai dari tahap perencanaan, penyelenggaraan siaran, sampai evaluasi penyiaran radio komunitas merupakan bagian cerminan untuk eksistensi radio komunitas Jangkar Kelud.

Berdasarkan hasil penelitian mengatakan bahwa partisipasi masyarakat Lingkar Kelud pada radio komunitas “Jangkar Kelud” cukup tinggi, terbukti dengan keterlibatan masyarakat mulai dari penyiar sampai pada kontribusi yang diberikan masyarakat berupa iuran rutin, arisan fans, dan kontribusi lainnya. Keterlibatan ini tidak hanya datang dari masyarakat saja tetapi juga memperoleh dukungan dari pemerintah desa. Lurah sangat memfasilitasi kebutuhan radio komunitas tersebut. Beberapa radio komunitas “Jangkar Kelud” berada di kantor lurah. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi meskipun pada awalnya radio ini minim dukungan, terutama dari pihak pemerintah desa. Namun motivasi dan niat yang tulus dari penggiat radio menjadikan radio komunitas ini eksis meskipun memiliki keterbatasan di berbagai aspek, misalnya keahlian penyiar di bidang radio dan fasilitas terbatas.

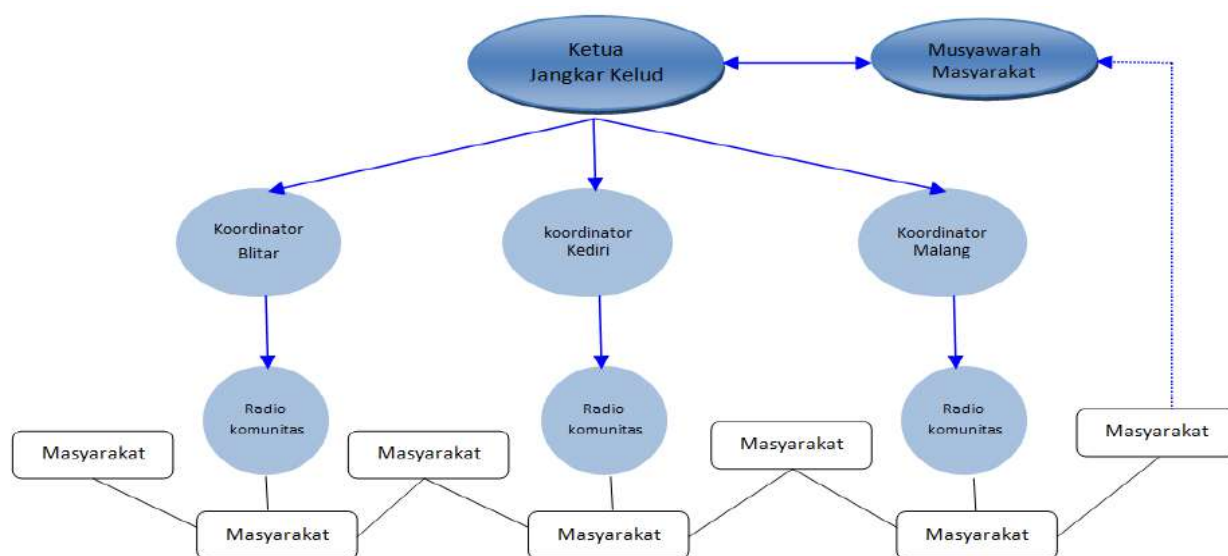
Tingginya partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dari strategi yang digunakan oleh radio komunitas dalam menjaring massa. Pendekatan yang digunakan adalah pasuduluran. Strategi pasuduluran merupakan sebuah pendekatan yang menjadi ciri khas pada masyarakat yang tinggal di lingkungan pedesaan. Karakteristik masyarakat ini selalu berkumpul dan memiliki jalinan ikatan persaudaraan yang sangat erat. Dalam pasuduluran ini tidak pernah memandang orang dalam tingkatan yang berbeda. Semua orang memiliki kedudukan sama, siapapun yang berada di

lingkungan lingkaran “Jangkar Kelud” harus memiliki kebersamaan terhadap risiko yang akan dihadapi ketika bencana gunung itu datang.

Ketiga prinsip yang dimiliki oleh “Jangkar Kelud” adalah wujud dari pendekatan pasuduluran ini. Prinsip tersebut yaitu *sing penting dilakoni disek* (yang penting dilakukan dulu). Prinsip ini bermakna bahwa tidak perlu harus menunggu sumber daya yang cukup untuk mengoperasikan sebuah radio komunitas. Yang terpenting adalah niat dan kebersamaan komunitas. Keberadaan radio komunitas memiliki peran utama dalam memberikan informasi terkait kebencanaan kepada masyarakat. Kedua, *Tandang, ora penting kondang* yang artinya program yang penting dijalankan. Berbuat lebih penting daripada menjadi terkenal. Pencapaian tujuan utama keberadaan radio menjadi faktor terpenting dibandingkan dengan tujuan lainnya. Meskipun dalam perkembangannya, radio komunitas tidak hanya menyampaikan informasi terkait kebencanaan tetapi juga informasi lain serta konten hiburan. Ketiga, *Tak butuh kondang amargo tandang*. Ketiga prinsip ini diharapkan menjadi semangat juang warga masyarakat agar tidak mengedepankan sebuah apresiasi tetapi lebih pada kebersamaan dalam menghadapi bencana Gunung Kelud.

Jaringan “Jangkar Kelud” terdiri dari berbagai pihak yang membentuk satu kesatuan jaringan yang memiliki tujuan untuk mengatasi kebencanaan di Gunung Kelud. Jaringan itu bermula dari masyarakat yang bersama-sama mengadakan musyawarah bersama untuk mengatasi permasalahan Gunung Kelud, berkoordinasi kepada ketua “Jangkar Kelud”. Melalui media sosial (WA) setiap informasi disampaikan melalui koordinator antar wilayah yakni wilayah Blitar, Wilayah Kediri dan Wilayah Malang. Masing-masing wilayah melakukan koordinasi dengan radio komunitas dibawahnya lalu informasi yang didapatkan akan disampaikan kepada masyarakat. Pola jaringan radio komunitas dalam membangun keakraban di komunitas “Jangkar Kelud” dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.
Model Strategi Keakraban Antar Warga dan Komunitas Jangkar Kelud



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2017

Gambar 1. Menunjukkan bahwa radio “Jangkar Kelud” memiliki tim penasehat yang berasal dari masyarakat itu sendiri (musyawarah masyarakat). Dibawah ketua komunitas Jangkar Kelud terdiri dari koordinator daerah Jangkar Kelud di masing-masing kelompok wilayah Blitar, Kediri dan Malang. Masing-masing koordinator ini membawahi radio komunitas di lingkungannya masing-masing. Informasi melalui radio komunitas dari masing-masing wilayah dapat disalurkan kepada masyarakat sekitar Lingkar Kelud.

Strategi Membangun Dukungan dari Luar

Meskipun keberadaan radio komunitas adalah independen dan tidak komersil, namun radio komunitas memerlukan dukungan dari pihak luar agar eksistensinya tetap terjaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radio Jangkar Kelud memiliki beberapa pihak luar yang berkontribusi terhadap Jangkar Kelud. Pihak luar tersebut terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pemerintah. Ketiga elemen ini memberikan kontribusi positif dalam keberlangsungan radio komunitas. Keberadaan radio Jangkar Kelud di lingkungan pedesaan yang tentu akan sangat minim fasilitas memerlukan bantuan untuk mewujudkan fasilitas tersebut. Selain itu komunitas radio Jangkar Kelud perlu melakukan pendampingan

dalam rangka mengasah keahlian di bidang radio. Perguruan tinggi hadir untuk melakukan berbagai pelatihan kepada komunitas Jangkar Kelud.

Hasil penelitian dalam melakukan pendekatan menarik pihak luar terdiri dari strategi partisipasi, pengabdian masyarakat dan kerjasama. Ketiga bentuk kerjasama ini merupakan bentuk hubungan sosial yang tidak bernilai komersil. Bantuan apapun yang diberikan kepada komunitas radio “Jangkar Kelud” hanya berorientasi sosial tanpa ada campur tangan dari pihak tersebut. karena itu perlu melakukan seleksi yang ketat dalam menerima bantuan dari pihak luar, karena hal ini dapat mengurangi independensi radio komunitas itu sendiri. Berikut model strategi dalam membangun dukungan dari luar.

Gambar 2
Model Strategi Membangun Dukungan dari Luar



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2017

Gambar 2. Menjelaskan bahwa jaringan radio Jangkar Kelud juga berasal dari pihak luar radio. Pihak luar radio ini terdiri dari berbagai elemen yakni media luar, NGO, masyarakat, pemerintah, dan perguruan tinggi. Salah satu elemen yang terkait dengan lembaga swadaya masyarakat memiliki 2 kategori yakni lembaga swadaya masyarakat dalam negeri (KAPPALA) dan luar negeri (UNDP). Kedua lembaga ini memberikan kontribusi dalam mendorong

terbentuknya radio komunitas. KAPPALA menjadi kepanjangan dari perguruan tinggi (UPN Yogyakarta) dalam memberikan berbagai pelatihan terkait kebencanaan gunung. Sedangkan UNDP merupakan NGO yang konsen terhadap bantuan sosial dalam hal masalah bencana. Selain KAPPALA dan UNDP, lembaga swasta lain yang juga menjadi jaringan Jangkar Kelud adalah AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia). AJI berkontribusi memberikan berbagai pengalaman terkait keterampilan kejournalistikan kepada para remaja yang menjadi komunitas Jangkar Kelud. Berikut data hasil wawancara Prapto tanggal 15 Mei 2015.

“Kalau dengan AJI kita berhubungan baik meskipun tidak ada MOU ketika ada pelatihan selalu ikut, kalau dengan RRI dijadikan kontributor untuk mengirim berita kesana, RRI madiun untuk daerah sini, RRI Surabaya untuk Jawa Timur, dan ketika sudah sesuai dengan berita maka akan ditayangkan oleh RRI Jakarta” (Sumber diolah dari :Hasil wawancara dengan Wawancara Prapto, 15/5/2015).

Untuk membangun jaringan dari elemen pihak luar ini, “Jangkar Kelud” melakukan berbagai aktivitas sebagai sebuah strategi pendekatan kepada pihak tersebut. Strategi yang dilakukan terdiri dari tiga yaitu strategi partisipasi, strategi pengabdian kepada masyarakat dan strategi kerjasama. Strategi yang dilakukan bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana ketika bencana Kelud datang.

Strategi Pembelajaran Kebencanaan Sejak Usia Dini

Salah satu strategi pendidikan masyarakat pedesaan yang dapat ditempuh yaitu dengan media massa seperti siaran radio. Peranan utama yang dapat dilakukan media massa dalam pembangunan adalah membantu memperkenalkan perubahan sosial. Dalam hal ini media massa dapat dimanfaatkan untuk merangsang proses pengambilan keputusan, memperkenalkan suatu gagasan/ide serta menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat pedesaan. Dengan kata lain peranan media massa sebagai agen pembaharu (*Agent of social change*).

Target sasaran yang tepat sebagai *agent of social change* adalah anak muda/remaja. Ada perbedaan pembatasan usia muda, namun usia ini berkisar antara 12 – 20 tahun. Pada masa ini, ketertarikan terhadap gagasan-gagasan baru relatif sangat tinggi. Karena itu usia ini rentan dipengaruhi oleh berbagai hal baru. Sebagian besar komunitas “Jangkar Kelud” terdiri dari kumpulan remaja di Lingkar Kelud. Remaja adalah pemuda pemudi yang memiliki semangat tinggi untuk belajar keradioan. Dari yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan terkait radio komunitas, kemudian belajar otodidak bersama teman-teman remaja lainnya kemudian saat ini

telah memiliki keahlian *public speaking* dan teknis radio meskipun masih jauh dari sempurna. Maka dari itu dalam komunitas radio Jangkar Kelud diadakan pelatihan-pelatihan jurnalistik guna belajar menyampaikan berita-berita kebencanaan. Berikut data yang diperoleh terkait kegiatan tersebut.

"Jangkar Kelud adalah nama komunitas ini. Selain memiliki fungsi primer, di sini juga terdapat pelatihan jurnanisme: bagaimana membuat berita bagus dan menyampaikannya dengan bagus kepada khalayak. Dengan ini, informasi pengetahuan penanggulangan bencana bisa lebih optimal tersampaikan", ((Sumber diolah dari : Hasil wawancara dengan Wawancara Prapto, 15/5/2015).

Penelitian ini menemukan beberapa strategi dalam mendekati jaringan anak muda untuk bergabung dalam komunitas radio "Jangkar Kelud", diantaranya getuk tular, pemuda wajib latih mitigasi dan kurikulum sekolah terkait kebencanaan. Sebuah langkah yang cukup strategis mengingat mitigasi bencana menjadi persoalan yang *urgent* di lingkungan "Jangkar Kelud".

Keterlibatan remaja cukup tinggi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi program agar eksistensi radio terjaga. Karena itu selain program utama radio adalah mitigasi bencana, radio komunitas ini juga memberikan berbagai program yang menarik jiwa anak muda, misalnya acara musik, drama, *talkshow* yang melibatkan anak muda. Peneliti melihat keberadaan radio komunitas "Jangkar Kelud" memiliki dua fungsi, yakni: pembangunan sosial dan perlawanan. Fungsi pembangunan ditunjukkan dengan keberadaan radio komunitas "Jangkar Kelud" berperan dalam melakukan upaya pencegahan terhadap bencana Gunung Kelud. Dalam hal ini komunitas radio "Jangkar Kelud" berusaha memberikan ide/gagasan melalui program radio tersebut untuk tujuan melakukan pembangunan terhadap masyarakat di Lingkar Kelud.

Sedangkan fungsi kedua adalah sebagai upaya perlawanan dari anak muda. Upaya ini merupakan bentuk protes dari realitas yang terjadi di lapangan. Ketika bencana datang, banyak pihak luar datang untuk memberikan bantuan sosial terhadap para korban bencana Gunung Kelud. Masyarakat dievakuasi ke pengungsian dan memperoleh bantuan berupa makanan, obat-obatan dan lain-lain. Pada saat di pengungsian, masalah seringkali timbul, diantaranya kejenuhan, sakit, stres, rasa takut dan bahkan konflik antar pengungsi dalam pengungsian. Hal ini merupakan akibat dari tingkat kejenuhan yang tinggi karena tidak melibatkan masyarakat dalam proses evakuasi. Masyarakat hanya disuruh mengungsi, kemudian pada saat aman dikembalikan ke rumah masing-masing.

Langkah ini dinilai sebagai sebuah langkah yang salah oleh komunitas “Jangkar Kelud”. Masyarakat perlu terlibat langsung dalam proses evakuasi karena mereka yang mengetahui secara pasti keadaan dan kebutuhannya pada saat bencana datang. Masyarakat harus meminimalisir dampak bencana Gunung Kelud melalui kesadaran terhadap bencana itu sendiri. Melalui radio komunitas “Jangkar Kelud” masyarakat menjadi memiliki pemahaman luas terkait kebencanaan dan pada akhirnya bencana bukan dihadapi sebagai suatu hal yang menakutkan tetapi bagaimana mengantisipasinya agar dapat meminimalkan akibat bencana itu sendiri.

Peneliti melihat fenomena diatas sesuai dengan konsep konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger & Luckmann yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Berger & Luckmann, 2016). *Aspek eksternalisasi* adalah pengalaman manusia untuk mendirikan dan mengembangkan suatu kelembagaan “Realitas Objektif”. Radio komunitas “Jangkar Kelud” adalah sebuah realitas yang dialami oleh masyarakat Lingkar Kelud sebagai akibat dari kondisi masyarakat yang memerlukan solusi atas permasalahan kebencanaan Kelud. Proses ini didapat manusia secara terus menerus baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya.

Aspek objektivasi merupakan proses dari eksternalisasi dari tindakan manusia menjadi mengobjektivasi sehingga mencapai dari objektivitas. Meskipun dengan keterbatasan yang cukup besar dari aspek fasilitas dan keahlian terkait keradioan, namun masyarakat memahami sebagai sebuah proses yang harus dipelajari dan dilakukan. Saat ini telah menghasilkan produk-produk (dari program radio komunitas) yang merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat Lingkar Kelud. Aspek internalisasi adalah momen dimana manusia berada dalam kesadaran untuk bersosialisasi atau berinteraksi. Jaringan yang terbentuk dari komunitas radio ini merupakan hasil interaksi sosial yang melibatkan pihak lain di luar komunitas “Jangkar Kelud”.

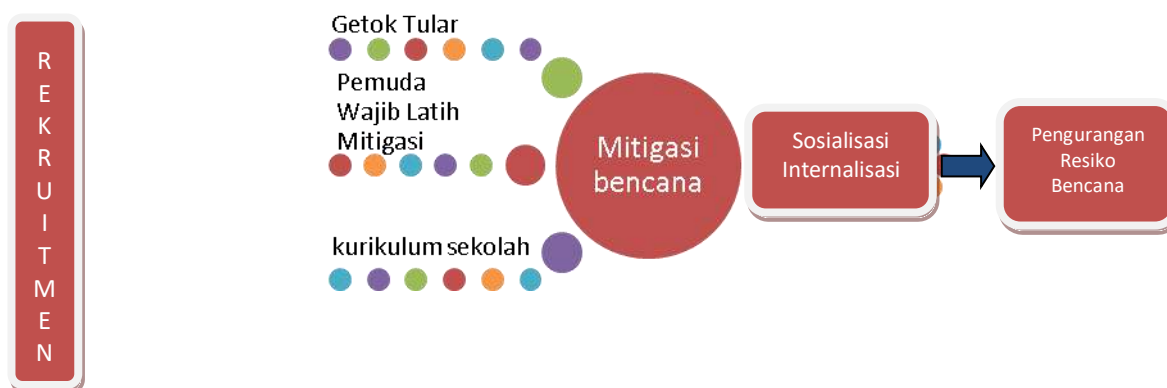
Keterlibatan masyarakat terhadap radio komunitas “Jangkar Kelud” ini menurut teori partisipasi (Nelson, 1982) disebut sebagai partisipasi kolektif. Masyarakat melibatkan diri dalam radio komunitas sebagai sebagai satu kesatuan yang memiliki tujuan dan maksud satu yakni pencegahan bencana Kelud. Partisipasi aktif dari berbagai elemen juga tergolong dalam kategori ini. Pihak luar yang berkontribusi baik dari pemerintah maupun non pemerintah merupakan bentuk keterlibatan sosial yang berorientasi pada satu tujuan, yakni bantuan sosial untuk pencegahan bencana Kelud.

Melalui sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana melalui jalur pendidikan. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya tidak hanya memberikan *transfer of knowledge* saja, namun juga harus mampu memberikan kecakapan dan keterampilan untuk kelangsungan hidup bagi siswa ketika sudah terjun di masyarakat. Mitigasi bencana merupakan bagian dari keterampilan untuk kelangsungan hidup siswa. Siswa merupakan orang yang paling cepat menstransfer ilmu yang didapat dari sekolah untuk keluarga dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan anak usia sejak dini untuk memahami mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat sadar bencana. Sehingga ketika terjadi bencana siswa, guru, dan masyarakat tidak lagi kebingungan, panik, karena telah memahami bagaimana cara mengurangi risiko bencana.

Kegiatan kurikulum ekstra sekolah merupakan media yang tepat untuk menanamkan mitigasi bencana yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Penanaman mitigasi bencana sejak dini di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan cerita bergambar, latihan simulasi ringan, maupun menyisipkan materi mitigasi bencana ke dalam materi pelajaran yang sesuai. Pemberdayaan anak sejak dini untuk memahami mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat sadar bencana. Dengan harapan pengetahuan yang didapat dari sekolah dapat ditularkan pada lingkungan sekitar dalam rangka mengurangi risiko bencana.

Dari hasil penelitian diatas, peneliti dapat menggambarkan jaringan generasi muda sebagai aset kebencanaan di Jangkar Kelud sebagai berikut:

Gambar 3 Model Pengembangan Sosial Anak Muda sebagai Aset Relawan Kebencanaan



Sumber: Data Diolah Peneliti, 2019

Kesimpulan

Model pengembangan sosial Radio Komunitas “Jangkar Kelud” mengoptimalkan komunitas masyarakat di dalam Lingkaran Kelud melalui pendekatan keakraban dan keterlibatan usia muda sebagai “aset kebencanaan” dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai lokal (*local wisdom*). Sedangkan jaringan luar lingkaran kelud berasal dari pihak lain di luar komunitas yang memiliki kepedulian sosial terhadap bencana Gunung Kelud. Model strategi pembelajaran kebencanaan sejak usia dini dengan sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana melalui jalur pendidikan sebagai aset penerus pengiat Jangkar Kelud. Hal ini merupakan usaha untuk pengembangan modal sosial di kawasan rawan bencana Gunung Kelud sehingga anak-anak kecil akan memiliki kesadaran akan hidupnya di atas bayang-bayang bencana Gunung Api yang aktif sehingga mereka setidaknya mengurangi risiko bencana Gunung Kelud secara mandiri.

Daftar Pustaka

- Berger, P., & Luckmann, T. (2016). The social construction of reality. In *Social Theory Rewired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2015.05.005>
- Dyan, Y., Harumike, N., & Miftakhul, A. (2018a). “ Interactive Broadcast of Memorandum of Understanding (MoU) between Blitar Government and Village Government in the Supervision of the. *JARES*, 3(2), 1–9.
- Dyan, Y., Harumike, N., & Miftakhul, A. (2018b). Model Siaran Radio Interaktif Dalam Waspada Penyakit Difteri Kembali Serang Warga Kabupaten Blitar (Analisis Resepsi Program Radio Persada “ Hallo Bupati ”). *Prosiding IAIN Kediri*, 207–222.
- Heri, S. (2014). STRATEGI KOMUNIKASI RADIO KOMUNITAS DALAM MEMPERTAHKAN EKSISTENSINYA. *Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan*.
- Huda, A. M., Bajari, A., Muhtadi, A. S., & Rahmat, D. (2018). The Characteristics of Jangkar Kelud Radio as Disaster Community Radio Karakteristik. *The Messenger*, 10(2), 144–149. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v10i2.771>
- Komariah, K., Novianti, E., & Subekti, P. (2014). Pemanfaatan Radio Komunitas Di Masyarakat ... *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(01), 35–49.
- KPI. (2015). | *Komisi Penyiaran Indonesia* | *Peraturan Terkait Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia 1* (Komisi Pen). Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.
- LIPI. (2014). siagabencana. Retrieved from www.siagabencana.lipi.go.id
- Masduki. (2005). Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia. *UAJ*.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. Book. <https://doi.org/10.4135/9781446262467>
- Moleong, L. J. P. D. M. A. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1039/b709107a>
- Nawawi, H. (1993). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nelson, B. dan W. (1982). *Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang* (Andi Offse). Yogyakarta.

- Nuryana, M. (2003). *Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Konteks Pengembangan Ketahanan Sosial: Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Balatbang Depsos RI.
- Rihartono, S. (2015). Strategi Pengelolaan Radio Siaran Di Tengah-Tengah Perkembangan Teknologi Internet. *Profetik*, 51–64.
- Ritzer, G. (2001). Teoría sociológica moderna. *Fundamentos Teóricos Da Comunicação*. Rio de Janeiro <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sinaga, C. N. A. (2017). Strategi Komunikasi Radio Komunitas Dalam Mempertahankan Eksistensinya. *Interaksi*. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(12\)70510-7](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(12)70510-7)
- Takariani, C. S. . (2013). Eksistensi Media Lokal. *E-Journal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*, 11(1), 23–38.

Penerimaan Khalayak Terhadap Tayangan Infotainment Tentang Fenomena Artis Lepas Jilbab (Studi Pada Mahasiswa Muslimah di Malang Berdasarkan Kelompok Sosial)

Winda Hardyanti

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

Jalan Raya Tlogomas No. 246, Tlogomas, Lowokwaru, Babatan, Tegalondo, Kec. Karang

Ploso, Kota Malang, Jawa Timur 65144

winda@umm.ac.id

Abstract

The phenomenon of the artist off the Veil in some time ther last became a topic of conversation in the media, was no exception in the television media. One of celebrity in Indonesia, Rina Nose, suddenly took off the veil she has been wearing the last few years. Impressions of infotainment offers the meaning that action ther is Nose Rina action is sad or concern. Based on these problems, researchers want to find out what kind of audience acceptance against the related phenomenon of infotainment news footage off the headscarf artist Rina Nose. There are a lot of messages that are displayed through related cases Rina infotainment news Nose. Number of messages cannot be removed from the question of the multiplicity of viewpoints used media. The message has more than one potential readings. Through ther study researchers will be able to find out where the audience has a dominant hegemonic position, negotiated reading and oposisional, where the designation cannot be separated from the background to the life of each subject research. This research uses the research methods analysis of reception using the qualitative approach with in-depth interview data collection techniques. Ther research is expected to be able to give a new perspective on development-related issues of the current mass media through a scientific approach. Impressions of infotainment construct women who take off Jilbab with negative construction. The results of ther research are found subject CP (veiled non cottage) and BN (veiled-off veil-veiled again) belonging to the dominant hegemonic subject reading, DR. (not veiled) included in the oppositional reading and IM subjects (off the veil) including negotiated reading for refusing. Decisions they refuse/accept/agree/disagree against the concept of meaning offered by media influenced by their background educational background in religious families, the experience of living in a veiled and the influence of peer group them. Based on the results of the research it is known that audiences receive the concept of the artist off the Jilbab in a variety of types of acceptance. The subject that comes from a group of veiled non pondok pesantren and a subject that never had the experience of taking off the veil before masukd in the dominant hegemonic category is influenced by the background of religious education in a family that was good enough and too influenced by experiences/mistakes of her jilbab. While the subject of the entry in the category of oppositional reading are those who reject the concept of social group comes from the infotainment not veiled because he considered that her experiences during ther time is not a problem although not veiled Muslim women. While the subject of the entry category negotiated reading is a subject that includes Muslim social group but is experiencing the same phenomenon with artist Rina Nose. The subject was influenced by her background as a person who has the principle of free and tend to be liberal.

Keywords: Audience, Infotainment News, Receptional Analysis

Abstrak

Fenomena artis lepas jilbab dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi sebuah topik pembicaraan di media, tak terkecuali di media televisi. Salah satu fenomena itu adalah Rina Nose yang secara tiba-tiba melepas Jilbab yang telah ia kenakan beberapa tahun terakhir. Tayangan infotainment menawarkan makna bahwa tindakan Rina Nose ini adalah tindakan yang miris atau memprihatinkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui seperti apa penerimaan khalayak terhadap tayangan berita infotainment terkait fenomena lepas jilbab artis Rina Nose ini. Ada banyak pesan yang ditampilkan melalui berita infotainment terkait kasus Rina Nose ini. Banyaknya pesan tak bisa dilepaskan dari persoalan banyaknya sudut pandang yang digunakan media. Pesan memiliki lebih dari satu potensi pembacaan. Melalui penelitian ini peneliti akan bisa mengetahui mana saja khalayak yang memiliki posisi hegemonic dominant, negotiated reading dan oposisional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian resepsi analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengembangan perspektif baru terkait isu-isu media massa terkini melalui pendekatan yang ilmiah. Tayangan infotainment mengkonstruksi perempuan yang melepas jilbab dengan konstruksi yang negatif. Hasil penelitian ini adalah ditemukan subyek CP (berjilbab non pondok) dan BN (berjilbab-lepas jilbab-berjilbab lagi) termasuk ke dalam dominant hegemonic reading, subyek DR (tidak berjilbab) termasuk dalam oppositional reading dan subyek IM (lepas jilbab) termasuk negotiated reading karena menolak. Keputusan mereka menolak/menerima/sepakat/tidak sepakat terhadap konsep makna yang ditawarkan oleh media dipengaruhi oleh latar belakang mereka yakni latar belakang pendidikan religi di keluarga, pengalaman hidup dalam berjilbab dan pengaruh dari peer group mereka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa khalayak menerima konsep artis lepas jilbab dalam berbagai macam jenis penerimaan. Subjek yang berasal dari kelompok berjilbab non pondok dan subjek yang pernah mengalami pengalaman melepas jilbab sebelumnya masuk dalam kategori hegemonic dominant dipengaruhi oleh latar pendidikan agama di keluarga yang cukup baik dan juga dipengaruhi oleh pengalaman/kesalahan melepas jilbabnya. Sedangkan subjek yang masuk dalam kategori oppositional reading adalah mereka yang menolak konsep dari infotainment berasal dari kelompok sosial tidak berjilbab karena ia menganggap bahwa pengalamannya selama ini tidak masalah meski muslimah tidak berjilbab. Sedangkan subjek yang masuk kategori negotiated reading adalah subjek yang termasuk kelompok sosial muslimah namun mengalami fenomena yang sama dengan artis Rina Nose. Subjek dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai seseorang yang memiliki prinsip bebas dan cenderung liberal.

Kata Kunci: Analisis Resepsi, Berita Infotainment, Khalayak

<i>Submite</i>	: 08 Februari 2019
<i>Review</i>	: 29 April 2019
<i>Accepted</i>	: 24 Juni 2019
<i>Surel Correspondensi</i>	: yuli@usm.ac.id

Pendahuluan

Memahami pesan dalam media merupakan praktik yang problematik, sebagaimana itu tampak transparan dan alami. Pengiriman pesan secara satu arah akan selalu diterima atau dipahami dengan cara yang berbeda. Khalayak bersifat aktif dalam memaknai sebuah pesan

media. Sehingga pesan yang disampaikan media selalu diterima dan dipahami secara berbeda-beda. Bahkan peristiwa yang sama dapat diterjemahkan lebih dari satu makna.

Berita merupakan sebuah rekonstruksi realita. Begitu pun dengan pemberitaan yang dimuat di sejumlah media massa. Dalam membuat berita, seorang jurnalis melakukan rekonstruksi dari realita yang telah ia lihat, ia baca dan ia analisis. Berita di media massa memang bukan realitas sosial itu sendiri melainkan realitas media yang juga sudah melalui proses konstruksi atas realitas sosial. Dalam menyajikan realitas termasuk konflik, media massa berfungsi sebagai alat transformasi penyampaian ideologi media massa tersebut pada khalayak, dapat meredakan, memperuncing atau berusaha netral. Saat pengkonstruksian realitas, media massa menggunakan pilihan bahasa dan simbol. Pilihan tersebut akan mempengaruhi makna suatu realitas dan secara sengaja atau tidak, ideologi hadir dalam sebuah realitas yang disajikan media. Ketika media massa mengkonstruksi sebuah realitas, maka hal tersebut berkaitan dengan bagaimana wartawan memandang suatu masalah. Selain itu, terdapat juga pengaruh cara pandang atau ideologi media massa tersebut.

Sobur berpendapat, media sebagai ruang di mana berbagai ideologi dipresentasikan. Ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi, dan di sisi lain sebagai kontrol atas wacana publik (Sobur, 2001). Waktu rata-rata yang digunakan orang untuk mengkonsumsi media bervariasi. Namun Shirley Biagi mengatakan rata-rata orang menghabiskan lebih banyak waktu dengan menggunakan media daripada tidak menggunakan media. Dalam sehari 1.440 menit, 41% waktu khalayak digunakan untuk menggunakan media (590 menit), 33% digunakan untuk istirahat (475 menit) dan 26% bebas dari media yaitu sekitar 375 menit (Biagi, 2010).

Media massa juga berperan menandakan realitas dalam pandangan tertentu dan menunjukkan bagaimana realitas dapat memberi makna dalam penyusunan fakta yang ada. Isi media massa selalu dipengaruhi oleh ideologi wartawan dan ideologi media itu sendiri. Sengaja atau tidak, media massa membentuk realitas yang ada sesuai dengan tujuan media (Syas, 2015). Stuart Hall pernah mengatakan pesan dan realitas adalah efek dari ideologi media massa. Efek dari konstruksi media akan tampak nyata, natural dan benar. Konstruksi realitas ini sangat tergantung dari bagaimana sebuah fenomena atau fakta dimaknai atau ditandakan. Dengan demikian, media massa dapat menjadi sarana representasi ideologi dalam wacana publik tertentu

Infotainment sebagai salah satu bentuk berita hiburan khas dunia selebritis, meskipun masih ada yang meragukan apakah infotainment adalah produk karya jurnalistik, masih menjadi tayangan yang mendapat tempat di hati masyarakat meskipun kualitasnya masih dibawah standar KPI. Data dari survey yang dilakukan oleh KPI tahun 2017 menyebutkan bahwa untuk program infotainment, tidak ada satupun lembaga penyiaran yang mencapai indeks ≥ 3 . Indeks tertinggi hanya sebesar 2.61 yang diperoleh NET TV, diikuti oleh Trans TV dengan indeks 2.60 dan Indosiar dengan indeks 2.55. (KPI, 2017)

Gambar 1. Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II 2017



INDEKS INDIKATOR KUALITAS PROGRAM INFOTAINMENT BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN

No	Indikator Kualitas Program Infotainment	STASIUN TV								
		Global TV	Indosiar	MNC TV	Net TV	RCTI	RTV	SCTV	Trans 7	Trans TV
1	Informatif	2,38	2,43	2,40	2,45	2,22	2,17	2,22	2,32	2,40
2	Menghormati Kehidupan Pribadi	2,05	2,24	2,28	2,29	2,13	2,08	2,01	2,07	2,32
3	Menghormati Nilai2 Kesukuan, Agama, Ras & Antar Golongan	2,66	2,40	2,70	2,72	2,59	2,55	2,55	2,52	2,66
4	Menghormati Nilai & Norma Kesopanan & Kesusilaan	2,54	2,61	2,50	2,61	2,49	2,48	2,52	2,48	2,59
5	Menghormati Orang & Kelompok Tertentu	2,63	2,66	2,55	2,60	2,61	2,55	2,61	2,58	2,67
6	Tidak Bermuatan Kekerasan	2,71	2,66	2,64	2,79	2,50	2,60	2,62	2,69	2,75
7	Keberimbangan	2,68	2,70	2,64	2,75	2,55	2,47	2,56	2,59	2,69
8	Menghormati Narasumber	2,68	2,67	2,61	2,70	2,48	2,58	2,41	2,55	2,70
INDEKS RATA-RATA		2,54	2,55	2,54	2,61	2,44	2,43	2,44	2,47	2,60

Sumber : diolah dari KPI

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa seluruh stasiun TV memiliki program infotainment. Program infotainment memang dirancang dan dikemas sedemikian rupa agar mampu menarik minat penonton media. Rating program infotainment cukup tinggi. Data AGB Nielsen tahun 2010 menunjukkan data yang cukup jelas tentang perbandingan audience share dari tayangan infotainment. Tingginya rating yang dimiliki oleh hampir semua tayangan infotainment, membuat tayangan ini menjadi sajian program wajib yang harus dimiliki oleh mayoritas stasiun televisi (lihat data survey KPI).

Gambar. 2 Hasil survey rating AGB Nielsen tahun 2010

Program	Channel	Rata-rata Jumlah Penonton	Rating (%)	Perbedaan Jumlah Penonton dengan Mei
Silet	RCTI	1.052.000	3.1	34%
Investigasi Selebriti	TRANS	853.000	2.5	18%
Kabar-Kabari	RCTI	725.000	2.2	42%
Hot Shot	SCTV	715.000	2.1	6%
Cek & Ricek	RCTI	711.000	2.1	41%

Sumber: diolah dari KPI

Fenomena artis lepas Jilbab menjadi sebuah fenomena yang menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Rina Nose. Tayangan berita infotainment begitu gencar memberitakan keputusan Rina Nose ini. Media pun memerankan dirinya sebagai forum untuk memperebutkan hegemoni di dalam masyarakat seperti apa kata Gramsci. Tak hanya kalangan ibu-ibu saja, yang notabene dianggap sebagai penggemar infotainment, yang gemar membicarakan fenomena ini melainkan juga gadis-gadis remaja, mahasiswa, pelajar menjadikan topik infotainment sebagai topik yang seksi dalam mengisi waktu bercengkerama dengan teman. Sukarelawati dalam Hendriwiyan mengatakan bahwa Berdasarkan survei yang dilakukan di sebuah daerah, didapatkan hasil bahwa penonton infotainment adalah 73% perempuan dan 46,25% ibu rumah tangga. Berdasarkan pasar yang ada infotainment beralih menjadi industri hiburan, dimana kehidupan sehari-hari artis adalah objek yang menarik untuk “dijual” (Hendriwinaya, 2015)

Infotainment baik berupa berita langsung maupun tidak langsung akan meneguhkan apa yang dipikirkan orang sehingga menyebabkan masyarakat terbiasa dengan hal-hal yang dulu dianggap tabu dan kini masyarakat lebih permisif (serba membolehkan) terhadap masalah yang bertentangan dengan norma. Berita remeh temeh seorang selebriti dapat menjadi berita heboh akibat disiarkan berulang kali, bahkan tidak jarang dibumbui pernyataan atau opini dari presenternya dengan menggunakan kata-kata yang provokatif dan bombastis atau presenternya memberikan komentar atas suatu persoalan dengan mencibir atau menganggap hal tersebut sebagai lelucon (Fachruddin, 2016). Tak terkecuali informasi terkait keputusan Rina Nose melepas Jilbabnya. Pada tayangan infotainment Go Spot RCTI yang tayang pada 30 November

2017, infotainment ini mengangkat judul Polemik Rina Nose Lepas Jilbab. Pemberitaan Go Spot ini menghadapi keputusan Rina Nose melepas Jilbab dengan kritikan Ustad Abdus Somad (UAS) (“GO SPOT - Polemik Rina Nose Lepas Hijab [30 NOVEMBER 2017],” 2017)

Narasi dari beberapa teks komentar yang ditulis oleh para netizen mengisyaratkan bahwa media melalui relasi kuasanya membentuk sebuah stigma bahwa keputusan Rina Nose melepas jilbab adalah fenomena yang memprihatinkan, miris, disayangkan. Tak hanya infotainment, berita-berita di media online pun membuat judul-judul yang memojokkan atau menyudutkan pilihan hidup yang diambil oleh Rina Nose. Tayangan infotainment menawarkan tawaran makna bahwa apa yang dilakukan oleh Rina Nose tidaklah layak ditampilkan oleh seorang public figure. Di tayangan infotainment Insert 15 November 2017 menyebutkan bahwa keputusan Rina Nose melepas jilbab adalah keputusan menggemparkan. Go Spot RCTI 10 November 2017 memberi pernyataan bahwa keputusan melepas jilbabnya sebagai sesuatu hal yang heboh. Sebagai public figure, Rina Nose dituntut untuk menjadi panutan akan sebuah konsisten mengenakan penutup aurat, bukan malah mempertontonkan ketidakkonsistenan seperti itu. Demikianlah makna yang ingin ditawarkan oleh media.

Fenomena kontroversial yang dilakukan oleh Rina Nose sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Tercatat dalam ingatan publik, artis penyanyi Tri Utami atau biasa disebut mbak Iik, presenter kondang Dewi Hughes, Tania Nadhira mantan istri pesinetron Tommy Kurniawan, dan yang tak kalah kontroversial adalah artis Marshanda yang memutuskan melepas Jilbabnya setelah bercerai dengan suaminya Ben Kasyavani tahun 2014 silam.

Fenomena artis lepas Jilbab ini tentu memantik perdebatan tersendiri di kalangan masyarakat. Ada yang pro dan menganggap bahwa keputusan Rina Nose itu adalah keputusan yang biasa saja, karena hal itu merupakan hak pribadi Rina Nose. Ada pula yang kontra, karena sebagai public figure Rina Nose adalah contoh dan panutan di masyarakat. Terlebih selama ini di dunia keartisan, Rina Nose dikenal sebagai artis dengan *track record* baik (Futari, 2018).

Proses mengenakan Jilbab atau menutup aurat adalah sebuah proses meneguhkan identitas diri perempuan sebagai muslimah. Uskup Canterbury, Rowan Williams percaya jilbab adalah pilihan pribadi muslimah. Melalui jilbab, muslimah coba memperlihatkan identitasnya dalam masyarakat yang berbeda. Jilbab itu merupakan bentuk penegasan identitas seseorang akan keyakinan yang dianut (Sasongko, n.d.). Proses ini pastinya telah melalui tahapan-tahapan

pertimbangan yang dilakukan oleh seorang manusia. Al Quran sebagai kalam Allah yang diyakini oleh umat Islam telah memerintahkan dengan jelas kepada setiap perempuan muslim yang telah mencapai masa baligh untuk mengenakan Jilbab atau menutupi auratnya. Seperti yang tertulis pada QS Al A'raf ayat 26, QS Al Ahzab 59 dan dipertegas di QS An Nuur 31.

'Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebgai dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.' (QS Al Araf 26)

Di QS Al Ahzab 59 Allah berfirman demikian,

"Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, oleh sebab itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

Perintah berJilbab ini dipertegas dalam QS An Nuur 31

'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung'

Jilbab adalah identitas kaum muslimah. Menurut James Marcia, pembentukan identitas merupakan tugas rumit yang harus diselesaikan secara bertahap, dan tanpa disadari. James Marcia memulai proses pembentukan identitas ini mulai dari masa remaja akhir yang dikemukakan oleh Marcia yaitu remaja berusia 18-22 tahun, mereka sudah memasuki perguruan tinggi, dan berada diantara semester satu sampai lima. Menurut Erikson, identitas adalah konsep yang koheren tentang diri sendiri terdiri dari tujuan, nilai-nilai dan keyakinan pada seseorang yang komitmennya sudah solid. Dalam teori ini disebutkan bahwa ada empat status identitas yang dapat dialami oleh manusia yang ada hubungannya dengan aspek kepribadiannya, yaitu : *Identity Achievemen*, *Foreclosure*, *Moratorium* dan *Identity Diffusion*. Keempat kategori ini

dibedakan atas ada atau tidaknya krisis dan komitmen pada manusia tersebut. Kedua hal tersebut dipandang oleh Erikson sebagai hal yang penting dalam pembentukan identitas (Bustomi, 2016)

Selain teori identitas Marcia, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori encoding-decoding Stuart Hall. Pendekodean merupakan proses menerima dan membandingkan makna pesan yang telah tersimpan di benak khalayak. Menurut Stuart Hall khalayak melakukan pendekodean terhadap pesan melalui tiga sudut pandang atau posisi: dominan-hegemonis, ternegosiasi, dan oposisional. Hall berpendapat bahwa individu-individu bekerja di dalam sebuah kode yang mendominasi dan menjalankan kekuasaan yang lebih besar daripada yang lainnya. Ia menyebut hal ini posisi dominan-hegemonis (dominant-hegemonic position). Posisi kedua adalah posisi ternegosiasi (negotiated position) yaitu anggota khalayak dapat menerima ideologi dominan tetapi akan bekerja dengan beberapa pengecualian terhadap aturan budaya. Posisi oposisional (oppositional position) terjadi ketika anggota khalayak mensubstitusikan kode alternatif bagi kode yang disediakan oleh media. Konsumen yang kritis akan menolak makna sebuah pesan yang dipilih dan ditentukan oleh media dan menggantikannya dengan pemikiran mereka sendiri mengenai subjek tertentu. (West, Richard dan Turner, 2008)

Bagi Hall, proses decoding dan encoding pada diri manusia dipengaruhi oleh beberapa hal. Kegiatan penerimaan pesan diawali dengan proses decoding yang merupakan kegiatan yang berlawanan dengan proses encoding. Decoding adalah kegiatan untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima. (Morissan, 2008). Decoding merupakan proses mentransformasi (merubah) dan menginterpretasi pesan-pesan pengirim menjadi pendapat penerima dan sangat dipengaruhi oleh kerangka berpikir atau keluasan pengalaman penerima. Komunikasi yang efektif akan dapat dicapai jika suasana setara atau berbagai arti atau pengertian dapat dihadirkan atau telah dibangun sebelumnya antara pengirim dan penerima pesan. Dalam decoding, penerima menafsirkan pesan dan diterjemahkan menjadi informasi yang berarti. Hambatan komunikasi yang sering muncul pada langkah decoding, dikarenakan penerima (receiver) menafsirkan pesan sesuai dengan kebutuhan fisiologis dan motif. (Dubrin, 2011)

Encoding adalah proses pengorganisasian ide menjadi serangkaian simbol-simbol, seperti kata-kata dan gerak tubuh, yang dirancang untuk berkomunikasi dengan penerima (receiver).

Proses encoding menimbulkan pengembangan pesan yang berisikan informasi atau pesan yang diharapkan dapat disampaikan oleh sumber atau pengirim pesan. Pesan-pesan dapat diberikan dalam berbagai bentuk dan bisa juga dalam bentuk simbol atau tanda. Pilihan kata sangat mempengaruhi efektivitas berlangsungnya komunikasi. Pemilihan yang tepat dari kata-kata atau symbol meningkatkan kemungkinan bahwa pengkodean dan komunikasi akan mengalir dengan lancar. Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Jika penerima tidak mampu membaca sandi atau memahami pesan, komunikasi akan gagal. Seperti memilih media yang tepat dari komunikasi, melibatkan atau membuat pilihan yang tepat dari banyak pilihan yang tersedia, menentukan efektivitas encoding (Dubrin, 2011).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerimaan khalayak terhadap fenomena artis lepas Jilbab seperti yang terjadi pada Rina Nose. Teori yang dipakai dalam penelitian ini selain menggunakan teori identitas diri yang dikemukakan oleh James Marcia, juga menggunakan teori encoding-decoding dari Stuart Hall. Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis data studi resepsi yang memandang pemirsa televisi sebagai “*producer of meaning*” bukan hanya sebagai konsumen dari isi media. Khalayak media dianggap sebagai khalayak yang aktif, bukan khalayak pasif yang menerima mentah-mentah isi media begitu saja.

Teks media biasanya mengarahkan pemaknaan khalayak ke arah yang diinginkan. Untuk mengetahui makna dominan yang ditawarkan oleh media, kita bisa melakukan analisis struktur internal dari teks. Khalayak mungkin melakukan pembacaan alternatif yang berbeda dengan pemaknaan yang ditawarkan oleh media. Biasanya perbedaan pemaknaan muncul karena perbedaan posisi sosial dan/atau pengalaman budaya antara pembaca dan produsen media. Hall dalam Davis dalam Uswatun, menekankan bahwa konsumsi bukanlah kegiatan yang pasif, melainkan kegiatan yang aktif karena konsumsi juga dapat menghasilkan sebuah makna tertentu.

Pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak menurutnya dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. *Dominant-hegemonic position*, yaitu khalayak menerima dan mereproduksi kode teks yang sama dengan produser pesan. Pada posisi ini khalayak berpegang pada makna yang ditawarkan dalam media
2. *Negotiated position*, yaitu khalayak memaknai dan menerima secara luas sebagian kode teks tetapi kadang menentang atau mengubahnya sesuai dengan cara pandang, pengalaman, dan minat. Posisi ini menunjukkan adanya kontradiksi
3. *Oppositional position*, yaitu ketika khalayak mengembangkan interpretasi yang sama sekali berbeda dengan kode teks. Posisi ini terjadi ketika khalayak berada dalam situasi sosial yang berlawanan dengan kode teks dominan sehingga membuat mereka menolak teks tersebut. Dalam posisi ini, khalayak dapat mengajukan alternatif kode yang berbeda. (Uswatun, 2017)

Penelitian dengan metode analisis resepsi ini selain bisa mendapatkan makna atas pemahaman dan interpretasi teks media, kita juga akan mendapatkan penjelasan-penjelasan mengenai alasan mengapa terjadi perbedaan interpretasi dalam diri pembaca. Kemudian kita juga jadi mengetahui mengapa para pembaca dapat membaca teks yang sama secara berbeda. Dari analisis penerimaan khalayak ini kita juga bisa mendeskripsikan faktor-faktor kontekstual yang memungkinkan perbedaan pembacaan dan bagaimana teks-teks kebudayaan dimaknai sedemikian rupa oleh khalayak dan seperti apa pengaruhnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Perbedaan kelompok sosial berhubungan dengan latar belakang kehidupan yang berbeda. Peneliti sengaja memilih kelompok sosial dari mahasiswi muslimah yang memiliki beragam pilihan dalam berjilbab dengan harapan akan muncul diferensiasi resepsi yang disyaratkan oleh analisis resepsi. Dengan kelompok sosial berbeda latar belakang yang dimiliki tentunya berbeda yang akan memengaruhi derajat/ kategorisasi penerimaan khalayak. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerimaan khalayak terhadap tayangan infotainment tentang fenomena artis lepas Jilbab berdasarkan subjek yang berasal dari kelompok sosial yang berbeda?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis resepsi atau studi resepsi. Metode analisis resepsi bertujuan untuk mengetahui pemaknaan khalayak tentang konsep yang ditawarkan oleh tayangan infotainment. Secara

metodologi, reception analysis termasuk dalam paradigma interpretive konstruktivis, menurut Neuman termasuk dalam pendekatan interpretive “*Interpretive is the systematic analysis of socially meaningful action through the direct detailed observation of people in natural settings in order to arrive at understandings and interpretations of how people create and maintain their worlds*”. Artinya paradigma interpretif dalam konteks penelitian sosial digunakan untuk melakukan interpretasi dan memahami alasan-alasan dari para pelaku terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara dari para pelaku untuk mengkonstruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka berikan kepada kehidupan tersebut (Hadi, 2013)

Metode analisis resepsi melibatkan khalayak sebagai partisipan aktif dalam melakukan interpretasi makna dari teks yang mereka baca. Apa yang ditampilkan media akan dipahami sebagai sebuah proses yang masuk akal dan dikonstruksi melalui pembacaan gambar dan teks. Pemaknaan akan teks dan gambar tersebut adalah produk interpretasi dari penonton itu sendiri. Media berperan sebagai penyampai informasi dan menjadi penyaring dan memberi makna dari informasi yang ditampilkan. Pemaknaan ini bersifat luas dan tidak terikat oleh ruang dan waktu.

Menurut Tri Nugroho Adi dalam jurnalnya yang berjudul Mengkaji Khalayak Media Dengan Penelitian Resepsi, dijelaskan bahwa ada tiga elemen pokok dalam metodologi resepsi yang secara eksplisit bisa disebut sebagai “*the collection, analysis, and interpretation of reception data*”. Ketiga elemen tersebut adalah :

1. Mengumpulkan data dari khalayak.

Dalam uraian ini lebih ditekankan perolehan data melalui wawancara kelompok yang akrab disebut focus group discussion. Perlu ditekankan bahwa dalam analisis resepsi, perhatian utama dalam wawancara mendalam secara kelompok tetap harus berpegang pada “wacana yang berkembang setelah diantarai media dikalangan pemirsa” artinya, wawancara berlangsung untuk menggali bagaimana sebuah isi pesan media tertentu menstimuli wacana yang berkembang dalam diri khalayaknya.

2. Menganalisis hasil atau temuan dari rekaman proses jalan focus group discussion (FGD).

Setelah FGD sebagaimana langkah pertama di atas dilakukan, maka tahap berikutnya peneliti akan mengkaji catatan wawancara tersebut yang berupa ratusan transkrip wawancara yang di dalamnya kemudian bisa disarikan berbagai kategori pernyataan, komentar dsb, dari peserta

diskusi. Dalam tahap ini peneliti bisa memanfaatkan metode analisis wacana sebagaimana lazimnya dipakai dalam studi literer untuk menelaah makna intersubjektif dan menginterpretasikan makna yang tersirat dibalik pola ketidaksepakatan pendapat di antara peserta dan sebagainya yang mungkin muncul dalam diskusi. Dalam tahap ini, peneliti kemudian tidak sekedar melakukan kodifikasi dari beberapa pendapat yang sejalan atau yang tidak sejalan melainkan lebih mengkonstruksi proses terjadinya wacana dominan dan sebaliknya, di lihat dari berbagai latar belakang sosio kultural peserta diskusi.

3. Tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap pengalaman bermedia dari khalayaknya.

Perlu dicatat bahwa dalam tahap ini sebenarnya seorang peneliti tidak sekedar mencocokkan model pembacaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam acuan teoritis melainkan justru mengkolaborasikan dengan temuan yang sesungguhnya terjadi di lapangan sehingga memunculkan model atau pola penerimaan yang riil dan lahir dari konteks penelitian yang sesungguhnya (Adi, 2012). Dalam proses FGD, peneliti akan mencatat keyword atau kata kunci dan memberikan pemaknaan terhadap kata kunci yang disampaikan oleh subjek dan merelasikannya dengan kategori-kategori dalam analisis resepsi. Lalu peneliti menganalisis temuan tersebut dengan latar belakang masing-masing kelompok sosial.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah narasumber yang peneliti pilih dari berbagai latar belakang. Keseluruhan yang peneliti pilih berstatus mahasiswi berjilbab lalu melepaskan jilbabnya, mahasiswi berjilbab non pesantren, mahasiswi muslim tidak berjilbab, dan mahasiswi yang pernah berjilbab kemudian melepaskan jilbabnya lalu memakainya lagi hingga sekarang. Alasan peneliti memilih subjek-subjek yang berbeda kelompok sosialnya adalah berdasar pada; (1) latar belakang pendidikan agama di keluarga, (2) pemilihan keputusan dalam berjilbab , (3) pengalaman dalam berjilbab atau tentang jilbab. Dengan latar belakang background pendidikan keluarga, pengalaman dan kegiatan yang berbeda - beda akan memperkaya diferensiasi dalam hal pendapat dan persepsi tentang fenomena artis lepas Jilbab. Penelitian ini menggunakan empat subyek penelitian. Keempat subyek tersebut masing-masing mewakili kategori (1) mahasiswi tak berjilbab (DR), (2) mahasiswi berjilbab yang kemudian melepas jilbabnya (IM), (3) mahasiswi berjilbab yang awalnya memakai jilbab,

melepasnya kemudian memakainya lagi (BN), dan (4) mahasiswi berjilbab non background pesantren (CP).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, yaitu melalui data primer merupakan data utama yang digunakan sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan data FGD (*focus group discussion*). Pada penelitian ini, peneliti memilih empat narasumber yang akan dijadikan fokus kelompok diskusi. Dalam kelompok diskusi ini tidak hanya ada informan, hadir pula peneliti sebagai moderator yang memimpin responden (peserta diskusi). Wimmer dan Dominick mengatakan bahwa focus group adalah sebuah interview kelompok, beberapa orang diwawancara secara simultan dengan moderator memimpin responden dalam sebuah diskusi tak terstruktur tentang topic yang sedang dibahas (Dominick, 2000)

Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode Analisis Resepsi dengan teknik analisa selama di lapangan model Miles dan Huberman. Analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisa data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga dapat ditarik kesimpulan (Miles and Huberman, 2007).

Analisa data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu:

1. Data Display (Penyajian Data).

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, sebelumnya peneliti menggunakan media laptop yang menyajikan sebuah teks media berupa tayangan salah satu infotainment terkait berita Rina Nose melepas Jilbab kepada para narasumber. Menganalisis hasil atau temuan dari rekaman proses jalan focus group discussion (FGD). Setelah FGD sebagaimana langkah pertama di atas dilakukan, maka tahap berikutnya peneliti akan mengkaji catatan wawancara tersebut yang berupa ratusan transkrip wawancara yang di dalamnya kemudian bisa disarikan berbagai kategori pernyataan, komentar dsb, dari peserta diskusi.

Dalam tahap ini peneliti bisa memanfaatkan metode analisis wacana sebagaimana lazimnya dipakai dalam studi literer untuk menelaah makna intersubjektif dan menginterpretasikan makna yang tersirat dibalik pola ketidaksepakatan pendapat di antara peserta dan sebagainya yang mungkin muncul dalam diskusi. Dalam tahap ini, peneliti kemudian tidak sekedar melakukan kodifikasi dari seberapa pendapat yang sejalan atau yang tidak sejalan melainkan lebih mengkonstruksi proses terjadinya wacana dominan dan sebaliknya, dilihat dari berbagai latar belakang sosio kultural peserta diskusi

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, menfokus pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Pada penelitian ini, peneliti milih setting indoor place sebagai tempat peneltian, dalam mereduksi data peneliti, peneliti menggunakan enam narasumber yang dijadikan kelompok diskusi terfokus atau focus group discussion.

3. Conclusion Drawing / Verification

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti melakukan interpretasi terhadap pengalaman bermedia dari khalayaknya. Perlu dicatat bahwa dalam tahap ini sebenarnya seorang peneliti tidak sekedar mencocokkan model pembacaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam acuan teoritis melainkan justru mengelaborasi dengan temuan yang sesungguhnya terjadi di lapangan sehingga memunculkan model atau pola penerimaan yang riil dan lahir dari konteks penelitian yang sesungguhnya (Miles, 2007)

Hasil Dan Pembahasan

Pesan yang diresepsikan dalam penelitian ini adalah konsep yang ditawarkan media melalui tayangan infotainment yang menyatakan bahwa keputusan Rina Nose melepas jilbab adalah keputusan yang heboh, mengejutkan, menggemparkan, dan tidak selayaknya dicontohkan oleh public figure. Teks yang disajikan dalam tayangan infotainment tersebut mengarahkan khalayak ke arah pembacaan yang diinginkan. Namun adanya perbedaan latar belakang, tingkat pendidikan dan pekerjaan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pembacaan, maka muncul tiga tipe pembacaan terhadap teks tayangan infotainment :

a. *Dominant-Hegemonic Reading*

Menurut Stuart Hall, posisi hegemonik-dominan (*dominant-hegemonic reading*) diartikan sebagai pembaca sejalan dengan kode-kode program (yang didalamnya terkandung nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan asumsi) dan secara penuh menerima makna yang disodorkan dan dikehendaki oleh si pembuat program (Durham & Kellner, 2006). Khalayak memaknai sebagaimana yang ditawarkan media bahwa fakta artis lepas Jilbab adalah fakta yang miris dan memprihatinkan. Media dalam hal ini adalah tayangan infotainment mengkomersilkan dengan mendudukkan posisi lepas jilbabnya seorang Rina Nose adalah berita buruk. *Bad news is good news*, semakin rumit permasalahan, semakin senang infotainment memberitakannya dengan penuh dramatis dan sensasi sehingga khalayak menontonnya karena masyarakat Indonesia suka akan sensasi. Tayangan infotainment juga dianggap hanya dijadikan selebritis sebagai media untuk menaikkan dan menjaga popularitasnya, semakin sering selebriti tampil dalam tayangan infotainment maka semakin terkenal dia di masyarakat walaupun dengan pemberitaan negatif.

Responden yang masuk dalam kategori *dominant-hegemonic reading* adalah responden yang menyetujui bahwa fakta lepas jilbabnya Rina Nose adalah fakta yang miris. Infotainment selalu mengkonstruksi artis yang lepas jilbab adalah artis yang menyedihkan. Rina Nose bahkan disebut sebagai Marshanda kedua setelah ia memutuskan untuk melepas jilbabnya. Tak hanya di infotainment, di media massa lainnya sejumlah judul terlihat menyudutkan keputusan lepas jilbab sejumlah artis. Seperti misalnya di berita liputan 6.com, tertulis judul “Lepas Jilbab, Rina Nose disebut sebagai Marshanda Kedua”. Bahkan di lead berita, liputan 6.com langsung menuliskan sebuah opini tidak netral atas keputusan Rina Nose ini.

Keputusan Rina Nose untuk melepas Jilbabnya sangat disayangkan banyak orang. Presenter kocak itu mengaku berubah pikiran setelah satu tahun belakangan ini menutupi kepalanya dengan Jilbab. Seolah sudah siap dengan konsekuensinya, Rina Nose mengumumkan sendiri keputusan barunya untuk tak lagi berJilbab. "Pemikiran berubah seiring peristiwa yang dialaminya. Ketetapan hati pun berubah seiring pengalaman batinnya," tulisnya di Instagram pribadinya (Rosidha, 2017)

Di detik.com tertulis judul “Orangtua Sempat Shock saat Tahu Keinginan Rina Nose Lepas Jilbab”

Rina Nose sudah bicara mengenai dirinya yang melepas Jilbab. Dalam kesempatan itu, Rina Nose mengatakan orangtuanya sudah mengetahui langkah yang diambilnya. "Orangtua aku itu sudah tahu banget apa yang terjadi dalam hidup aku. Orangtua aku adalah orang yang begitu terbuka dengan segala hal," terang Rina Nose. Ternyata, Rina mengaku orangtuanya sempat shock saat mengetahui keinginannya untuk melepaskan Jilbabnya itu. Hal itu dikatakannya saat diwawancarai oleh Deddy Corbuzier dalam situs UC News Indo yang kemudian diunggah di YouTube. "Iya orangtua aku itu sempat shock banget dengan keinginan aku untuk melepas Jilbab. Tapi mereka sangat terbuka dengan segala hal jadi mereka menerima keputusan aku," lanjut Rina Nose lagi. Kini, Rina pun sudah membuka Jilbabnya. Ia mengatakan keinginan tersebut adalah keinginannya sendiri bukan atas desakan dari pihak tertentu (Febrian, 2017)

Di tribunnews.com tertulis "Lepas Jilbab, Tulisan 'Negeri Tanpa Agama' Rina Nose Jadi Sorotan".

Publik tengah dihebohkan dengan keputusan Rina Nose yang melepas jilbabnya. Dan, netizen pun kasak-kusuk. Gara-gara keputusannya, komedian sekaligus presenter wanita tersebut langsung dihujani beragam komentar dari para netizen. Ada yang mengkritik dan memprotes, ada yang menerima dengan lapang dada, ada pula yang berupaya mengingatkan. Yang terang, mata publik kini tertuju kepada keputusan Rina Nose tersebut. Hingga berita ini disusun, belum jelas hal apa yang membuat Rina Nose memutuskan untuk melepas jilbabnya tersebut. Alhasil, publik menduga-duga. Salah seorang pengguna jejaring sosial Twitter dengan akun Twitter @tanpaAGAMA pun ikut berpendapat. Akun tersebut menyoroti status jejaring sosial Instagram milik Rina Nose, @rinanose16, tiga bulan sebelum melepas jilbab. Akun itu mengunggah cuplikan foto tulisan Rina Nose yang mengagumi moral tinggi masyarakat Jepang, meski tanpa agama (Sadikin, 2017)

Dari sejumlah teks berita diatas dapat dilihat bahwa judul-judul yang dimuat di media-media tersebut menawarkan konstruksi bahwa melepas jilbab adalah sebuah fakta yang miris atau memprihatinkan. Dari hasil temuan data dalam penelitian ini ada beberapa subyek yang termasuk dalam kategori *dominant-hegemonic reading*. Subyek yang tergolong dominant reading adalah BN dan CP. Indikasi BN termasuk dalam golongan dominant reading karena ia merasa kecewa dan sangat menyayangkan sekali keputusan Rina Nose yang melepas Jilbabnya. Hal itu ditandai dari beberapa keyword dalam pernyataannya saat FGD yang menyebut bahwa ia kecewa, sangat menyayangkan, lepas jilbab adalah hak namun sebaiknya perempuan bisa menjaga Jilbabnya terlebih jika ia seorang *public figure*. Anggapan bahwa *public figure* menjadi sebuah panutan melekat dalam diri responden BN karena

baginya kondisi Rina Nose yang melepas jilbab ini bisa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat khususnya bagi penggemarnya.

Persetujuan BN terhadap fakta yang ditawarkan media terkait artis lepas jilbab ini berkaitan dengan latar belakang BN yang pernah mengalami hal serupa. Memakai jilbab, melepasnya dalam beberapa waktu, lalu memutuskan untuk memakai jilbab lagi. Pengalamannya dalam lepas-pasang Jilbab ini memberikan sebuah catatan pendapat tersendiri baginya. Dalam pernyataannya yang lain, keputusan melepas jilbabnya dipengaruhi oleh teman-temannya dan terjadi saat ia di posisi ‘nakal’. Bagi BN, kemampuan untuk bisa istiqomah mempertahankan jilbab ini juga dipengaruhi oleh konteks-konteks di sekitarnya, tak terkecuali dukungan dari peer groupnya. Keluarga BN yang cukup agamis, meski hanya nenek, ibu dan bibinya yang berJilbab, namun cukup mempengaruhi BN terkait pandangannya tentang jilbab. Dari sisi pendidikan religi, sejak kecil ia dididik dalam lingkungan yang cukup dekat dengan Islam.

Responden CP adalah responden yang juga termasuk dalam golongan dominant reading. CP termasuk dominant reading karena ia juga sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Rina Nose adalah sesuatu hal yang salah. Ia setuju jika apa yang diberitakan oleh media terkait keputusan Rina Nose melepas jilbab adalah hal yang memprihatinkan, sesuai dengan makna yang ditampilkan oleh media. Ia tidak setuju atas keputusan Rina Nose melepas jilbab karena baginya keputusan memakai jilbab adalah keputusan tidak mudah, sehingga orang yang memutuskan untuk melepasnya adalah orang-orang yang menyia-nyiakan keputusan penting tersebut. Ia sepakat bahwa mencapai konsistensi dalam berjilbab adalah sebuah hal yang sulit sehingga sayang sekali jika seorang public figur tidak berupaya untuk berlaku konsisten dalam mengenakan jilbab. Menurut CP, sebenarnya berjilbab itu akan membuat seorang muslimah menjadi lebih aman. Seorang muslimah juga akan bisa menjaga tindakan dan perilakunya sehingga bisa lebih terkontrol. Selain itu berjilbab adalah sebuah tindakan kepatuhan pada orang tua, karena bagi CP menutup aurat adalah upaya untuk menyelamatkan ayah anak tersebut dari siksa api neraka.

Dalam hadits nabi, orangtua akan dimintai pertanggungjawaban perihal pendidikan anaknya. Nabi Shalallaahu ‘Alaihi Wasallam (صلى الله عليه وسلم) bersabda:

“إِنَّمَا أَنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ” (Ingatlah, tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan setiap orang dari kalian akan ditanyai tentang yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Bagi laki-laki yang berkedudukan sebagai pemimpin, seperti suami, ayah, dan saudara laki-laki, bila mereka ini tidak memerintahkan dan menganjurkan istri, putrinya, atau saudara perempuannya agar mengenakan Jilbab, mereka akan menjadi dayyuts (yakni orang-orang tidak memiliki kecemburuan terhadap kehormatan wanita tanggungannya). Sedangkan, seorang dayyuts diancam oleh Rasulullah Shalallaahu ‘Alaihi Wasallam (صلى الله عليه وسلم) tidak akan masuk surga.

Dalam studi resepsi, khalayak ditempatkan tak hanya sebagai khalayak yang aktif namun juga menjadi sebuah agen kultural. Khalayak memiliki kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan oleh media. Menurut Althusser teks dengan memanfaatkan ideologi melakukan pemanggilan (healling) kepada subyek (khalayak sasaran) dan ketika khalayak sasaran tersebut terpanggil berarti dia telah memposisikan dirinya sebagai subyek dan siap pula tertundukkan dengan ritual-ritual tertentu. Karena itu penting untuk mengetahui bagaimana teks yang ada di media mencoba menggiring khalayak (subyek) ke arah pembacaan tertentu (Althusser, n.d.).

Stanley dan Jennis K mengungkapkan bahwa menurut teori penerimaan, penerimaan khalayak akan sebuah konsep makna yang ditawarkan media ini memusatkan perhatian individu dalam proses komunikasi massa, menghargai kemampuan dan kepandaian konsumen media, menerima berbagai jenis makna dan teks media, mencari pemahaman mendalam mengenai bagaimana orang menafsirkan konten media dan menyediakan analisis mendalam mengenai bagaimana cara media digunakan dalam konteks sosial sehari-hari (Baran, 2010). Dalam penelitian, ini responden BN dan CP menempatkan dirinya tak hanya sebagai khalayak aktif namun dalam memaparkan pandangan mereka juga dipengaruhi oleh konteks-konteks yang melingkupinya, seperti misalnya pengalaman kehidupan mereka dan latar belakang pendidikan religi yang mereka terima.

b. *Negotiated reading*

Posisi yang dinegosiasikan (*negotiated reading*) dimaknai sebagai pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan kode-kode program dan pada dasarnya menerima makna yang disodorkan si pembuat program namun memodifikasikannya sedemikian rupa sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya (Durham & Kellner, 2006). Khalayak memaknai tayangan infotainment bisa dikatakan berdasarkan fakta maupun tidak berdasarkan fakta. Hal ini dapat dikatakan sebagai gosip, tayangan infotainment menjadikan gosip sebagai berita padahal gosip bukanlah berita dan berita tidak bisa dibuat gosip. Berita mengandung unsur kebenaran, informasi dan keterbaruan.

Menurut teori terkait khalayak yang dikemukakan oleh Melvin deFleur dan Sandra Ball-Rokeach ada sejumlah perspektif yang dapat digunakan untuk melihat khalayak. Perspektif perbedaan individual adalah salah satu perspektif tersebut. Perspektif ini memandang bahwa sikap dan organisasi personal-psikologis individu akan menentukan bagaimana individu memilih stimuli dari lingkungan, dan bagaimana ia memberi makna terhadap stimuli tersebut. Setiap orang mempunyai potensi biologis, pengalaman belajar, dan berada dalam lingkungan yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan pengaruh media masa yang berbeda pula. Adanya perbedaan respon atau perbedaan sikap individu terhadap media sebenarnya dapat dipahami, karena konsep individu itu berasal dari kata *individuum*, yang artinya tidak terbagi (DeFleur, 1989).

Dalam penelitian ini, responden IM adalah responden yang termasuk dalam kelompok *negotiated reading*. Yang menjadi indikasi *negotiated reading* adalah responden menerima konsep makna yang ditawarkan media bahwa keputusan melepas jilbab yang dilakukan Rina Nose adalah keputusan yang kontroversial dan merupakan sebuah fakta yang memprihatinkan namun responden di sisi lain ia juga mengungkapkan bahwa keputusan itu sebenarnya sah-sah saja. Bagi IM, ia sepakat bahwa media telah mengkonstruksi fenomena lepas jilbab Rina Nose sebagai hal yang kontroversi, ada upaya mengarahkan ke penghakiman Rina Nose, namun di sisi lain IM memiliki pandangan bahwa sebenarnya keputusan Rina Nose untuk melepas jilbab adalah keputusan yang biasa saja atau sah-sah saja dia melakukan hal tersebut.

Bagi IM, media kurang berhasil menjadi encoder dan decoder yang baik terkait urusan agama. Enkripsi dan deskripsinya cenderung berpihak. Kontroversi yang dikonstruksi media ini tentunya lebih menarik atensi masyarakat jauh lebih besar daripada untuk tujuan pembelajaran atau pemahaman bagi masyarakat. Sehingga media seharusnya berbenah dengan membuat tayangan yang lebih ‘sehat’. Pilihan pandangan IM terkait fenomena artis lepas jilbab ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya sebagai orang komunikasi yang gemar mengkritik isi media. IM dikenal sebagai mahasiswi yang kritis.

Muslimah ideal menurutnya adalah agen yang membuka dirinya pada interpretasi moral yang lebih manusiawi, menjadi agen Islam yang sejuk. Ia mengedepankan bahwa kita harus fokus pada konstruksi berpikir yang logis dalam menginterpretasi moral sebab moral adalah buatan manusia, bukan Tuhan. Ia berpandangan bahwa ketika azas manfaat tidak ditemukan/terkurangi ketika seseorang memakai jilbab dan orang tersebut memutuskan untuk melepaskannya, itu adalah hal yang wajar dan natural. Menurutny, hal itu adalah hal yang sangat manusiawi.

Berdasarkan teori decoding-encoding Stuart Hall, pilihan pandangan manusia dipengaruhi oleh berbagai hal khususnya dalam proses encoding dan decodingnya. Encoding mengacu pada tahapan produksi dimana realitas yang mentah, suatu peristiwa yang terjadi di lapangan, dipotret, dikonstruksikan, serta dibingkai sedemikian rupa, dengan penggunaan-penggunaan bahasa yang cenderung menggunakan bahasa dari ideologi kelompok dominan (*dominant or preferred meanings*).

Pembentukan pesan dalam tahap produksi tersebut juga melibatkan pengetahuan mengenai seperti apa penerima yang akan disasar, bagaimana karakteristik mereka untuk menentukan bagaimana bentuk pesan tersebut dikemas hingga menarik bagi penerimanya. Hingga, dalam hal ini Hall mengutip pembahasaan Phillip Elliot bahwa khalayak merupakan “receiver” sekaligus juga “source” atas sebuah pesan media. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa sebuah pesan diproduksi dengan melalui serangkaian proses yang tidak sederhana agar pesan tersebut menjadi sebuah wacana yang bermakna (*meaningful discourse*) yang dapat dipahami dan diterima sebagai suatu hal yang lazim. Meskipun telah diusahakan sedemikian rupa agar bisa dimaknai sama dengan maksud awalnya, namun proses decoding sangat bisa membuat makna awal tersebut diterima berbeda (Ilahi, 2017).

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh persepsi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu, yang bagi setiap orang pun mesti tak sama. Selain itu, Hall juga mengungkapkan bahwa khalayak dalam hal ini tidak hanya menerima pesan, tetapi juga bisa mereproduksi pesan yang disampaikan. Dengan demikian, Hall menyebutkan bahwa antara encoding dan decoding ini memiliki struktur makna yang tidak simetris. Derajat simetris dalam hal ini dimaksudkan sebagai derajat pemahaman serta kesalahpahaman dalam pertukaran pesan, dan derajat tersebut bergantung pada kesetaraan hubungan yang dibentuk antara pembuat pesan dan penerimanya.

c. Oppositional reading

Posisi oposisional (*Oppositional 'counter' hegemonic reading*) artinya adalah pembaca tidak sejalan dengan kode-kode program dan menolak makna atau pembacaan yang disodorkan, dan kemudian menentukan frame alternatif sendiri di dalam menginterpretasikan pesan/program (Durham & Kellner, 2006). Khalayak memaknai berlawanan atas apa yang ditayangkan tayangan infotainment, infotainment menganggap informasi terkait Rina Nose melepas Jilbab adalah fakta yang memprihatinkan. Namun khalayak memandang tayangan infotainment terkait Rina Nose yang melepas Jilbab adalah sesuatu yang biasa saja, tidak perlu dibesar-besarkan karena memang infotainment mendapatkan keuntungan dari pemberitaan tersebut. Melepas jilbab adalah sebuah fakta yang biasa saja karena setiap manusia pasti punya pilihan hidup sendiri-sendiri.

Dari hasil temuan penelitian didapatkan bahwa responden DR adalah responden yang termasuk dalam kategori opositional reading. Dia tidak sepakat jika melepas jilbab adalah sebuah hal yang memprihatinkan, seperti makna yang dikonstruksikan oleh tayangan infotainment. Ia sebenarnya suka Rina Nose memakai jilbab namun ia tidak benci ketika dia melepas jilbabnya. DR mengatakan bahwa Rina Nose sendiri yang tahu alasan sebenarnya mengapa ia melepas jilbabnya. Sebab yang punya tubuh adalah Rina Nose dan Rina Nose pula yang berhak mengatur mau seperti apa ia berpakaian. Menurut DR, media tidak punya hak mengatur, menjustifikasi apa yang dilakukan oleh Rina Nose.

Pilihan DR yang mengungkapkan pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan hidupnya yang menyatakan bahwa menurutnya muslimah yang baik itu tidak dilihat dari

seperti apa dia berkostum, yang penting berpakaian sopan dan tidak memakai pakaian ketat atau terlalu pendek sudah cukup. Muslimah itu yang penting adalah baik pada sesama, tidak saling menjelekkan dan yang terpenting adalah menjalankan sholat lima waktu. Di lingkup keluarga DR juga tidak semua keluarganya berjilbab. Orang tua DR juga tidak memaksa DR untuk mengenakan jilbab meski ia seorang muslimah. Sehingga hingga kini DR mengaku belum punya keinginan untuk berjilbab.

Ervina Pransiska Rindu dalam penelitiannya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berjilbab menemukan bahwa faktor dari dalam yaitu berupa pemahaman yang mendalam dan didasari oleh keimanan yang teguh, adalah hal pertama dan terpenting. Mereka yang paham bahwa tuntunan Islam untuk berjilbab adalah bukan sekedar masalah fashion tetapi bentuk ketaatan dan sumber aliran deposit pahala, akan lebih konsisten bertahan dengan ‘pilihannya’. Karena ketika melakukan sebaliknya, mereka akan berpikir bahwa setiap saat itu mereka melanggar perintah-Nya. Sedangkan faktor dari luarnya adalah pengaruh dari iklan fashion dan konstruksi masyarakat tentang konsep cantik (Rindu, 2015).

Ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang memahami berbeda sebuah makna yang ditawarkan oleh media. Faktor sosial menjadi salah satu hal yang mempengaruhi efek terpaan media massa. Black and Whitney menyebutkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan latihan, pekerjaan dan pendapatan, agama serta tempat tinggal mempengaruhi perbedaan akan penerimaan makna atas sebuah pesan yang merupakan efek media (Nurudin, 2007). Hal ini terlihat dari hasil temuan penelitian faktor latar belakang pendidikan dan tempat tinggal subjek yang beragam mempengaruhi bagaimana penerimaan mereka terhadap konsep artis lepas Jilbab tersebut.

Penelitian resepsi menunjukkan sebuah indikasi bahwa meskipun di dalam membuat teks atau produser sudah mempertimbangkan karakteristik khalayak sasaran sehingga mereka menggunakan mitos-mitos tertentu yang dianggap sesuai untuk mengarahkan pembacaan khalayak ke arah yang dia inginkan. Tetapi ternyata hal tersebut tidak dapat menghindarkan pembacaan yang berbeda dari mereka yang secara segmentasi seharusnya berada pada kelas sosial yang sama (Hapsari Sulistyani, n.d.). Hal ini terlihat dari pembacaan berbeda yang dilakukan oleh para subjek. Dari pembacaan tersebut dapat dijelaskan bahwa subyek yang

muslimah dan tidak berJilbab dan subyek dengan kategori berJilbab namun kemudian melepas Jilbabnya cukup permisif terhadap isu artis lepas Jilbab tersebut.

Makna di dalam media bukanlah suatu yang tidak bisa berubah atau inheren di dalam teks. Media teks memunculkan makna hanya pada saat resepsi, adalah ketika teks itu di baca, di lihat atau di dengar. Ien Ang dalam Storey menyatakan bahwa khalayak dipandang sebagai produser makna, tidak hanya konsumen isi media. Khalayak menginterpretasi teks media dengan cara yang sesuai dengan pengalaman subjektif yang berkaitan dengan situasi tertentu. Analisis resepsi tidak langsung ditujukan kepada individu yang mencoba memaknai sebuah teks tetapi juga makna sosial yang melingkupinya (Storey, 2006).

Kesimpulan

Fenomena artis lepas Jilbab menjadi sebuah fenomena yang menjadi topik pembicaraan di masyarakat. Media melalui relasi kuasanya membentuk sebuah stigma bahwa keputusan Rina Nose melepas jilbab adalah fenomena yang memprihatinkan dan miris. Tayangan infotainment menawarkan tawaran makna bahwa apa yang dilakukan oleh Rina Nose tidaklah layak ditampilkan oleh seorang public figure. Sebagai public figure, Rina Nose dituntut untuk menjadi panutan akan sebuah konsisten mengenakan penutup aurat, bukan malah mempertontonkan ketidakkonsistenan seperti itu.

Dari hasil temuan data dalam penelitian ini ada beberapa subyek yang termasuk dalam kategori dominant hegemonic reading. Subyek yang tergolong dominant reading adalah BN dan CP. Indikasi BN dan CP termasuk dalam golongan dominant reading karena ia sepakat dengan makna yang ditawarkan media bahwa keputusan Rina Nose melepas jilbabnya adalah keputusan memprihatinkan. CP termasuk dominant reading karena ia juga sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Rina Nose adalah sesuatu hal yang salah. Ia setuju jika apa yang diberitakan oleh media terkait keputusan Rina Nose melepas jilbab adalah hal yang memprihatinkan, sesuai dengan makna yang ditampilkan oleh media.

Responden IM adalah responden yang termasuk dalam kelompok negotiated reading. Yang menjadi indikasi negotiated reading adalah responden menerima konsep makna yang ditawarkan media bahwa keputusan melepas jilbab yang dilakukan Rina Nose adalah keputusan yang kontroversial dan merupakan sebuah fakta yang memprihatinkan namun responden di sisi

lain ia juga mengungkapkan bahwa keputusan itu sebenarnya sah-sah saja. Responden DR adalah responden yang termasuk dalam kategori *opositional reading*. Dia tidak sepakat jika melepas jilbab adalah sebuah hal yang memprihatinkan, seperti makna yang dikonstruksikan oleh tayangan *infotainment*. Menurut DR, media tidak punya hak mengatur, menjustifikasi apa yang dilakukan oleh Rina Nose.

Ada sejumlah latar belakang yang mempengaruhi para subyek memiliki pendapat yang berbeda-beda. Keputusan mereka menolak/menerima/sepakat/tidak sepakat terhadap konsep makna yang ditawarkan oleh media dipengaruhi oleh latar belakang mereka yakni latar belakang pendidikan religi di keluarga, pengalaman hidup dalam berjilbab dan pengaruh dari *peer group* mereka.

Daftar Pustaka

- Adi, T. N. (2012). Mengkaji Khalayak Media Dengan Penelitian Resepsi. *Acta Diurna*, 8(1), 27–35.
- Althusser, L. (n.d.). *On the Reproduction of Capitalist Ideology and Ideological State Apparatuses*. Retrieved from <https://libcom.org/files/louis-althusser-on-the-reproduction-of-capitalism.compressed.pdf>
- Baran, J. S. dan D. K. D. (2010). *Teori Komunikasi Massa; Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Biagi, S. (2010). *Media/Impact Pengantar Media Massa* (9th ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Bustomi, A. A. (2016). TEORI IDENTITAS DIRI JAMES MARCIA (1966,1980) – ABI ABDU BUSTOMI. Retrieved February 21, 2019, from <https://abiabdubustomi27.wordpress.com/2016/07/03/teori-identitas-diri-james-marcia-19661980/>
- DeFleur, M. L. dan S. B. R. (1989). *Theories of Mass Communication (5th Edition)* (5th ed.). Pearson; 5 edition.
- Dominick, R. D. W. dan J. R. (2000). *Mass Media Research An Introduction* (6th ed.). Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Dubrin, A. J. (2011). *Essentials of Management 9th ed* (9th ed). Mason: Essentials of Management.
- Durham, M. G., & Kellner, D. (2006). *Media and cultural studies : keywords*. Blackwell.
- Fachruddin, A. (2016). *Manajemen Pertelevisian Modern*. (A. A. C, Ed.). Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Febrian, P. P. (2017). Orangtua Sempat Shock saat Tahu Keinginan Rina Nose Lepas Hijab. Retrieved June 20, 2019, from <https://hot.detik.com/celeb/d-3724350/orangtua-sempat-shock-saat-tahu-keinginan-rina-nose-lepas-hijab>
- Futari, H. (2018). Ramai Dihujat, Rina Nose: Saya Dianggap Melakukan Kesalahan Kemanusiaan : Okezone Celebrity. Retrieved June 20, 2019, from <https://celebrity.okezone.com/read/2018/12/06/33/1987607/ramai-dihujat-rina-nose-saya-dianggap-melakukan-kesalahan-kemanusiaan>
- GO SPOT - Polemik Rina Nose Lepas Hijab [30 NOVEMBER 2017]. (2017). Retrieved June 20, 2019, from <https://rctimobile.com/m/index.php?f=8&c=7222807&chads=464485&t=GO-SPOT---Polemik-Rina-Nose-Lepas-Hijab--30-NOVEMBER-2017->

- Hadi, I. P. (2013). Penelitian Khalayak Dalam Perspektif Reception Analysis. *Scriptura*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.9744/scriptura.2.1.1-7>
- Hapsari Sulistyani. (n.d.). the narrative: Analisis Resepsi. Retrieved March 5, 2019, from <http://hapsarinarrative.blogspot.com/2011/12/analisis-resepsi.html>
- Hendriwinaya, V. W. (2015). Infotainment, Sinetron dan Sinisme Ibu Rumah Tangga “Mengapa Ibu Rumah Tangga Menggemarnya?” (Analisis Berdasarkan Cultivation Theory). *Buletin Psikologi*, 23(1), 42. <https://doi.org/10.22146/bpsi.10576>
- Ilahi, N. H. (2017). Encoding-Decoding : Studi Pemaknaan Pesan Stuart Hall | Gubuk Musafir. Retrieved March 4, 2019, from <https://ninoor.wordpress.com/2017/04/03/encoding-decoding-studi-pemaknaan-pesan-stuart-hall/>
- KPI. (2017). *Survei Indeks Kualitas*. Retrieved from http://www.kpi.go.id/download/penelitian/Ekspose_Survei_II_tahun_2017.pdf
- Miles, M. B. dan A. M. H. (2007). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Morissan. (2008). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurudin. (2007). *Pengantar Komunikasi Massa* (1st ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rindu, E. P. (2015). Ervina Pransiska Rindu’s WriteWorld: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemakaian jilbab (Penelitian Kualitatif). Retrieved March 4, 2019, from <http://ervinapransiskarinduwrite.blogspot.com/2015/07/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>
- Rosidha, E. L. (2017). Lepas Hijab, Rina Nose Disebut Marshanda Kedua - ShowBiz Liputan6.com. Retrieved June 20, 2019, from <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3157956/lepas-hijab-rina-nose-disebut-marshanda-kedua>
- Sadikin. (2017). Lepas Jilbab, Tulisan “Negeri Tanpa Agama” Rina Nose Jadi Sorotan Netizen Ini - Tribunnews.com. Retrieved June 20, 2019, from <http://www.tribunnews.com/seleb/2017/11/12/lepas-jilbab-tulisan-negeri-tanpa-agama-rina-nose-jadi-sorotan-netizen-ini>
- Sasongko, A. (n.d.). Uskup Canterbury: Jilbab Bentuk Penegasan Identitas Muslimah | Republika Online. Retrieved April 30, 2019, from <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/07/06/dunia-islam/islam-mancanegara/12/04/03/m1wqhz-uskup-canterbury-jilbab-bentuk-penegasan-identitas-muslimah>

- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media* (First edit). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Storey, J. (2006). *Cultural Theory and Popular Culture An Introduction*. Georgia: University of Georgia Press.
- Syas, M. (2015). Konstruksi Realitas Berita. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(Nomor 2 Mei-Agustus 2015), 124–134. Retrieved from <https://www.google.com/search?safe=strict&source=hp&ei=DBRuXPmZDMqNvQSajo3ACQ&q=Berita+merupakan+sebuah+rekonstruksi+realita.+Begitu+pun+dengan+pemberitaan+yang+dimuat+di+sejumlah++media+massa.++Dalam+membuat++berita%2C++seorang+jurnalis+melakukan+rekonst>
- Uswatun, N. (2017). Studi Resepsi Khalayak Terhadap Pemberitaan Syariat Islam Pada Kompas.Com. *Jurnal Komunikasi Global*, Volume 6, 74–89. Retrieved from <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/9195>
- West, Richard dan Turner, L. H. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi : Teori dan Aplikasi* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Humanika.

How To Analyze Local Wisdom Contains In The Novel Series And Their Relation With The Author's Society

Intama J. Polii

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FBS, Universitas Negeri Manado.
Jalan Tondano, Koya, Tondano Selatan, Tondano Sel., Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

95618

intamapolii@unima.ac.id

Abstract

The literary is a type of original work by the author, as an impression of the life combined under the power of imagination and the creativity supported by the experience and life observation. The authors who live amidst society appreciate the intricate details in the secular society presence. This research discusses the method to analyze local wisdom contains in the novel series and their relationship with the author's society. The sample novel series used in this study entitled Padang Bulan (PB) and Cinta Dalam Gelas (CDG) by Andrea Hirata, one of Indonesia's novelist. The analysis combines the analytic-descriptive techniques, the content analysis, and the hermeneutics. The local wisdom and their contradiction can be traced and uncovered in light of the author's idea, which represents his society. It concludes that this method is easy to apply to other similar stories. It can help the readers understand the purpose of the story more accessible. The conflicting interest and the local wisdom can be compelling to be studied, while we can take the real lessons and the knowledge of another culture and their perspective to solve the issues of their life. Many of the analysis traces the explanation only and forget the true wisdom contains in every stories and matter.

Keywords: Local Wisdom, Literature, The analyzing-descriptive methods, The content analysis, The hermeneutics analysis.

Submite	: 30 Januari 2019
Review	: 13 Maret 2019
Accepted	: 26 Juni 2019
Surel Corespondensi	: yuli@usm.ac.id

Introduction

Language is one of the methods for communicating in the aesthetic. The word also represents the cultural and moral values shared by its users. As an early idea, language as elocution and moral is something comprehensive in literature, blended (Pradopo, 2013). Writing is a universe of thought and an instrument to spill the author's mind in the form of language. One research declares that the substance of literary works is the result of fine art that uses human and life as the object, and the language as its medium (Akbar, 2013). The literary work is a type of

inventive procedure by the author, as a life impression. It is the combination of the imagination and the creative ability which is also supported by the experience and the observation of the author's life — these musings related to their environmental conditions (Osborne, Simon, & Collins, 2003). The authors who live amidst society are individuals who know and comprehend the intricate details of the human society presence. According to one research (Polletta, Chen, Gardner, & Motes, 2011), the writer (author) as an ordinary individual who is a member of society engage with the question of the social values that he experiences regularly. All existence of the community manages such things as love, bliss, suffering, and others without being bound by the time and place (Salam, 2018). That is, through the process of creative and imaginative, the literary produced by the author to express the various problems that arise in life (especially social community), in addition to other functions.

One author (Barry, 2009) claim that the study of mind applies through the various disciplines such as the philosophy, the scientific theory, the theology, and the literature. Particularly in the field of research, examining the writer's contemplations is an effort to comprehend and express the importance implied in a literary work (Burton & Rosenblatt, 2006). The issue of the undefined purpose in the works of literature emerges if that begins to denote on the face of the literary works vaguely. Furthermore, it is likewise exemplified such as Dostoevsky's (1881) novels and drama as retelling (de Macedo & Macedo, 2018). It contains the ideas that are embodied in plots, characters, and scenes, as well as in the phrases and the expressions, to be examined semantically (Dostoevsky, 1972). The amount and variety of life problems experienced by the author make the content of their literary work more perplexed. The more intricate the issue of life experienced by the creator, the more bewildering the limit and the substance of thought in the theoretical works — the perplexion caused by the culture and customs which adopted by the author to bring the story background more reliable and understandable (Kockelman, 2010). They often insert their local wisdom based on the adopted cultures and traditions accidentally. Unfortunately, many of the literary work is not easy to understand, especially for the great storyline and depictions such as the novel. Since each writer has different writing styles and presuppositions, the imagination that arises in the reader's mind will be different, even though books are one of the most frequently used and preferred media in language and culture learning (Kuhiwczak & Littau, 2007). These different interpretations can

make the real purpose of the novel unspoken (commonly referred to as misinterpretation, especially for the elusive novel that is difficult to understand when the readers cannot following the plot of the story even though the author's expression embodied in the book is the consideration that is easy to analyze). It is an obligation, especially for students of literary studies, to interpret the meaning of a novel as the author's intent. This study aims to help solve the problem, with the methods of literacy that is applicable and tend to make it easier (Burns, 2009).

For this study, it is necessary to review some of the literature which meets these criteria. The criteria of the novel are novels that tell the social conditions of the community against controversies contained therein. The storyline should involve culture and their customs, where their local wisdom usually lies inside. One of the following excellent example to discuss is the novel series entitled Padang Bulan (PB) (Hirata, 2010) and Cinta Di Dalam Gelas (CDG) (Hirata, 2011). This novel series represents Asian culture that rich in wisdom and yet strict in customs since they have strong faith in their beliefs. The local wisdom in this story refers to the various perspective, science, and life skills, embraced by a various culture which lives in one community to solve multiple issues and needs. The arrangement of fulfilling the community necessities includes the elements of religious life, education, economic, technology, deontology, social organization, language, communication, and art. The conceptual idea is the character's development, how she lives in society and their consciousness, and relate it to her weak and profane life continuously. Crucial issues such as gender equality and different sexual preference that is considered taboo in their beliefs present a character's internal conflicts, which are not easy to understand. What makes these works interesting to study is the main female character point of view written by the male writer (andro-texts). The type of diversity contained in this novel describes an issue, LGBT main character, a non-white primary and secondary character, also non-western setting. This setting is attractive because not many authors are willing to do so, as pictured in the chart below.

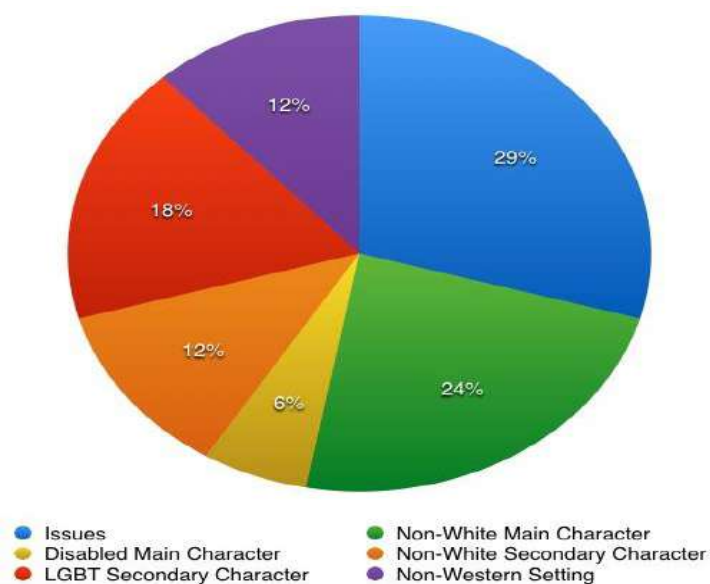


Figure 1. Diversity Content in Challenged Books

Methods

Furthermore, the local wisdom conduct to the characters is not smooth to understand because of the various cultures and languages used as the background of the story. It adds the bias in understanding the meaning of local wisdom contained in the novel series. Rather than writing in everyday language, authors give more emphasis to their ideas by utilizing literary techniques to make them stand out. There are many techniques in analyzing a story. The analysis of the text is the most substantial way of determining the purpose and analyzing what written in the book or article. While the narrative technique uses to help the reader feel almost as if they are a part of the scene or event description. The description helps readers attach with the story, even creating an emotional response. It can help a reader visualize what a character or a place is like (Hermans, 1998). The analysis in this study uses the combination of the analyzing-descriptive methods, the content analysis, and the hermeneutics analysis (Communication Between Cultures, 2008; Bungin, 2011; Basile, Bos, Evang, & Venhuizen, 2012; Sumaryono, 2018).

As an analysis method, the content analysis uses a set of categorization and replicable opinions from the data (text, sound, or images) to their meaning. Hypotheses may be about the messages within the documents, the writer (s), the audience, and time. The text defines as articles, book chapters, discussions, essays, or any existence of communicative language. All of

it can be applied to examine any occurrence of recorded communication, from literature and rhetoric, ethnographic and cultural studies, gender and age issues, sociology and political science, also psychology and cognitive science. Correctly, it reflects a close relationship with sociology and psycholinguistics and is playing the development of artificial intelligence (Cho & Lee, 2014). Hermeneutics describes the interpretation of meanings – explication, analysis, commentary. Initially applied to the translation of the Bible, Hermeneutics comprises accurate readings and exegesis (commentary on how the implications implemented) (Scholz, 2015). The results of this study are useful as study material for further research of other literary works.

Results and Discussion

The novel series of PB and CDG are works that assemble into a type of literary work of inspiration. The inspirational literary work is a persuasive work of fiction that presents stories about the children or people, as well as the main characters in the stories whose are the extraordinary characters, unwavering, and able to create astounding spirits and creativity. In another sense, the inspirational literary work is a literary work that profoundly touches the hearts of its perusers to act more and related the right message in it. Through this inspirational work, Andrea Hirata presents the story with the protagonist of a Malay woman named Enong. She is a 14-year-old girl, a sixth grader of Islamic Primary School in the East Belitung, who influences and shapes the mindsets of both her poor parents (especially the father), that learning English and aspiring to be an English teacher is a provision for the future. After his father's death, Enong quit from her school to support the life of his mother and her three younger sisters. Amid the life of the community who are dominated by Malays ethnic followed by the Sawang and the Chinese, Enong became the first woman to be a tin miner in her district. Enong continued her education through an English course institution and completed it with the fifth best graduate results (which at the same time by the author, Enong's name change to Maryamah bint Zamzami). Enong divorced Matarom, her husband, upon learning that Matarom had a wife and his wife was pregnant. Amid society forbidding women against men under Shari'ah law, Maryamah continues to perform and "melt the ice" due to the ban by fighting, and even winning the chess game against men. The summary of the novel series of PB and CDG is the first picture to understand and explore the existence of the author's thoughts related to the local wisdom. The economic

sense in question packaged conventionally and innovatively. Conventionally, Andrea Hirata offers a unique form of local knowledge and innovatively offers the dynamic local wisdom which becomes interesting since Asian culture only presents 1% of challenged books which tell the story of race or ethnicity as the figure below.

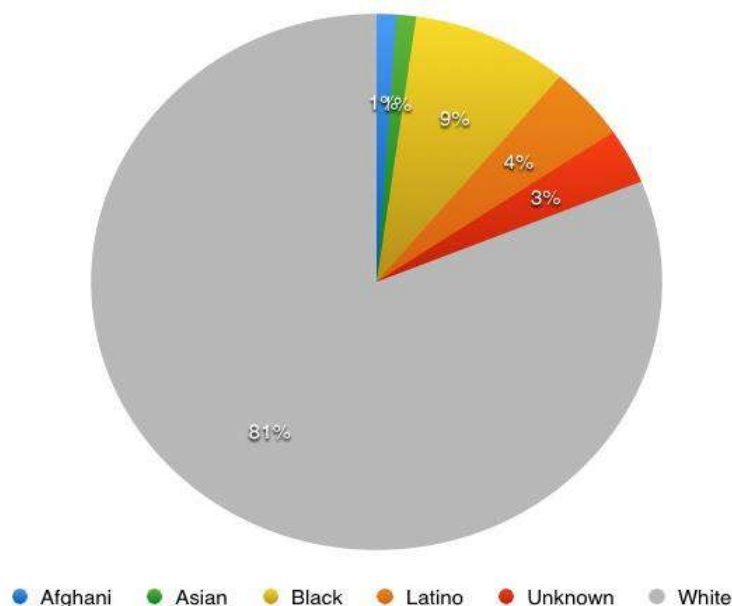


Figure 2. Challenge Book Content by Race or Diversity

A Unique Local Wisdom

The unique Malay identity in the Belitung community is a representation of an Indonesian society dominated by the Malay tribe. The author's *thoughts* related to the uniqueness in question appear in the following quotation.

At noon, people love to use sarong and get off the house. (Hirata, 2010)

The quote above is a question form addressed to Zamzami, the father of a daughter named Enong who is the eldest daughter in the family. Yahnong is a greeting that arises from the acronym of the father's name and the name of the eldest child (A(YAH) E(NONG) or Enong's Father). Malay traditions in expressing affection for the eldest child is to combine those two words. The process of acronyms to become a form of greeting for Malays is unique. Such

uniqueness is the local wisdom of the East Belitung. Another singularity also appears in Malay customs to name children, which reflect in the following quotation.

"If the name of the eldest son is Murad, then the seven siblings below him are Munzir, Munaf, Munir, Muntaha, Munawaroh, Mun'im, and Munmun." (Hirata, 2010).

The names of the eight children have similar and rhythmic sounds. The ease of the parents in naming their many children lies in the call of Mun, whereas on the other hand, it is unthinkable to the parents that when calling on one of the children, for example, to which Munir is addressed and only called Mun, then all seven children will respond to the call. The Malays are very pleased with such naming of their children. Another uniqueness which is also a part of the life of the Malay ethnic community is the habit of delegating the responsibility of family survival to the eldest when parents (especially father) die as shown in the following quotation.

"Suddenly losing the pillars, the family of Shalimah stumbled. No capital, no skills, no other family can be asked for help - because all of them are low-income families - makes this family dead. The husband is the only backbone of the family, and it realizes after he is gone." (Hirata, 2010, pp. 24).

"While Enong cannot sleep for nights. She wondered what people always said about the eldest child. However, she does not even fully understand what the meaning of the word responsibility is. She was afraid to imagine the effect of that word. Does she have to work? How should she live a family, a mother, and three siblings? Does she have to quit school? She loves school very much. She was confused because she was too small to deal with such a problem. Now she understands why at that time many mourners looked at her." (Hirata, 2010).

Giving responsibilities to the eldest child related to family survival is a Malay custom. Enong, a little girl who is in primary school still, was forced to quit school for a responsibility that hereditary prevailed among the Malays. Feelings of pity and high hope address to Enong, as in the following quotation.

"Now she understands why at that time many mourners looked at her." (Hirata, 2010, pp. 25).

A little girl became the center of the mourners' attention by looking at her, a sympathy for the aftermath of her father, Zamzami. A statement that raises a sense of pity and a great hope of responsibility to be taken over as the eldest. Similarly, other habits that are still classified as unique to the Malay community in Belitung, such as greeting adult sons who have not married with the words Bujang (Hirata, 2010), or Bujang Lapuk (Hirata, 2010), welcoming Boi for

unmarried boys and girls (Hirata, 2010), gather in a coffee shop while spending time playing chess (Hirata, 2010).

The Figure of the Society presents by the Author

The thought of authors related to the Malay community in Belitung, in addition to having a different habit, also has a habit of expressing something innovative. The unique habits contain cultural nobility, while the form of innovative expression is a positive dynamic process in the framework of acculturation. The habits of Melayu people who experience acculturation is a manifestation of the dynamic local wisdom. In other sentences, the habits of society when faced the actual dynamic reality, leaving no custom identity, the process of dynamizing into the global era cannot be denied; as in the following quotation.

"From now on, do not worry anymore, Nong. Dad will get you a dictionary. One Billion Word Dictionary of English!" (Hirata, 2010).

The role of a father in supporting the wishes and ideals of a child is absolute. The figure of Zamzami as a devout father of religion, even to the Shari'ah, is considered a better reader of the Qur'an than reading Latin letters (Hirata, 2010, pp. 3), ambivalent with the ideals of Enong, his daughter, to becoming a language teacher English. Father's support for Enong to learn and deepen her English proficiency is one of the authors' thought that puts the current situation forward. Learning English, although it is a favorite subject for Enong, still does not eliminate the characteristics of Enong as a religious figure of religious teachings. It shows through appearance, as in the following quotation.

"At 10 o'clock, Enong's competitors arrive. They are young girls with plump bodies and full lips. The full makeup of women on television, the haircut of today, dressed as a town blushing. While Enong, her clothes are like people who want to recite the Quran khatam. The hijab is worn." (Hirata, 2010).

The author shows a different view by displaying two different sides regarding the existence of women. The appearance of modern women contrasts with the appearance of innocent and poor traditional women. The first type belongs to secular women, while the second is sacred. Especially for the sacred type, its presence displays religious values (reciting the

Koranic Quran and using the hijab). Religious symbols (hijab) inherent in the existence of women, is a habit that explores the spiritual value of Malay women.

"After the morning prayers, she wrapped his veil around tightly, packing hoes, bows, and bicycles, kissing his mother's hand, holding her sisters for a moment, then emerging with joy as she whistled national anthems toward the banks of the lake. Sometimes she whistles the English-language children whom Mrs. Nizam once taught her: If you are happy and you know it, clap your hands. She is the first female miner in the history of tin mining. She is not more than 14 years old." (Hirata, 2011)

The figure of women who are sick and obedient to carry out these religious orders are women who dropped out of school (primary school), family lovers, hard workers (first tin miners in Belitung), but love English lessons is a picture of traditional Malay women in Belitung. Women who aspire to be an English teacher (not a religious teacher), by not leaving the status of Saleh Muslim women. Some of the outstanding habits of the Malay community in Belitung base on the author's thoughts in the novel series of PB and CDG. The author presents the dynamic local wisdom in the form of innovative thinking.

The environmental condition of society as a reality and local wisdom composed in the novel series entitled *Padang Bulan* (PB) and *Cinta Dalam Gelas* (CDG), can be traced and uncovered in light of the author's idea. The choice of this novel series is due to the feminist aspirations portrayed by male authors (andro-text), which is not easy to understand (especially for a particular culture). On the other hand, the novel series which has a continuous story feature of the women existence in the midst of Malay, Sawang and Chinese ethnic groups in Belitung Island contains the value of local wisdom and gained appreciation as a phenomenal novel that cites a social life that represents the life of the people in those community. Local wisdom in the author's mind usually reflects in the habits of life by the society that has lasted long and become the values prevailing in a society so that become the guidance and part of life that can not great with the attitude and the behavior of the individual which observed. The decision of this unique game plan is a result of the women's activist yearnings depicted by the male creators (andro-text). Then again, the game plan which has a highlight reliable story of the ladies presence amidst the Malay, the Sawang and the Chinese ethnic get-togethers in the Belitung Island contains the estimation of the neighborhood insight and got gratefulness as an astonishing novel that alludes to a social life that addresses the life of the general population in those group. The

local wisdom as the author's idea in the novel series is a conceptual idea of character which grows and develops continuous that lives in a society in the consciousness of the society, functioning to regulate the life of the society from the nature related with the consecrated to the befouling. The local wisdom in the creator's mind is generally reflected the propensities for life by the overall population that has continued and transformed into the winning qualities in an overall population. It transforms into the course and the part of life that inseparable from the perspective of mind and the conduct of the person which can be seen.

The author origins represent clearly in the novel series mention above. The author always uses his own culture as the background of his work. As the comparison, the infamous *Destination Unknown* by Agatha Christie uses the Moroccan as its background only tells the surface of the Moroccan Culture. Agatha Christie, which is not the Moroccan but visits there several times, does not know the characters of the Moroccan people, so it will not represent there. The detail backgrounds probably represent the author's culture to empower the story more. It will help the readers to imagine the story quickly. The plot can be used to recognize the author's culture also. Language and culture presents can be used to determine the author's culture and society type. In this case, the unique inter-cultural life presents in detail by the author can bring the characteristics of the author's culture itself as present in the line above. Therefore, the points can help the student to determine the local wisdom contains in the story and relate it to the author's society, or even culture.

Conclusion

The environmental condition of society as a reality and local wisdom composed in the novel series entitled *Padang Bulan* (PB) and *Cinta Dalam Gelas* (CDG), can be traced and uncovered in light of the author's idea. The choice of this novel series is due to the feminist aspirations portrayed by male authors (andro-text). To analyze the stories, firstly review the content and romance associated with the methods. This story contains a mixture of cultures and languages, which is related to the faith and the customs in the community described. The hermeneutic analysis uses to support this background. The results show the background conditions of Belitung where the mixture of three cultures, namely the Malay, the Sawang, and the Chinese, is boldly written in this story. The Chinese culture makes the protagonist face the

financial conflict and act as the family backbone and make her build a new perspective on social life, which results in the change of her sexual orientation. In another side, the Malay and Sawang culture which is strongly related to Moeslem, forbid any form of unusual sexual orientation. When the issue arises, the analyzing-descriptive technique uses to describe what conflicts may appear around the community and inside the protagonist herself. Last, the content analysis was done to get the real purpose of the story and what local pearls of wisdom contains in them. The local beads of the sense of the stories trace due to the use of the story. The local sense referred to include the unique local wisdom and dynamic local wisdom. We conclude that this method applied to other similar stories. It can help the readers understand the purpose of the story more accessible. Besides, the conflicting interest and the local wisdom can be compelling to be studied, while we can take the real lessons and the knowledge of another culture and their perspective to solve the issues of their life. Many of the analysis traces the explanation only and forget the real pearls of wisdom contains in every stories and matter.

References

- Akbar, S., & Winarni, R. (2013). Kajian Sosiologi Sastra Dan Nilai Pendidikan Dalam Novel Tuan Guru Karya Salman Faris. Solo: UNS. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 54–68.
- Barry, P. (2009). Beginning theory: an introduction to literary and cultural theory. In *Beginnings*.
- Basile, V., Bos, J., Evang, K., & Venhuizen, N. (2012). Developing a large semantically annotated corpus. *Lrec*.
- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Jakarta: Kencana*. <https://doi.org/10.1002/jcc.21776>
- Burns, A. (2009). Doing action research in English language teaching: A guide for practitioners. In *Doing Action Research in English Language Teaching: A Guide for Practitioners*. <https://doi.org/10.4324/9780203863466>
- Burton, D. L., & Rosenblatt, L. M. (2006). Literature as Exploration. *The English Journal*. <https://doi.org/10.2307/812153>
- Cho, J. Y., & Lee, E.-H. (2014). The qualitative report reducing confusion about grounded theory and qualitative content analysis: Similarities and differences. *Qualitative Report*. <https://doi.org/http://www.nova.edu/ssss/QR/QR19/cho64.pdf>
- Communication Between Cultures. (2008). In *Encyclopedia of Public Health*. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5614-7_469
- de Macedo, H., & Macedo, H. O. de. (2018). The Brothers Karamazov. In *Clinical Lessons on Life and Madness*. <https://doi.org/10.4324/9781351014557-7>
- Dostoevsky, F. M. (1881). *The Brothers Karamazov*. Edinburgh: Encyclopedia Britannica.
- Dostoevsky, F. M. (1972). Notes from underground. The double. In *Penguin classics*.
- Hermans, T. (1998). Descriptive Translation Studies. In *Benjamins translation library v4*.
- Hirata, A. (2010). *Padang bulan*. Jakarta: Mizan Publika.
- Hirata, A. (2011). *Cinta di dalam gelas*. Jakarta: Bentang Pustaka.
- Kockelman, P. (2010). Language, culture, and mind: Natural constructions and social kinds. In *Language, Culture, and Mind: Natural Constructions and Social Kinds*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511711893>

- Kuhiwczak, P., & Littau, K. (2007). A Companion to Translation Studies Edited by. In *Screen*. <https://doi.org/10.1075/target.22.1.09tir>
- Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. *International Journal of Science Education*. <https://doi.org/10.1080/0950069032000032199>
- Polletta, F., Chen, P. C. B., Gardner, B. G., & Motes, A. (2011). The Sociology of Storytelling. In SSRN. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081309-150106>
- Pradopo, R. D. (2013). Ragam Bahasa Sastra. *Humaniora*, (4), 38-46.
- Salam, A. (2018). TEORI HARMONI PENGANTAR KAJIAN SASTRA BERBASIS KONSTITUSI. *Paramasastra*. <https://doi.org/10.26740/parama.v4i1.1476>
- Scholz, O. R. (2015). Hermeneutics. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.63101-X>
- Sumaryono, S. (2018). Pertunjukan Wayang Topeng Pedalangan Yogyakarta. *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan*. <https://doi.org/10.24821/resital.v12i2.487>

Hegemoni Negara terhadap Seni Reyog Ponorogo

Jusuf Harsono

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

Email: JusufH@umpo.ac.id

Abstract

The existence of art Reyog Ponorogo until now it is a traditional art Ponorogo Regency, community pride even in politics is needed by the existence of the political elite, nevertheless the availability of the arts it politically sufficiently interesting to observe in the political dynamics localized in Ponorogo. How the political elite or the state doing my hegemony on all aspects of this art Reyog Ponorogo. This study using several methods to get clarification on the problems on some of them are with the interview, observation, and documentation. The result showed that elite politics or the state has made various ways to Hegemony art Reyog Ponorogo as a mass mobilization of effective local. especially in the dynamics of politics.

Keywords: Reyog Ponorogo, Hegemony, Mobilization.

Abstrak

Keberadaan seni Reyog Ponorogo sampai saat ini masih menjadi seni tradisional kebanggaan masyarakat Ponorogo, bahkan secara politik keberadaannya sangat dibutuhkan oleh para elit Politik, namun demikian keberadaan seni ini secara politik cukup menarik untuk diamati dalam dinamika politik lokal di Ponorogo. Bagaimana elit politik atau Negara melakukan praktek hegemoni terhadap seluruh aspek seni reyog Ponorogo ini. Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan di atas diantaranya adalah dengan metode wawancara, observasi dan dokumnetasi. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa para elit politik atau Negara telah melalukan berbagai cara untuk menghegemoni seni reyog ponorogo sebagai instrument mobilisasi massa yang efektif terutama dalam dinamika politik lokal.

Kata Kunci ; Reyog Ponorogo, Hegemoni, Mobilisasi.

<i>Submite</i>	: 17 Januari 2019
<i>Review</i>	: 09 Februari 2019
<i>Accepted</i>	: 30 Juni 2019
<i>Surel Correspondensi</i>	: ayubdwianggoro86@gmail.com

Latar Belakang

Reyog ponorogo merupakan sebuah seni tradisional yang melibatkan sekitar 40 orang, dengan berbagai peran mulai kelompok musik pengiring, pasukan berkuda, pengiring, penari “*Bujang Ganong*” dan penari topeng “*Kelana Sewandono*”, sebelum mereka mengenal

panggung festival mereka memainkan seni ini dengan berjalan kaki mengelilingi desa. Tidak heran pada akhirnya Reyog Ponorogo ini dikenal dalam dua bentuk, yaitu: Reyog festival dan Reyog *Obyog*. Reyog festival adalah reyog yang mengikuti festival yang diselenggarakan oleh Pemkab Ponorogo sejak tahun 1993 dan meningkat menjadi festival reyog tingkat nasional dengan diikuti peserta dari luar kota bahkan dari luar pulau Jawa. dengan segala aturan penampilan yang telah dibakukan (Achmadi, 2013).

Tari Reog Ponorogo sudah terkenal di seantero nusantara dan sudah banyak yang menuliskan secara tektual maupun kontekstual, tetapi yang ditulis adalah reyog tradisional atau sering disebut reyog Festivalan atau reog Kawak (lama/kuno), karena hanya dipentaskan saat ada festival reyog setahun sekali menjelang bulan Suro. Para seniman reyog tidak puas kalau hanya pentasnya 1 kali setahun, maka untuk memenuhi hasrat kesenimanannya pada tahun 1984/1985 dibentuklah reyog Obyogan oleh tokoh reyog yaitu pak Upal yang berasal dari suatu desa Ponorogo (wawancara dengan pak Yuni dan pak Bambang Wibisono diijinkan dikutip, 2008). Tarian garapan baru tersebut berkembang dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat sampai mencapai formatnya seperti sekarang ini, yang hanya dikenal di kalangan masyarakat pedesaan (Martono, 2012).

Reyog Obyog adalah reyog dengan penampilan tanpa pembakuan dari struktur kekuasaan tertentu, mereka biasanya melakukan atraksi sesuai dengan instruksi ketua rombongan yang sering disebut dengan Warok. Berbeda dengan Reyog Festival yang sudah diatur dengan buku panduan yang diterbitkan oleh Yayasan Reyog mulai jumlah rombongan, kostum pemain, jenis instrumen musik pengiring maka Reyog Obyog bisa tampil lebih bebas. Reyog Obyok beratraksi di jalanan kampung - kampung, perempatan - perempatan dan bahkan di halaman penduduk yang mengundang.

Kesenian Reyog Obyeok sering diundang dalam acara *temanten*, khitanan, dan khaulan. Reyog obyog lebih menunjukkan 'keaslian' penampilan mereka karena tidak ada juri yang melakukan penilaian bahkan durasi permainan sesuai yang dikehendaki mereka yang mengundang, bisa perorangan dan kelompok termasuk diantaranya adalah partai politik. Hal tersebut jika kita lihat secara historis Reyog khususnya Warok, dan kehidupan politik sangat dekat, dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan kesenian Reyog menjelma sebagai alat

yang dirasakan sangat efektif untuk memobilisasi Massa, melalui Warok kemudian agenda politik menjadi lebih mudah.

Fenomena politik penting yang perlu diinformasikan di sini adalah ketika pada tahun 1980an, Bupati Subarkah memerintahkan pada setiap desa dan kelurahan wajib mempunyai Unit Kesenian Reyog dan membangun gapura pintu masuk ke setiap desa dengan ornamen yang bergambarkan kesenian reyog. Unit kesenian reyog diwajibkan diadakan di setiap desa tentu dengan maksud untuk mewedahi para warok yang secara sosial adalah tokoh penting di desa. Dengan memobilisasi para warok di bawah bendera Golkar maka tidak heran bila pada masa Orde Baru, kota Ponorogo selalu didominasi oleh kemenangan partai Golkar di setiap Pemilu sebelum tahun 1999 karena pada Pemilu tahun tersebut perolehan suara Golkar dikalahkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai baru di Indonesia setelah Reformasi tahun 1998 (Jusuf Harsono, 2013).

Hubungan seni Reyog dengan politik memang sulit dipisahkan bahkan sampai pada masa sekarang. Baru baru ini, pada tanggal 27 Juli 2015, beberapa unit kesenian reyog beserta ratusan kru pendukung direkrut oleh sepasang Calon Bupati untuk menjadi penghibur dalam acara pendaftaran Pasangan Calon Bupati di kantor KPUD Kabupaten Ponorogo. Kedatangan rombongan pasangan Calon Bupati dan 10 unit kesenian Reyog Ponorogo tersebut telah menarik perhatian masyarakat Ponorogo terutama yang sedang melintasi jalan di depan kantor KPUD Kab Ponorogo (Radar Ponorogo, Rabu 29 Juli 2015).

Pada tanggal 2 Agustus 2015 di *aloon – aloon* Ponorogo telah diadakan pagelaran reyog Ponorogo yang diikuti oleh 212 “*dhadhak merak*” yang mewakili 21 wilayah kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Pagelaran ini dilaksanakan dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Ponorogo yang ke - 519 tahun. Kegiatan ini menjadi menarik dalam perspektif Politik karena diselenggarakan menjelang Pilkada bulan Desember 2015. Pagelaran kali ini adalah yang terbesar di Ponorogo, sejak Bupati Amin dan Wakil Bupati Ida dilantik tahun 2010, dalam kesempatan ini H. Amin juga merupakan salah satu calon Bupati Ponorogo pada Periode th 2016 -2021. Pada pagelaran tersebut Bupati Amin didaulat naik diatas *barongan* atau *dhadhak merak* yang sedang dimainkan oleh seorang pembarong, hal ini mengisyaratkan penghormatan para seniman reyog pada Bupati Amin karena dalam tradisi seni reyog Ponorogo hanya orang – orang

tertentu yang berkesempatan duduk diatas *dhadhak merak* yang sedang dimainkan oleh pembarong (Radar Ponorogo, 3 Agustus 2015).

Lakon seni budaya di atas adalah contoh bahwa seni budaya tradisional ternyata tidak bisa lepas dari keberadaan dinamika politik di sekelilingnya. Hal ini bisa terjadi karena seni budaya tersebut mempunyai keterkaitan, yakni: *Pertama*, cerita yang dibawakan berkaitan dengan konflik dan perebutan kekuasaan, sementara itu konsep kekuasaan tidak pernah lepas pembahasannya dari konsep politik. *Kedua*, penyelenggaraan dari kesenian tadi selalu menghadirkan massa dalam waktu dan tempat yang sama, karenanya sangat memungkinkan melibatkan konsep mobilisasi.

Harsono menegaskan bahwa kesenian reyog pada masa kini lebih banyak sebagai instrumen pengarah massa daripada sebagai unit seni budaya yang menghibur masyarakat. Kesenian ini semakin jarang mengunjungi masyarakat secara langsung. Masyarakat ponorogo harus berduyun duyun menuju lapangan kecamatan atau *aloon - aloon* jika ingin menikmati sajian seni reyog. Fenomena ini menunjukkan bahwa reyog sangat dekat dengan pusat – pusat kekuasaan. Seni reyog hanya bisa dimainkan dengan dukungan setidaknya 30 anggota group dan mengerahkan satu unit kesenian tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hanya mereka yang mempunyai dana dan kekuasaan yang bisa menyelenggarakan '*nanggap*' kesenian tersebut. (Ponorogo Pos, 2 September 2014)

Perjalanan kesenian Reyog Ponorogo dari waktu ke waktu, seperti pemaparan beberapa literatur diatas, menerangkan jika Reyog sangat efektif digunakan untuk menyampaikan pesan, hal inilah yang kemudian sering dimanfaatkan oleh Negara atau politikus untuk menyampaikan pesan – pesan, karena kesenian Reyog memiliki posisi yang strategis di hati masyarakat, melalui tokoh *Warok* yang memiliki pengaruh dalam sistem sosial masyarakat Ponorogo, kemudian dilakukanlah praktik hegemoni melalui budaya. Proses hegemoni yang dilakukan tersebut menjadi menarik untuk dikaji, sehingga memunculkan sebuah rumusan dari kajian ini, yakni: "Bagaimanakah Negara melakukan praktek hegemoni terhadap seni Reyog Ponorogo".

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk mengungkapkan fenomena secara mendalam yang digali melalui pandangan dan pengalaman masyarakat (Yusuf Adam Hilman, 2017). Menurut Cresswel Penelitian kualitatif, tidak terlalu dibutuhkan random sampling atau pemilihan acak terhadap partisipan (subjek penelitian) dengan kata lain penentuan sumber data pada orang yang diwawancari dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Andi Wijianto dan Samsuri, 2016).

Peneliti di lapangan menjadi partisipan observer yang menurut *Cresswel* peneliti menampakkan perannya sebagai observer, dengan demikian para informan yang merupakan anggota unit kesenian reyog ponorogo mengetahui bahwa ditengah-tengah mereka ada seorang peneliti yang sedang mengamati kegiatan mereka. Dengan metode ini peneliti bisa mendapatkan informasi berbagai kegiatan budaya dan politik yang melibatkan kesenian Reyog Ponorogo.

Dokumen-dokumen dapat mengungkapkan bagaimana subyek mendefinisikan dirinya sendiri, lingkungan, dan situasi yang dihadapinya pada suatu saat, dan bagaimana kaitan antara definisi diri tersebut dalam hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakan-tindakannya (Deddy.2016).

Data yang diperoleh dari grub reyog, peneliti juga menggunakan informasi dari Koran harian, sebagai salah satu sumber data. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dari tempat penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari tempat penelitian berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui metode pengamatan dan wawancara terhadap informan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari teknik pengambilan data yang dapat mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen yang dapat menunjang penelitian yaitu buku tamu atau daftar pengunjung perpustakaan (Ilmiah, 2013).

Teknik analisis data menggunakan model interaktif tersebut terdiri dari 4 alur kegiatan, yaitu: *data collecting* (pengumpulan data), *data reduction* (redaksi data), *data display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (Arif Eko Wahyudi Arfianto Ahmad Riyadh U. Balahmar, 2014).

Triangulasi adalah salah satu jawaban atas kesahihan riset kualitatif. Menjelang akhir abad ke-19, Egon G. Guba menulis makalah berjudul *Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries* yang terbit pada tahun 1981 dan pada tahun 1985 bersama Yvonna S. Lincoln menerbitkan *Naturalistic Inquiry*. Dua karya tersebut menjawab keraguan prosedur dan hasil riset kualitatif; khususnya prosedur triangulasi data, triangulasi investigator, triangulasi teori, dan triangulasi metodologi. Peneliti pendidikan perlu memandang realitas pendidikan sebagai sistem sosial yang dibangun melalui realitas dalam teks (catatan observasi, transkrip wawancara, analisis dokumen). Ragam teks itu dianalisis, dikonfirmasi, dan ditafsirkan secara partisipatif demi menghindari bias. Setelah prosedur-prosedur itu dilakukan, maka lahir-lah kesahihan (Moh. Zamili, 2015)

Beberapa ahli berpendapat terdapat empat macam triangulasi, yaitu (1) triangulasi sumber atau triangulasi data, (2) triangulasi metodologi, (3) triangulasi peneliti, dan (4). Triangulasi teoritis (Edy Jauhari, 2012)

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hegemoni Drama Reyog

Hegemoni drama reyog Ponorogo sangat terasa ketika diadakan Festival Reyog Nasional pada masa pemerintahan Bupati Markum Singodimejo. Salah satu hal yang harus dilakukan para peserta Festival Reyog Nasional yang diadakan di di aloon-aloon Ponorog pada setiap menjelang bulan Suro adalah peserta harus memperagakan drama seni reyog versi Bantaragin. Mau atau tidak mau setiap group kesenian reyog Ponorogo akan melaksanakan pakem tersebut dan hal tersebut merupakan bentuk pengakuan atas tafsir tunggal pemerintahan Markum terhadap kesenian reyog Ponorogo. Sementara itu di Ponorogo telah berkembang dua versi kesenian reyog yaitu aliran Wengker dan aliran Bantaragin. Wengker adalah nama salah satu kerajaan di Ponorogo sebelah selatan pada masa kerajaan Mojopahit, sementara Bantaragin adalah nama salah satu kerajaan di sebelah barat Ponorogo. Dua kerajaan tersebut mempunyai karakter yang berbeda. Kerajaan Wengker adalah kerajaan yang berseberangan dengan kerajaan Mojopahit, sementara kerajaan Bantaragin adalah kerajaan loyalis kerajaan Mojopahit. Dua versi kerajaan

tersebut mempunyai konsekuensi terhadap tafsir seni drama para pelaku seni reyog Ponorogo (Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan tokoh seniman reyog Ponorogo).

Beberapa informan pada akhirnya menyetujui pendapat bahwa kedua aliran menjadi tetap eksis pada penampilan yang berbeda. Pada penampilan di panggung Festival Reyog Ponorogo Nasional aliran Bantarangin eksis karena setiap peserta Festival harus mengikuti petunjuk Buku Kuning yang diterbitkan oleh Yayasan Reyog Ponorogo. Sementara Reyog versi Wengker tetap eksis di masyarakat dalam pentas Reyog Obyog. Reyog Obyog adalah seni reyog yang diminta tampil oleh seseorang atau masyarakat dalam acara yang diselenggarakan oleh pribadi ataupun masyarakat. Biasanya mereka tampil atas pesanan dan dibayar sesuai kesepakatan. Bisa karena acara sunatan, manten atau acara desa yaitu tradisi Bersih Desa. Biasanya penampilan mereka lebih natural karena tidak ada aturan baku dan tidak ada juri yang menilai. Penampilan mereka lebih bersifat menghibur para penonton atau yang punya gawean. Ada acara reyog obyog biasanya yang tampil adalah Dhadhak merak, jathil dan bujang ganong. Dhadhak merak berjumlah satu dengan pembarong dua orang, jathil berjumlah empat orang atau lebih, bujanganong satu atau dua orang. Kelono sewandono jarang dilibatkan atau ditampilkan dalam acara reyog obyog. Adapun warok akan tampil apa adanya tanpa make up seperti di Festival dan jarang menari pada tradisi reyog obyog.

Hegemoni Terhadap Warok

Pembentukan Yayasan Reyog Ponorogo yang digagas oleh Bupati Markum Singodimejo pada tahun 1997 adalah salah satu cara hegemoni Negara atas para Warok di Ponorogo. Warok adalah salah satu tokoh informal penting yang secara sosial politik sangat strategis di Ponorogo. Warok dianggap sangat berpengaruh pada masyarakat. Mereka dianggap berpengaruh pada masyarakat dimungkinkan karena sebagian dari mereka mempunyai kekuatan supranatural tertentu, berbeda-beda, yang sering disebut sebagai 'kesaktian'. (Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan tokoh seniman reyog Ponorogo)

Keberadaan Yayasan Reyog Ponorogo begitu penting bagi Elit politik karena bisa mewadahi seluruh Warok di Ponorogo, walaupun respon warok terhadap keberadaan Yayasan Reyog berbeda-beda. Elit begitu pandai melakukan praktek hegemoni terhadap para warok. Selain dengan iming-iming dana yang cukup besar dan menjadikannya warok senior sebagai pengurus

partai, para elit juga berpenampilan seolah-olah mereka juga seperti warok. Mereka menidentifikasi diri sebagai warok dengan cara berpakaian seperti layaknya seorang warok. Mereka berpakaian hitam-hitam. Memakai celana panjang dan baju panjang berwarna hitam dan baju bermodel seperti baju yang dikenakan oleh warok Ponorogo. Lebih dari itu dengan ikat kepala atau blangkon khas warok Ponorogo dengan blangkon yang berbeda dengan blangkon Yogya atau Surakarta (Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan tokoh seniman reyog Ponorogo)

Beberapa warok yang berpengaruh dijadikan tokoh partai politik. Warok Tobron setelah tidak lagi menjadi anggota DPRD dari Golkar juga dinobatkan sebagai warga kehormatan Golkar oleh Ketum Golkar pada tahun 2008. Sementara itu warok berpengaruh lainnya, Bikan, juga dijadikan sebagai anggota Kehormatan Partai Demokrat oleh Ketua DPP Partai Demokrat Dr. Soekarwo yang juga seorang Gubernur Jawa Timur (Sumber: diolah dari hasil wawancara dengan tokoh seniman reyog Ponorogo)

Hegemoni Terhadap Simbol Identitas

Macan jantan besar adalah simbol identitas masyarakat Ponorogo yang merefleksikan keberanian dan keperkasaan seorang warok. Namun demikian nampaknya masyarakat Ponorogo belum begitu faham perbedaan antara seekor harimau dengan seekor Singa. Harimau adalah binatang endemik Asia, sementara binatang Singa adalah endemik Afrika. Dengan demikian maka Singa tidak mungkin berasal dari pulau Jawa apalagi diyakini bahwa di pulau Jawa pernah menjadi habitat Harimau Loreng yang kini diyakini sudah punah.



Gambar 1 Sosok Singa yang berada di aloon – aloon Kabupaten Ponorogo
Sumber : diolah dari dokumentasi peneliti

Masyarakat Ponorogo sempat bangga ketika Bupati Makum Singodimejo membangun taman di sekitar aloon-aloon dan diberi patung Singa disetiap sudut lapangan. Namun pada akhirnya masyarakat Ponorogo sadar bahwa patung yang dibangun oleh Bupati Markum adalah patung Singa, bukanlah patung macan sebagaimana simbol dan identitas masyarakat Ponorogo. Masyarakat Ponorogo nampak tidak memasalahkan hal tersebut karena dianggap sudah mewakili symbol masyarakat Ponorogo dan memenuhi rasa estetika yang mereka butuhkan. Lebih daripada itu masyarakat Ponorogo khususnya komunitas seni reyog Ponorogo banyak juga yang menggunakan nama group kesenian reyog mereka dengan nama Singo, seperti Singo Manggolo, Singo Mudho, yang jumlahnya di Ponorogo bisa mencapai puluhan (Alip. 2015)

Hegemoni Konstruksi Sosial Budaya

Bupati Markum Singodimejo pada tahun 1997 mengeluarkan perintah untuk menjadikan REOG sebagai akronim dari Resik Endah Omber dan Girang sebagai jargon untuk mendorong agar masyarakat Ponorogto mempunyai budaya bersih di lingkungannya. Jargon seperti ini lazim dimiliki oleh kota-kota di sekitar Ponorogo. Kota magetan menggunakan jargon kota MITRA yang merupakan akronim dari Magetan Indah Tertib Ramah dan Aman. Sementara itu Nganjuk berjargon Anjuk Ladang, Jombang dengan jargon BERIMAN. Penggunaan jargon REOG oleh Bupati Markum disambut baik oleh Masyarakat Ponorogo. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat menilai kredo ini lebih sesuai dengan identitas kota Ponorogo. Kredo ini

menggantikan credo yang dibuat oleh bupati sebelumnya yaitu SHIMPONI yang diperkenalkan oleh Bupati Subarkah yaitu bupati yang menjabat pada tahun 1983-1988. Markum Singodimejo adalah bupati Ponorogo yang menjabat selama dua periode yaitu pada tahun 1994-2004. (Rido. 2004)

Bupati setelah Markum, yaitu Muhadi Suyono, Amin, dan Ipong Muchlisoni hampir tidak ada perubahan atas konstruksi sosial yang sudah ditancapkan oleh Markum. Mereka hanya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh bupati Markum. Tidak banyak hal yang dilakukan terkait kesenian Reyog Ponorogo yang telah membentuk karakteristik masyarakat Panaragan.

Pembahasan

Hegemoni Negara terhadap Seni Reyog Ponorogo tidak hanya dilakukan oleh Bupati Markum, namun juga oleh seluruh Bupati Ponorogo sejak Bupati Sumadi yang berkuasa sejak tahun 1976, bupati Soebarkah tahun 1982, bupati Gatot Sumani th 1988, bupati Markum th 1994-2004. Bupati Soebarkah adalah Bupati Ponorogo yang pertama kali memperkenalkan reyog Ponorogo dipentaskan di atas panggung, yaitu ketika awal tahun 80an diadakan kegiatan menyongsong 1 Suro melalukan Pagelaran Reyog di halaman SMPN 1 Ponorogo. Pada eranya bupati Soebarkah juga memerintahkan masyarakat Ponorogo untuk membuat Tugu Selamat Datang pada setiap gerbang masuk Desa dalam bentuk patung atau relief Reyog Ponorogo, Namun diantara para Bupati di Ponorogo, maka bupati Markum lah yang paling kuat dalam menancapkan hegemoni dan pengaruhnya di Ponorogo. Nama Markum begitu kuat tertanam dimasyarakat Ponorogo dikarenakan beberapa hal :

1. Beberapa kali di bawah kepemimpinannya Ponorogo memperoleh penghargaan Adipura dari pemerintah Pusat karena prestasi sebagai kota yang bersih dan indah.
2. Di bawah kepemimpinannya pertama kali kota Ponorogo berhasil mengadakan Festival Nasional Reyog Ponrogo.
3. Di bawah kepemimpinannya kota Ponorogo berhasil menetapkan hari jadinya yaitu pada 1 Suro.
4. Pada era bupati Markumlah kawasan Telaga Ngebel menjadi kawasan wisata penting di Kabupaten Ponorogo.

5. Pada era bupati Markum pula Kabupaten Ponorogo mempunyai gedung pemerintahan berlantai 8.

Karena berbagai prestasi ini pulalah yang menjadikan Markum (Negara) leluasa melakukan hegemoni atas seni budaya Reyog Ponorogo tanpa disadari oleh masyarakat Ponorogo kelas bawah dan disadari oleh masyarakat terpelajar. Hegemoni melalui budaya (Gramsci, 2013) adalah hegemoni yang paling mudah yang dilakukan oleh penguasa atau Negara. Dengan menyadari kelemahan rakyat namun merasa diuntungkan oleh politik Negara maka rakyat bisa menerima hegemoni tersebut. Walaupun dalam kasus Ponorogo ini sebatas politik budaya oleh para bupati Ponorogo. Masyarakat Ponorogo sampai tidak menyadari bahwa symbol identitas masyarakat Ponorogo telah diganti dari Harimau menjadi binatang Singa, pembangunan beberapa patung macan di sekitar aloon-aloon menunjukkan upaya elit politik atau Negara dalam menghegemoni masyarakat Ponorogo. Kedua binatang tersebut memang mempunyai karakter yang hamper sama, namun keduanya hidup pada alam yang berbeda. Perbedaan mendasar karakter kedua binatang adalah bahwa Singa hidup berkoloni dan berburu secara berkelompok dan merupakan endemic binatang Afrika, sementara itu Harimau hidupnya cenderung soliter atau menyendiri dan binatang ini merupakan endemic binatang Asia. Dengan demikian mereka merupakan binatang dengan karakter yang sama sekali berbeda. Hegemoni terhadap para warok perlu dilakukan oleh para elit politik dan Negara karena para warok adalah tokoh informal yang sangat berpengaruh di kota ini dan secara politik mereka merupakan mobilisator politik (Jusuf, 2005) dan keberadaan mereka merupakan Sub elit di masyarakat Ponorogo. Sub elit (Keller, 1994) merupakan struktur penting dalam masyarakat karena merekalah penopang kekuasaan elit.

Telah terjadi ambiguitas yang berat di antara masyarakat Ponorogo yang terpelajar tentang keberadaan patung-patung tersebut. Ambiguitas tersebut nampaknya sengaja diciptakan mengingat bahwa kawasan sekitar tujuh patung singa yang berada di depan Pendopo Agung diberi istilah Blok M oleh bupati Markum, tentu yang dimaksud M adalah singkatan dari Macan. Disini juga terjadi hegemoni yang kuat karena masyarakat juga memahami bahwa tujuh patung itu adalah refleksi dari seorang Markum sedang ngemong 7 anak dan diawasi istrinya yang dalam patung itu seolah mencerminkan seorang Dewi Songgolangit dari Kediri yang akan dipersunting oleh Prabu Kelono Sewandono.

Kesimpulan

Hegemoni Negara terhadap seni reyog ponorogo terjadi sejak lama oleh para elit, terutama oleh Bupati. Bahkan sejak pemerintahan orde baru. Hegemoni dilakukan oleh para bupati dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan seni budaya reyog Ponorogo ini. Mulai dari cerita sejarah atau drama atau sendratarinya, ketokohan waroknya, identitas symbol masyarakat ponorogo sampai dengan konstruksi sosialnya. Hegemoni ini terjadi karena para elit Negara menganggap bahwa seni reyog ponorogo adalah seni budaya yang bisa mendatangkan massa banyak. Seni reyog ini pada akhirnya dimanfaatkan oleh para elit karena keberadaannya sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Seni reyog ini telah menjadi instrumen pengerah massa baik oleh elit partai maupun pejabat pemerintahan Negara. Dengan demikian hegemoni Negara atau elit politik telah terjadi sbb:

1. Elit telah mendorong adanya perubahan cerita drama Reyog yang semula di masyarakat terbagi menjadi dua versi yaitu drama reyog yang mengisahkan kerajaan Wengker dan versi lain adalah kisah Kerajaan Bantar Angin.
2. Munculnya ambiguitas di masyarakat Ponorogo bahwa sebelumnya mereka meyakini binatang Harimau (Macan Loreng) sebagai symbol identitas masyarakat Ponorogo, sekarang masyarakat Ponorogo menjadi ambigu setelah bupati Markum membuat patung Singa di setiap sudut aloon-aloon Ponorogo.
3. .Setiap elit politik Ponorogo selalu mengidentifikasi diri sebagai warok (tokoh reyog) untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan untuk bisa diterima sebagai bagian penting dalam dinamika budaya masyarakat Ponorogo.

Kuatnya Hegemoni elit dan Negara dikawatirkan akan sangat dominan dalam menentukan dinamika masyarakat Ponorogo.

Daftar Pustaka

- Achmadi, A. (2013). Pasang surt dominasi Islam Terhadap Kesenian Reog Ponorogo. *Analisis Studi Keislaman*, XIII(1), 111–134. Retrieved from <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/644/542>
- Andi Wijianto dan Samsuri. (2016). Implementasi Penanaman Nilai - nilai Bela Negara dalam Pembelajaran PPKN di SMA Taruna Nusantara Magelang. *E Civics*, 5(5), 1–14. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/civics/article/view/2607/3461>
- Arif Eko Wahyudi Arfianto Ahmad Riyadh U. Balahmar. (2014). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 53–66. Retrieved from <http://umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/408/331>
- Edy Jauhari, E. S. (2012). Kesantunan Positif dalam Masyarakat Etnik Tionghoa di Surakarta: Kajian. *Mozaik (Jurnal Ilmu Humaniora)*, 12(2), 105–121. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mozaik4f4f23ced4full.pdf>
- Ilmiyah, T. (2013). PENGARUH PEMANFAATAN KOLEKSI LOCAL CONTENT TERHADAP KEGIATAN PENELITIAN MAHASISWA YANG SEDANG MENGERJAKAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR DI PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2(2), 1–9. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/3122/2981>
- Jusuf Harsono, & S. S. (2013). *Sosiologi Masyarakat Ponorogo* (2nd ed.). Ponorogo: UMPO Press. Retrieved from [http://eprints.umpo.ac.id/2874/1/Buku Sosiologi Masyarakat Ponorogo 2016.pdf](http://eprints.umpo.ac.id/2874/1/Buku+Sosiologi+Masyarakat+Ponorogo+2016.pdf)
- Martono, H. (2012). REYOG OBYOGAN SEBAGAI PROFESI. *Joged Jurnal Seni Tari*, 3(1), 36–48. Retrieved from <http://journal.isi.ac.id/index.php/joged/article/view/55>
- Moh. Zamili. (2015). Menghindari dari bias : Praktik Trianggulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Lisan Al Hal*, 9(2), 287–311. Retrieved from <http://journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/97/84>
- Yusuf Adam Hilman. (2017). KELEMBAGAAN KEBIJAKAN PARIWISATA DI LEVEL DESA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 150–163. Retrieved from <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/JIP/article/view/711>
- Hasil Wawancara dengan tokoh dan seniman Reyog Ponorogo
 Radar Ponorogo, Rabu 29 Juli 2015
 Radar Ponorogo, 03 Agustus 2015
 Radar Ponorogo, 02 September 2015